

LAPORAN TAHUNAN TA 2014



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2015**



SCIENCE INNOVATION. NETWORKS

LAPORAN TAHUNAN TA 2014

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Handewi P. Saliem

Ketua : Ketut Kariyasa

Sekretaris : Sri Hastuti Suhartini

**Anggota : Sri Hery Susilowati
Slamet Widodo
Endro Gunawan
M. Suryadi
Ening Ariningsih
Hermanto
Agus Subekti
Yana Supriyatna
Ahmad Makky Ar-Rozi**



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2015**



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi pemerintahan/negara dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya. Tupoksi PSEKP adalah mengembangkan kemampuan dalam menganalisis berbagai permasalahan sosial ekonomi pertanian di tingkat perdesaan, wilayah, nasional, kawasan, maupun internasional dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan.

Laporan Tahunan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh PSEKP selama tahun anggaran 2014. Materi pokok yang disajikan dalam laporan meliputi struktur organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, pendayagunaan hasil dan kerja sama penelitian, serta monitoring dan evaluasi. Khusus untuk kegiatan penelitian, disajikan sinopsis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP pada tahun 2014.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung mulai dari persiapan sampai penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bogor, Januari 2015

Kepala Pusat,

Dr. Handewi Purwati Saliem

NIP. 19570604 198103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Visi dan Misi	1
1.2. Tupoksi, Sasaran, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian.....	3
II. SUMBER DAYA MANUSIA	5
III. SARANA DAN PRASARANA	10
3.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan).....	10
3.2. Barang-Barang Bergerak	10
3.2.1. Barang Inventaris Alat Angkutan.....	11
3.2.2. Barang Inventaris Peralatan Kantor	11
3.3. Anggaran DIPA, PNBPN, dan Kerja Sama Penelitian	13
IV. PROGRAM	17
4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan.....	17
4.2. Perencanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2014.....	17
4.3. Mekanisme Perencanaan Penelitian Tahun Anggaran 2015 dan Pelaksanaan Tupoksi Subbidang Program.....	18
4.3.1. Judul – Judul Proposal Penelitian DIPA TA 2015	21
4.4. Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Subbidang Program pada Tahun 2014.	21
4.5. Upaya Mengatasi Permasalahan	22
V. SINOPSIS	23
5.1. Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015	23
5.2. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman Ternak	24
5.3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian	25

5.4. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian	27
5.5. Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian	29
5.6. Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan	31
5.7. Pencapaian Target MDGs dan Implikasinya pada SDGs.....	32
5.8. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura	34
5.9. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data PATANAS.....	35
5.10. Outlook Pertanian 2015 – 2019	39
VI. PENDAYAGUNAAN HASIL DAN KERJA SAMA PENELITIAN ..	43
6.1. Publikasi Hasil – Hasil Penelitian	43
6.1.1. Jenis-Jenis Publikasi.....	43
6.1.2. Pendistribusian Hasil Publikasi.....	54
6.1.3. Dewan Redaksi.....	54
6.2. Komunikasi dan Dokumentasi Hasil Penelitian.....	56
6.2.1. Seminar.....	56
6.2.2. Pengelolaan Website.....	60
6.3. Perpustakaan	63
6.3.1. Pengadaan Bahan Pustaka	64
6.3.2. Pengolahan Bahan Pustaka	66
6.3.3. Pelayanan Perpustakaan.....	67
6.3.4. <i>Stock Opname</i> Bahan Pustaka	67
6.3.5. Perpustakaan Digital	67
6.3.6. Kegiatan Administrasi	68
6.4. Kerja Sama Penelitian	69
VII. EVALUASI DAN PELAPORAN.....	70
7.1. Kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	70
7.2. Ruang Lingkup	71
7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2014	72
7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian	74
7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Penelitian	83
7.3.3. Pelayanan Perpustakaan.....	86
7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi.....	87
7.3.5. Sarana Penelitian.....	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Kelompok Umur Tahun 2014	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Golongan dan Masa Kerja Tahun 2014.....	6
Tabel 3. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014.....	6
Tabel 4. Jumlah Tenaga Fungsional PSEKP Tahun 2014.....	7
Tabel 5. Jumlah Peneliti PSEKP Menurut Disiplin Ilmu dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014.....	8
Tabel 6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia PSEKP Tahun 2014	9
Tabel 7. Daftar Kondisi Barang Inventaris PSEKP (per 31 Desember 2014).....	11
Tabel 8. Perkembangan Pelaksanaan Keuangan DIPA PSEKP Tahun Anggaran 2014 (per 31 Desember 2014).....	14
Tabel 9. Realisasi Anggaran per Kegiatan PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)	15
Tabel 10. Realisasi Anggaran per Jenis Pengeluaran PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)	15
Tabel 11. Rekapitulasi PNBPN PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)	16
Tabel 12. Judul-Judul Proposal Penelitian DIPA TA 2015	21
Tabel 13. Judul dan Penulis Naskah JAE Tahun 2013 dan 2014	44
Tabel 14. Judul dan Penulis Naskah FAE Tahun 2014	45
Tabel 15. Judul dan Penulis Naskah AKP Tahun 2014.....	46
Tabel 16. Judul dan Penulis Naskah Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia Ke-33 “Optimalisasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” Tahun 2013.	47
Tabel 17. Daftar Isi Terbitan Newsletter PSEKP Tahun 2014	53
Tabel 18. Daftar Judul Leaflet Tahun 2014.....	54
Tabel 19. Distribusi Publikasi Ilmiah Tahun 2014.....	54

Tabel 20. Susunan Dewan Redaksi JAE, FAE, AKP, dan Newsletter Tahun 2014.....	55
Tabel 21. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Rutin Tahun 2014.	56
Tabel 22. Judul Makalah dan Penulis pada Seminar Hari Pangan Sedunia Ke-34 “Pertanian-Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial” Tahun 2014.	57
Tabel 23. Jumlah Pengakses Website PSEKP pada Tahun 2014.....	61
Tabel 24. Frase/Kata yang Digunakan dalam Pencarian (per 5 Desember 2014)	61
Tabel 25. Materi Website PSEKP yang Diakses Tahun 2014.....	62
Tabel 26. Pengadaan Bahan Pustaka TA 2014	64
Tabel 27. Koleksi Database Bahan Pustaka di Perpustakaan PSEKP (per 31 Desember 2014)	66
Tabel 28. Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan PSEKP Januari s/d Desember 2014	67
Tabel. 29. Kegiatan untuk Peningkatan Profesi Kepustakawan	68
Tabel. 30. Status Kegiatan Kerja Sama Penelitian PSEKP (Dalam dan Luar Negeri) (per 31 Desember 2014).....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	4
Gambar 2. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Golongan dan Masa Kerja Tahun 2014	6
Gambar 3. Keragaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014..	7
Gambar 4. Jumlah Pegawai PSEKP Berdasarkan Jenjang Fungsional Tahun 2014	8
Gambar 5. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pertanian	19
Gambar 6. Mekanisme Perencanaan Kegiatan Penelitian Internal PSEKP.	20
Gambar 7. Bagan Keterkaitan Tim Teknis, Tim Monev, dan Tim Editor pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	76

I. PENDAHULUAN

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah sebuah lembaga penelitian/pengkajian eselon II yang berada di bawah lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976 SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Berdasarkan Pasal 1374 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010 tersebut, tugas utama PSEKP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Program analisis sosial ekonomi dan kebijakan di PSEKP dirancang untuk meningkatkan peran dan kemampuan institusi PSEKP dalam merumuskan alternatif dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Hal itu secara rinci telah dituangkan dalam Renstra yang memayungi program tersebut serta menetapkan strategi dan kebijakan umum untuk merealisasikannya. Program tersebut disusun berlandaskan visi dan misi yang futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan paradigma pembangunan pertanian masa datang.

Inovasi kebijakan yang dihasilkan oleh PSEKP harus berkualitas, cepat, dan akurat, serta difokuskan pada masalah-masalah aktual pembangunan sektor pertanian yang berkaitan dengan: (1) perdagangan multilateral perjanjian regional dan bilateral; (2) informasi dan data yang berkaitan dengan dinamika sosial ekonomi perdesaan secara berkala; (3) informasi dan data mengenai penyebab penurunan produktivitas produk pertanian (*supply constraint*); (4) peningkatan daya saing, nilai tambah, dan pengembangan produk pertanian (agroindustri); (5) ketahanan pangan dan kemiskinan terkait MDG's; dan (6) penurunan kualitas infrastruktur dan sumber daya pertanian.

1.1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan

dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal, maka disusun visi dan misi PSEKP sebagai berikut:

Visi

Menjadi lembaga pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Misi

1. Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian yang merupakan produk primer PSEKP;
2. Melakukan analisis kebijakan, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi dan ilmu pengetahuan hasil analisis menjadi rumusan usulan dan pertimbangan kebijakan pembangunan pertanian;
3. Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan pertanian; dan
4. Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan.

1.2. Tupoksi, Sasaran, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 Pasal 1374, tugas pokok dan fungsi PSEKP sebagai bagian dari institusi Kementerian Pertanian adalah memberikan opsi, pertimbangan, dan informasi bagi pimpinan agar dapat membuat dan melaksanakan program fasilitasi, kebijakan, dan peraturan terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan petani.

Tugas Pokok

Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian (Pasal 1374 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010).

Fungsi

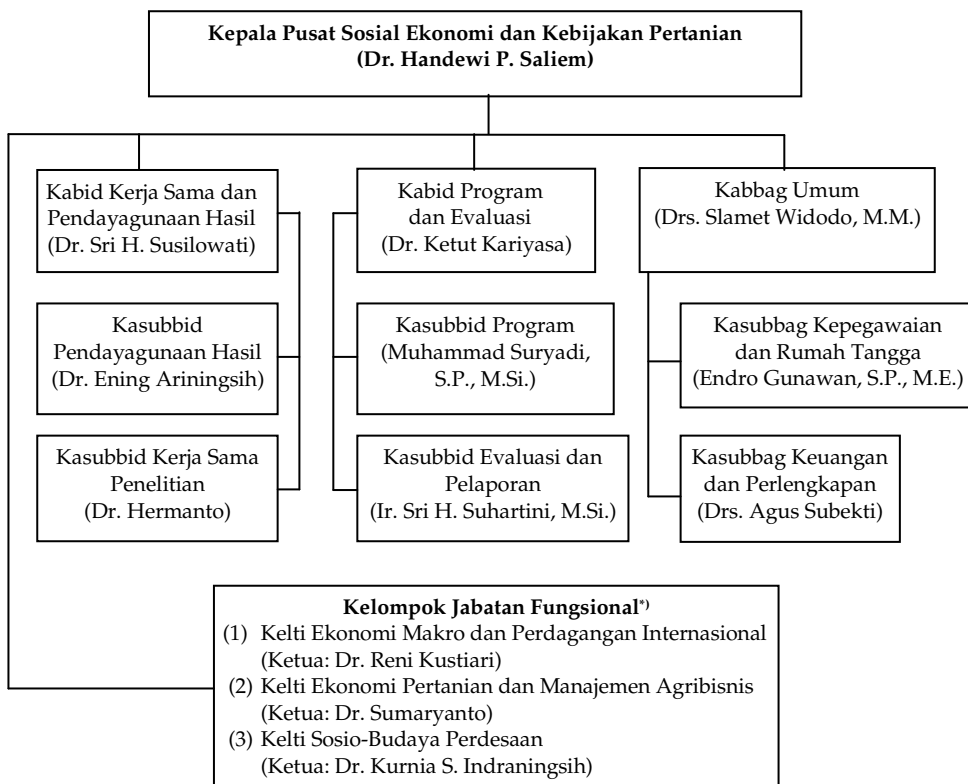
1. Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

2. Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan di bidang pertanian;
3. Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;
4. Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
5. Pelaksanaan kerja sama dan mendayagunakan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
6. Evaluasi dan pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Pasal 1375 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010).

1.3. Sasaran Kelompok Pengguna Hasil Penelitian

1. Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian;
2. Pejabat pembuat kebijakan lembaga negara di luar Kementerian Pertanian;
3. Praktisi agribisnis;
4. Politisi, ilmuwan, dan masyarakat peminat pembangunan pertanian; dan
5. Peneliti

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010, PSEKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat Eselon IIA, dibantu oleh 3 unit struktural setingkat Eselon IIIA, yaitu Bagian Umum, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil, dan Bidang Program dan Evaluasi, serta dilengkapi dengan Kelompok Jabatan Fungsional, sementara masing-masing eselon III dibantu oleh 2 unit eselon struktural di bawahnya dengan Struktur Organisasi seperti disajikan pada Gambar 1. Sejak tahun 2010 sampai sekarang PSEKP dipimpin oleh Dr. Handewi P. Saliem yang diangkat dengan surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 3752/Kpts/KP.330/11/2010 tanggal 26 November 2010 tentang pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.



Keterangan: *) Berdasarkan SK Kapus PSEKP Nomor: 368/Kp.330/A.9/03/2009

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian pada akhir tahun 2014, tercatat bahwa sumber daya manusia yang ada di PSEKP jumlahnya terus menurun dari 175 orang pada tahun 2010 menjadi 161 orang pada tahun 2014. Penurunan jumlah tersebut disebabkan adanya karyawan yang telah memasuki masa pensiun, di samping karena adanya mutasi kerja. Struktur pegawai PSEKP berdasarkan umur pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar (52,80%) berada pada kelompok umur 46-55 tahun, 23,60 persen pada kelompok umur >55 tahun, sedangkan sisanya masing-masing 18,01 persen berada pada kelompok umur 36-45 tahun dan 5,59 persen pada kelompok umur 25-35 tahun (Tabel 1). Tampak bahwa jumlah SDM yang berada pada kelompok umur > 45 tahun adalah yang paling tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kalau tidak diikuti adanya kenaikan jumlah fungsional baik fungsional peneliti maupun fungsional lainnya, maka jelas pada golongan ini akan terjadi pensiun secara bergelombang.

Tabel 1. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Kelompok Umur Tahun 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Pegawai (Orang)	Persentase (%)
25-35	9	5,59
36-45	29	18,01
46-55	85	52,80
>55	38	23,60
Jumlah	161	100,00

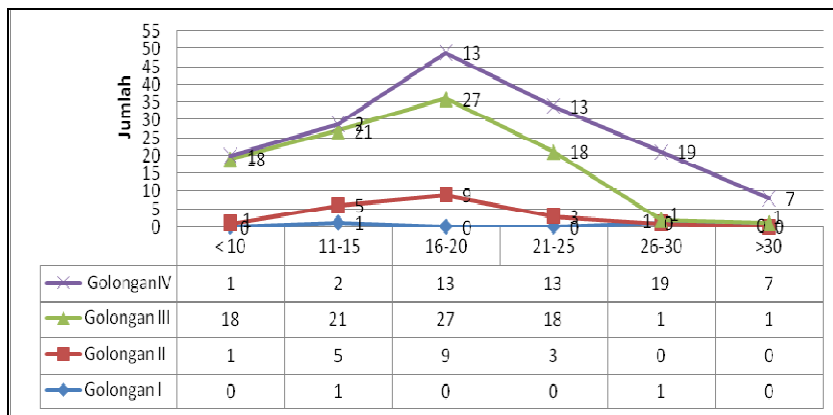
Jumlah karyawan PSEKP berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa yang memiliki masa kerja ≤ 15 tahun hanya sebanyak 49 orang (30,43%). Sebagian besar karyawan (69,57%) sudah mempunyai cukup pengalaman melaksanakan tugas di PSEKP >15 tahun. Banyaknya pegawai dengan masa kerja di atas 15 tahun berbanding lurus dengan jumlah Golongan III dan IV (Tabel 2). Dengan meningkatnya masa bakti dan pengalaman kerja, diharapkan selain dapat meningkatkan kinerja dalam tugas keseharian di masing-masing bidang, juga berdampak pada peningkatan produktivitas kegiatan institusi secara keseluruhan, sehingga output yang dihasilkan PSEKP dapat sesuai dengan target yang diharapkan.

Dilihat dari sebaran tingkat pendidikan, terlihat bahwa sebagian besar pegawai PSEKP (26,08%) berpendidikan SMU, diikuti S3 (21,12%), S2 (19,88%), dan S1 (19,25%). Selain itu, masih terdapat 1,90 persen yang berpendidikan SD, 2,48 persen berpendidikan SMP, dan 9,32 persen berpendidikan Diploma/Sarjana Muda (Tabel 3). Konfigurasi pendidikan pegawai PSEKP berdasarkan tugas pokok dan fungsi memperlihatkan kecenderungan bahwa sebagian besar peneliti telah mengikuti program pendidikan pascasarjana S2

dan S3. Sementara itu, dinamika penjenjangan dan peningkatan pendidikan sebagian karyawan lainnya belum berjalan secara optimal, khususnya untuk mendukung kinerja sebagai tenaga penunjang.

Tabel 2. Jumlah Pegawai PSEKP menurut Golongan dan Masa Kerja Tahun 2014

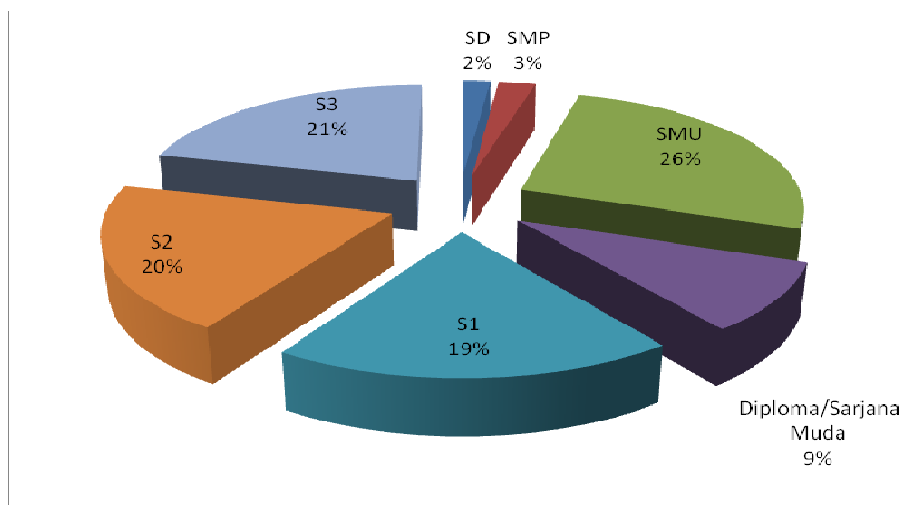
Golongan	Masa Kerja (Tahun)						Jumlah	Persen
	≤ 10	11-15	16-20	21-25	26-30	>30		
I	-	1	-	-	1	-	2	1,24
II	1	5	9	3	-	-	18	11,18
III	18	21	27	18	1	1	86	53,42
IV	1	2	13	13	19	7	55	34,16
Jumlah	20	29	49	34	21	8	161	100,00
Persen	12,42	18,01	30,43	21,12	13,04	4,97	100,00	



Gambar 2. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Golongan dan Masa Kerja Tahun 2014

Tabel 3. Jumlah Pegawai PSEKP Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Pendidikan	Pria	Wanita	Total	Persen
SD	3	-	3	1,86
SMP	4	-	4	2,48
SMU	36	6	42	26,09
Diploma/Sarjana Muda	8	7	15	9,32
S1	18	13	31	19,25
S2	15	17	32	19,88
S3	26	8	34	21,12
Jumlah	110	51	161	100,00

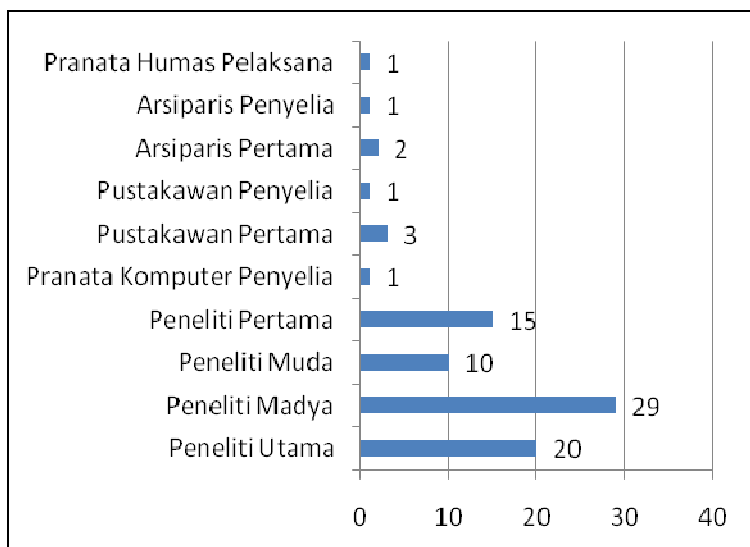


Gambar 3. Keragaan Pegawai PSEKP Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Jumlah pegawai PSEKP yang telah memiliki jabatan fungsional seluruhnya berjumlah 83 orang, di mana 74 orang (89,15%) merupakan fungsional peneliti dan 9 orang lainnya (10,85%) merupakan fungsional nonpeneliti. Berdasarkan jenjang fungsional peneliti, peneliti PSEKP dengan jenjang tertinggi (Peneliti Utama) mencapai 27,02 persen, Peneliti Madya sebanyak 39,18 persen, Peneliti Muda sebanyak 13,51 persen, dan Peneliti Pertama sebanyak 20,29 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah Tenaga Fungsional PSEKP Tahun 2014

No.	Jenjang Fungsional	Jumlah (orang)
A.	Fungsional Peneliti	
1.	Peneliti Utama	20
2.	Peneliti Madya	29
3.	Peneliti Muda	10
4.	Peneliti Pertama	15
	Subtotal (A)	74
B.	Fungsional Non-Peneliti	
1.	Pranata Komputer Penyelia	1
2.	Pustakawan Pertama	3
3.	Pustakawan Penyelia	1
4.	Arsiparis Pertama	2
5.	Arsiparis Penyelia	1
6.	Pranata Humas Pelaksana	1
	Subtotal (B)	9
Total (A+B)		83



Gambar 4. Jumlah Pegawai PSEKP Berdasarkan Jenjang Fungsional Tahun 2014

Berdasarkan kepakaran peneliti dan latar belakang disiplin ilmu, terlihat bahwa sebagian besar peneliti di PSEKP mempunyai keahlian dalam bidang Ilmu Ekonomi Pertanian dengan jenjang pendidikan S1 (15 orang), S2 (15 orang), dan S3 (29 orang), sementara peneliti lainnya mempunyai keahlian dalam bidang Sosiologi Pertanian, Sistem Usaha Pertanian, dan Kebijakan Pertanian (Tabel 5). Selain kepakaran tersebut, sampai dengan tahun 2014 PSEKP tercatat telah memiliki tujuh orang tenaga ahli dalam Bidang Riset dengan jenjang penghargaan kepangkatan tertinggi sebagai Profesor Riset. Dalam waktu yang akan datang jumlah Profesor Riset dan Peneliti Utama PSEKP diharapkan akan terus bertambah sejalan dengan tuntutan profesionalisme kegiatan di bidang penelitian.

Tabel 5. Jumlah Peneliti PSEKP Menurut Disiplin Ilmu dan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No.	Disiplin Ilmu	Pendidikan			Total
		S3	S2	S1	
1.	Ekonomi Pertanian	29	15	15	59
2.	Kebijakan Pertanian	1	2	-	3
3.	Sistem Usaha Pertanian	-	2	2	4
4.	Sosiologi Pertanian	2	9	1	12
Total		32	28	18	78

Dalam upaya peningkatan *capacity building* pegawai PSEKP, telah dilakukan pendidikan, pelatihan, dan kursus, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Tabel 6).

Tabel 6. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia PSEKP Tahun 2014

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu	Tempat
1.	Diklat SAP	4 org	Januari	Subang
2.	Pelatihan Humas	1 org	Februari	Kemenfo
3.	Diklat Peneliti Lanjutan	5 org	Maret	Cibinong
4.	Temu Teknis Perpustakaan	1 org	Mei	Bogor
5.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	2 org	April	Ciawi
6.	Pelatihan Agribisnis Purnabakti	2 org	Mei	Kayu Ambon
7.	Pelatihan Teknis Perpustakaan	1 org	Mei	Yogyakarta
8.	Diklat Kehumasan	1 org	Mei	Ciawi
9.	Kursus Bahasa Inggris	1 org	Mei-Juli	Bogor
10.	Diklat Peneliti Pertama	1 org	Juni	Cibinong
11.	Workshop Karya Tulis Ilmiah	2 org	Juni	Bogor
12.	Pelatihan Prajabatan	1 org	Juni-juli	Ciawi
13.	Tugas Belajar Program S2	1 org	2014/2015	Bogor
14.	Workshop SAIBA	1 org	Agustus	Bogor
15.	Ujian Dinas Tk. I	7 org	Agustus	Bogor
16.	Pelatihan Digital Pustaka	1 org	Agustus-September	Bogor
17.	Forum Teknis Kehumasan	3 org	Agustus	Bandung
18.	Diklat Fungsional Pranata Humas	1 org	Agustus-September	Kominfo
19.	Temu Teknis Fungsional Humas	10 org	September	Pustaka Bogor
20.	Temu Teknis Fungsional Pranata Humas	1 org	September	Jakarta
21.	Diklat Bendahara Keuangan	1 org	September	Jakarta
22.	Pelatihan Sertifikasi Barang/Jasa	2 org	September	Jakarta
23.	Apresiasi Arsiparis	1 org	Oktober	Yogyakarta
24.	Metodologi Penelitian	4 org	Oktober	Bogor
25.	Workshop Integrated Con. Farm	1 org	November	Tokyo, Jepang
26.	Management Dev. Program	1 org	November	Filipina
27.	Pelatihan Fungsional Pustakawan	1 org	November	Bogor
28.	Pelatihan Protokoler	2 org	November	Jakarta
29.	Management Dev. Program	1 org	November	Belanda

III. SARANA DAN PRASARANA

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai kegiatan utama PSEKP, maka perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang yang bergerak. Barang-barang yang tidak bergerak terdiri dari (1) Tanah Bangunan Negara Golongan II; (2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; (3) Bangunan Gedung Kantor Permanen; dan (4) Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen. Sementara, barang-barang bergerak secara umum meliputi alat angkutan (kendaraan roda 4 dan roda 2), *furniture*, elektronik, serta aset tetap lainnya. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari pembelian melalui Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dan anggaran hibah kerja sama penelitian. Untuk dapat menyajikan data barang inventaris yang akurat PSEKP telah melaksanakan SIMAK-BMN.

Pengelolaan inventaris kekayaan milik negara (IKMN) secara eksplisit menjadi tanggung jawab bagian tata usaha, tetapi secara moral merupakan tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan barang inventaris tersebut. Pada kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya disadari oleh berbagai pihak. Hal ini terbukti dari tingkat kepedulian dan rasa memiliki dari para karyawan yang masih relatif rendah. Hal ini merupakan salah satu kendala untuk dapat mengelola IKMN secara baik dan akurat. Oleh karena itu, ke depan dukungan dari semua karyawan diharapkan. Tabel 7 menunjukkan secara rinci daftar kondisi barang yang dimiliki PSEKP sampai dengan periode 31 Desember 2014.

3.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang-barang tidak bergerak yang dimiliki PSEKP meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki PSEKP adalah seluas 5.403 m² yang terdiri dari tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 1.558 m² terletak di Ciapus dan tanah bangunan kantor pemerintah seluas 3.845 m² terletak di Jalan A. Yani No. 70 Bogor. Sementara itu, bangunan yang dimiliki PSEKP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan yang saling terhubung seluas 5.231 m² dan empat buah rumah dinas seluas 240 m² yang secara keseluruhan berada dalam kondisi baik. Rincian barang tidak bergerak disajikan pada Tabel 7.

3.2. Barang-Barang Bergerak

Pada periode 2014, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSEKP adalah sebesar 2.072 unit, di mana sebanyak 1.1987 unit barang di antaranya

dalam kondisi baik, sementara 85 unit lainnya dalam kondisi rusak. Barang-barang bergerak tersebut meliputi sarana transportasi/kendaraan dinas, mesin dan peralatan kantor, sarana komunikasi, dan barang bergerak penunjang kegiatan kantor lainnya. Fasilitas penunjang kerja yang menonjol adalah internet 95 line dan komputer 112 unit.

3.2.1. Barang Inventaris Alat Angkutan

Pada tahun 2014 kendaraan roda empat yang dimiliki PSEKP terdiri dari 13 unit minibus (kapasitas penumpang < 14 orang) di mana sebanyak 12 unit dalam kondisi baik dan 1 unit dalam keadaan rusak. Selain itu, ada sebanyak 11 unit sepeda motor roda dua di mana sebanyak 10 unit dalam keadaan baik dan 1 unit dalam keadaan rusak.

3.2.2. Barang Inventaris Peralatan Kantor

Pada tahun anggaran 2014 keadaan barang inventaris peralatan kantor adalah sebanyak 1.780 unit, yang terdiri dari 62 jenis barang yang rusak dan 1.718 dengan kondisi baik. Sumber dana pengadaan barang inventaris tersebut berasal dari akumulasi pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya dan pengadaan anggaran tahun 2014.

Tabel 7. Daftar Kondisi Barang Inventaris PSEKP (per 31 Desember 2014)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
I. BARANG TIDAK BERGERAK					
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1 (1.558 m ²)	1	0	0
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 (3.845 m ²)	1	0	0
	Jumlah	2 (5.403 m ²)	2	0	0
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4 (5.231 m ²)	4	0	0
4.	Rumah Negara Gol. II, Tipe C dan D	4 (240 m ²)	4	0	0
	Jumlah	7 (3.506 m ²)	7	0	0
II. BARANG BERGERAK					
5.	Mini bus (penumpang 14 orang ke bawah)	13	12	1	0
6.	Sepeda motor	11	10	1	0
7.	Auto lift	1	1	0	0
8.	Tripod	3	3	0	0
9.	Tes generator	3	3	0	0
10.	Mesin ketik manual portable (11-13 inch)	7	7	0	0
11.	Mesin ketik manual (18-27 inch)	7	7	0	0
12.	Lemari besi/metal	81	81	0	0
13.	Lemari kayu	32	32	0	0
14.	Rak besi/metal	12	12	0	0
15.	Rak kayu	49	49	0	0
16.	Filing kabinet besi	140	140	0	0

Tabel 7. (Lanjutan)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
17.	Brankas	6	6	0	0
18.	Meja kerja kayu	213	208	5	0
19.	Meja komputer	7	7	0	0
20.	Kursi besi/metal	654	639	15	0
21.	Sice/sofa	21	21	0	0
22.	Meja rapat	47	45	2	0
23.	Jam elektronik	7	7	0	0
24.	AC split	81	79	3	0
25.	Televisi	6	6	0	0
26.	Video cassette	1	1	0	0
27.	Tape recorder	4	4	0	0
28.	Fingerprint	5	4	1	0
29.	Wireless transmision system	2	2	0	0
30.	Router	2	2	0	0
31.	Papan visual	1	1	0	0
32.	Power amplifier	1	1	0	0
33.	Amplifier	2	2	0	0
34.	Equalizer	1	1	0	0
35.	Loudspeaker	10	10	0	0
36.	Mic conference system	23	23	0	0
37.	Audio mixing	36	36	0	0
38.	UPS	6	5	1	0
39.	Tustel	1	1	0	0
40.	Camera digital	6	6	0	0
41.	Camera film	2	2	0	0
42.	Wireless speaker TOA	4	4	0	0
43.	Handycam	3	3	0	0
44.	Wireles speaker	4	4	0	0
45.	Blitzer	1	1	0	0
46.	Power supply	1	1	0	0
47.	Lensa kamera	4	4	0	0
48.	Layar film OHP	5	5	0	0
49.	Facsimile	5	5	0	0
50.	PC Unit (Desktop)	195	165	30	0
51.	Notebook/Laptop	61	58	3	0
52.	Printer Laser Jet/Deskjet/Dot Matrix	119	104	15	0
53.	Scanner	8	8	0	0
54.	Server	3	2	1	0
55.	Mesin jilid	1	1	0	0
56.	Mesin press	1	1	0	0
57.	LCD (infocus)	7	6	1	0
58.	PABX	1	1	0	0
59.	Handy talky (HT)	4	4	0	0
60.	Pesawat telpon extension	40	40	0	0
61.	External	59	59	0	0
62.	Mesin potong rumput	1	1	0	0
63.	Megaphone	1	1	0	0

Tabel 7. (Lanjutan)

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			B	R	RS
64.	Alat pemotong kertas	1	1	0	0
65.	Penangkal petir	1	1	0	0
66.	Vacuum cleaner	1	1	0	0
67.	Voice recorder	10	10	0	0
68.	CCTV	4	4	0	0
69.	Software	11	11	0	0
70.	Lemari es/kulkas	2	2	0	0
71.	Dispenser	1	1	0	0
72.	Diagnostik set	1	1	0	0
73.	Monitor CCTV LED 23	1	1	0	0
74.	Roll opek	3	3	0	0
75.	AC central	2	2	0	0
76.	Touch screen (Komputer lainnya)	2	2	0	0
Total		2.072	1.987	85	0

Keterangan: B = Baik; R = Rusak; RS = Rusak Sekali

3.3. Anggaran DIPA, PNBP, dan Kerja Sama Penelitian

Anggaran PSEKP pada tahun 2014 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu, variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni kegiatan utama mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan penunjang yang mencakup: (a) pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA 2014 adalah Rp35.892.613.000, yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp13.529.224.000; (2) Belanja Barang Rp11.173.234.000; dan (3) Belanja Modal Rp11.190.155.000. Pagu di atas sudah sesuai dengan revisi anggaran terakhir (revisi ke-03), yang termasuk dana Hibah Luar Negeri sebesar Rp650.000.000.

Revisi DIPA TA 2014 dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu: (1) revisi ke-01, tanggal 30 April 2014 karena penyesuaian alokasi anggaran; (2) revisi ke-02, tanggal 15 Juli 2014 karena penghematan anggaran; dan (3) revisi ke-03, tanggal 17 Desember 2014 karena dana Hibah Luar Negeri dimasukkan dalam DIPA TA 2014.

Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2014 per 31 Desember 2014 secara rinci berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10. Tabel 8 menunjukkan perkembangan pelaksanaan keuangan DIPA PSEKP berdasarkan target dan

realisasi keuangan dan fisik per jenis pengeluaran; Tabel 9 memperlihatkan realisasi anggaran berdasarkan pagu, target, realisasi bulan ini, dan realisasi bulan yang lalu per program kegiatan/output, sedangkan Tabel 10 menunjukkan realisasi anggaran per jenis pengeluaran.

Tampak bahwa realisasi capaian keuangan secara total mencapai 90,07 persen, terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai yang sudah direalisasikan, yakni Rp12.486.031.913 (92,29%) dan untuk belanja barang yang sudah direalisasikan adalah Rp9.761.487.223 (87,36%), sementara untuk belanja modal yang sudah direalisasikan adalah Rp10.080.312.850 (90,08%). Dengan demikian, sisa anggaran per 31 Desember 2014 adalah Rp3.564.781.014 (9,93%).

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2014 senilai Rp119.851.618 yang hanya diperoleh dari penerimaan umum, sedangkan dana Hibah Luar Negeri, PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 11). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangibile* dan ditujukan bagi *stakeholder*.

Tabel 8. Perkembangan Pelaksanaan Keuangan DIPA PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)

Variabel/Parameter Keuangan	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Anggaran		
		Rp	%	Rp	%	
A. Jenis Pengeluaran						
1. Belanja Pegawai	13.529.224.000	12.486.031.913	92,29	1.043.192.087	7,71	
2. Belanja Barang	11.173.234.000	9.761.487.223	87,36	1.411.746.777	12,64	
3. Belanja Modal	11.190.155.000	10.080.312.850	90,08	1.109.842.150	9,92	
4. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
5. Lainnya	-	-	-	-	-	
Total	35.892.613.000	32.327.831.986	90,07	3.564.781.014	9,93	
B. Per Kegiatan						
1. Kegiatan Utama Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.683.763.000	3.144.679.559	85,37	539.083.441	14,63	
2. Kegiatan Penunjang						
1. Pengelolaan Gaji	13.529.224.000	12.486.031.913	92,29	1.043.192.087	7,71	
2. Operasional Kantor	17.414.732.000	15.466.465.788	88,81	1.948.266.212	11,19	
3. Perawatan Gedung	686.574.000	674.417.600	98,23	12.156.400	1,77	
4. Perawatan Sarana	578.320.000	556.237.126	96,18	22.082.874	3,82	
Total	35.892.613.000	32.327.831.986	90,07	3.564.781.014	9,93	

Tabel 9. Realisasi Anggaran per Kegiatan PSEKP TA 2014 (per Desember 2014)

Kode	Program/Kegiatan Output	Pagu		Realisasi		Saldo	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1803	Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	35.892.613.000	90,07	32.327.831.986	90,07	3.564.781.014	9,93
1.803.002	Laporan Pengelolaan Satker	4.642.689.000	83,02	3.854.431.920	83,02	788.257.080	16,98
1.803.009	Rumusan Alternatif Kebijakan Sosek Pertanian	3.033.763.000	87,06	2.641.062.958	87,06	392.700.042	12,94
	008. Hibah	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	0	0,00
1.803.012	Pengadaan Buku	31.500.000	99,09	31.212.500	99,09	287.500	0,91
1.803.013	Data Base Sosial Ekonomi Pertanian	110.800.000	84,33	93.437.300	84,33	17.362.700	15,67
1803.994	Layanan Perkantoran						
	001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	13.529.224.000	92,29	12.486.031.913	92,29	1.043.192.087	7,71
	002. Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran	2.735.982.000	92,20	2.522.555.045	92,20	213.426.955	7,80
1803.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	407.011.000	92,67	377.170.000	92,67	29.841.000	7,33
1803.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	60.000.000	99,50	59.700.000	99,50	300.000	0,50
1803.998	Gedung / Bangunan	10.691.644.000	89,90	9.612.230.350	89,90	1.079.413.650	10,10

Tabel 10. Realisasi Anggaran per Jenis Pengeluaran PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)

Kode	Jenis Pengeluaran	Realisasi		Saldo Anggaran	
		Pagu (Rp)	%	Rp	%
51	Belanja Pegawai	13.529.224.000	92,29	1.043.192.087	7,71
52	Belanja Barang	11.173.234.000	77,88	1.411.746.777	12,6
53	Belanja Modal	11.190.155.000	90,08	1.117.642.150	9,99
	Jumlah	35.892.613.000	90,07	3.564.781.014	9,93

Tabel 11. Rekapitulasi PNBP PSEKP TA 2014 (per 31 Desember 2014)

No.	Kode MAK	Uraian	Perkiraan Target Penerimaan	Penerimaan	Penyetoran	Sisa Target Penerimaan	Target (%)
Penerimaan Umum							
1.	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.107.352	51.424.550	51.424.550	(45.317.198)	842,01
2.	423129	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Dihapuskan	-	-	-	-	-
3.	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	-	-
		Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek.	-	-	-	-	-
4.	423752	Pem.	-	-	-	-	-
5.	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	63.432.068	63.432.068	(63.432.068)	-
6.	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	-	-	-	-	-
7.	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Negara	-	4.995.000	4.995.000	(4.995.000)	-
		Jumlah Penerimaan Umum	6.107.352	119.851.618	119.851.618	(113.744.266)	1.962,42
Penerimaan Fungsional							
1.	423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	-	-	-	-	-
		Jumlah Penerimaan Fungsional	-	-	-	-	-
		Jumlah Penerimaan Umum + Fungsional	6.107.352	119.851.618	119.851.618	(113.744.266)	1.962

IV. PROGRAM

4.1. Tujuan dan Luaran Kegiatan

Tujuan umum kegiatan penyusunan program adalah untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih terencana dan sistematis agar pelaksanaan penelitian layak untuk dilaksanakan.

Secara rinci pelaksanaan kegiatan program bertujuan untuk:

1. Membuat perencanaan dan kalender kegiatan penelitian PSEKP;
2. Merencanakan penelitian tahun anggaran 2014; dan
3. Memperoleh implikasi tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang.

Luaran yang diharapkan:

1. Paket perencanaan dan kalender kegiatan penelitian PSEKP;
2. Program perencanaan penelitian tahun anggaran 2014; dan
3. Implikasi tindak lanjut pelaksanaan program yang akan datang.

4.2. Perencanaan Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2014

Tujuan perencanaan kegiatan penelitian adalah agar seluruh kegiatan PSEKP dapat terlaksana secara optimal sesuai jadwal yang telah direncanakan. Untuk memudahkan koordinasi pada tahap perencanaan, berdasarkan surat penugasan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 236/KP.340/1.7/02/2014 tanggal 25 Februari 2014, telah dibentuk Tim Teknis Penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Ketua Kelti, peneliti senior PSEKP, dan Staf Subbidang Program.

Susunan Tim Teknis Penyusunan Program Penelitian untuk tahun 2014:

Pengarah	: 1. Kepala Badan Litbang Pertanian 2. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Program dan Evaluasi PSEKP (merangkap anggota)
Ketua	: Dr. Sumaryanto (merangkap anggota)
Wakil Ketua	: Dr. Muchjidin Rachmat (merangkap anggota)
Sekretaris	: Kepala Subbidang Program PSEKP (merangkap anggota)

- Anggota : 1. Ketua Kelti Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis
2. Ketua Kelti Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional
3. Ketua Kelti Sosial Budaya dan Pedesaan
4. Prof. Dr. I Wayan Rusastra
5. Prof. Dr. Budiman F. Hutabarat
6. Prof. Dr. Dewa K.S. Swastika
7. Dr. Erwidodo
8. Dr. Hermanto, M.S.
9. Dr. Bambang Irawan
10. Dr. Saptana
- Staf Pelaksana : 1. Chaerudin, S.E. (Staf Subbidang Program)
2. Sri Suharyono, S.Sos. (Staf Subbidang Program)
3. Drs. Agus Abdul Syukur (Staf Subbidang Program)
4. Hasni Handoko (Staf Subbidang Program)
5. Nur Intan Syamsiah (Staf Subbidang Program)

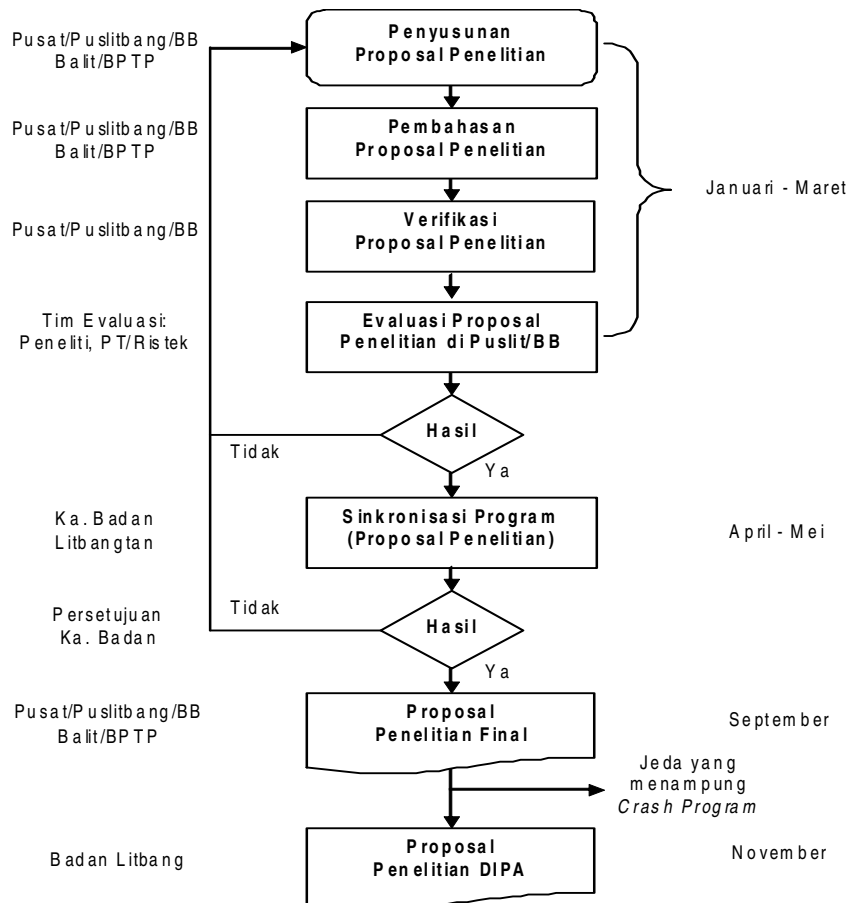
4.3. Mekanisme Perencanaan Penelitian Tahun Anggaran 2015 dan Pelaksanaan Tupoksi Subbidang Program

Dalam kaitan hierarki organisasi, perencanaan kegiatan di PSEKP berpedoman pada alur/tahapan perencanaan yang telah disusun oleh Bagian Perencanaan, Sekretariat Badan Litbang Pertanian yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44/Permentan/OT.140/8/ 2011. Dalam perencanaan tersebut diatur seluruh tahapan kegiatan perencanaan, mulai dari inisiasi masalah sampai penyerahan proposal penelitian ke Badan Litbang Pertanian. Tahapan kegiatan perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5, sedangkan dalam lingkup internal PSEKP tahapan umum kegiatan sampai tersusunnya proposal penelitian yang akan diajukan mengikuti Gambar 6.

Tahap pertama dari siklus proses perencanaan kegiatan penelitian dimulai dengan penjarangan topik-topik penelitian PSEKP oleh Tim Teknis Penelitian, yang disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) PSEKP dan Badan Litbang Pertanian, serta target-target utama Kementerian Pertanian. Dari topik-topik penelitian tersebut, Tim Teknis Penelitian PSEKP kemudian merumuskan Rencana Penelitian Tingkat Peneliti (RPTP) beserta kegiatan-kegiatannya. Tahap selanjutnya, Tim Teknis Penelitian bersama Bidang Program dan Evaluasi menugaskan peneliti untuk membuat TOR Kegiatan sesuai dengan judul-judul RPTP Kegiatan yang telah dirumuskan.

TOR yang terkumpul kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis Penelitian PSEKP. Tahap selanjutnya adalah penetapan penanggung jawab penyusunan proposal RPTP kegiatan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Proposal

yang masuk kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis Penelitian internal PSEKP. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada penanggung jawab proposal masing-masing untuk menjadi bahan perbaikan proposal tersebut.



Gambar 5. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Proposal yang telah diperbaiki kemudian dievaluasi oleh Tim Teknis internal PSEKP. Pada tahap ini, diberikan saran dan komentar untuk penyempurnaan proposal-proposal tersebut terhadap aspek-aspek: (a) perumusan masalah, review hasil penelitian sebelumnya, dan justifikasi penelitian; (b) perumusan tujuan dan keluaran; (c) kerangka pemikiran (landasan teoritis); (d) perencanaan sampling (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, responden); (e) analisis data dan jenis data untuk menjawab setiap tujuan penelitian; dan (f) perencanaan operasional (SDM, dana, dan lain-lain).

No.	Kegiatan	Pelaksana			Waktu	Output
		Kapus	Bid. PE	Stake Holder		
1	Kapus mengundang rapat tim teknis untuk menetapkan program dan kegiatan satu tahun yang akan datang dalam rangka menjabarkan program Kementerian dan Badan Litbang Pertanian				2 hari	Dokumen berupa judul-judul kegiatan pada masing-masing program yang sudah dicanangkan dalam renstra PSEKP
2	Bidang Program/Subbid Program mengkompilasi rencana program dan kegiatan. Kemudian dengan bahan tersebut melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder, untuk penajaman dan focusing program dan kegiatan				2 hari	Dokumen berupa isu-isu dan judul-judul kegiatan yang sesuai dengan program Dijalin Teknis (stakeholder)
3	Menyusun matrik program/kegiatan bersama dengan tim teknis				5 hari	Daftar matrik program /kegiatan yang sesuai dengan Format Litbang
4	Kapus dan atau Kabid serta Kasubbid melakukan pembahasan di Badan Litbang dalam rangka refocusing dan mendukung program Kementerian, program strategis Litbang				7 hari	Daftar matrik program /kegiatan berikut catatan dan arahan Kepala Badan Litbang
5	Penyusunan Proposal Ringkas (TOR) untuk setiap kegiatan penelitian dan manajemen				8 hari	Dokumen proposal sejumlah kegiatan penelitian dan manajemen
6	Review, evaluasi, dan arahan substansial dan metodologis dari tim teknis terhadap proposal yang sudah dibuat				5 hari	Dokumen hasil review dan arahan dari tim teknis tentang substansi dan metodologi
7	Rekap hasil review dan jika masih harus ada perbaikan dikembalikan kepada penyusun proposal; jika sudah benar dianggap selesai				2 hari	Dokumen matrik program/kegiatan, proposal yang sudah baik

Gambar 6. Mekanisme Perencanaan Kegiatan Penelitian Internal PSEKP

Seiring dengan tahap-tahap perencanaan kegiatan penelitian tersebut (TOR-RKAKL-Proposal), terjadi perubahan-perubahan dalam hal judul penelitian, kegiatan penelitian, penanggung jawab penelitian, lokasi penelitian maupun biaya/anggaran penelitian. Beberapa penyebab perubahan tersebut antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan tingkat Kementerian Pertanian; (2) penghematan anggaran akibat kebijakan nasional; dan (3) perubahan terkait administrasi kegiatan sehingga berdampak pada pelaksanaan rencana.

4.3.1. Judul–Judul Proposal Penelitian DIPA TA 2015

Berdasarkan hasil pembahasan tim teknis PSEKP, peneliti senior PSEKP, dan mempertimbangkan dukungan PSEKP terhadap program Kementerian Pertanian dan Badan Litbang Pertanian, serta ketersediaan sumber daya peneliti yang ada, maka pada TA 2015 PSEKP akan melakukan 12 kajian dan 10 analisis kebijakan. Judul-judul proposal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Judul–Judul Proposal Penelitian DIPA TA 2015

No.	Judul Proposal
1.	Pengaruh Urbanisasi terhadap Suksepsi Sistem Pengelolaan Usahatani dan Implikasinya terhadap Prospek Keberlanjutan Swasembada Pangan
2.	Kebijakan Peningkatan Produksi Padi pada Lahan Pertanian Bukan Sawah
3.	Kajian Kebijakan Pengembangan Bio Energi di Sektor Pertanian (Lanjutan)
4.	Kajian Pengembangan Industri Peternakan Mendukung Peningkatan Produksi Daging
5.	Sistem Komunikasi dalam Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
6.	Valuasi Ekonomi Sumberdaya Genetik Pertanian Indonesia: Studi Kasus Padi
7.	Kajian Kebijakan Akselerasi Pembangunan Pertanian Wilayah Tertinggal Melalui Peningkatan Kapasitas Petani
8.	Studi Penyusunan Strategi Pemberdayaan Petani Memperkuat Kedaulatan Pangan sebagai Implementasi UU No. 18 Tahun 2012
9.	Kajian Ketahanan Pangan Nasional dalam Perspektif Perdagangan Regional dan Global
10.	Dinamika Ekonomi Perdesaan dan Faktor yang Memengaruhinya pada Berbagai Agroekosistem 2007-2015
11.	Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
12.	Penguatan Kelembagaan Penangkar Benih untuk Mendukung Kemandirian Benih Padi dan Kedelai

4.4. Permasalahan yang Menonjol dalam Pelaksanaan Kegiatan di Subbidang Program pada Tahun 2014

Selama kurun waktu 2014, permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan di Subbidang Program adalah:

1. Sering terjadi perubahan kebijakan di tingkat atas, baik terkait waktu, alokasi anggaran, maupun substansi kajian. Kondisi tersebut menyebabkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan terkesan kurang terencana dengan baik dan mengganggu keseluruhan proses perencanaan. Banyak kasus dijumpai bahwa sebuah kegiatan harus didesain dalam waktu yang sangat singkat, sementara kegiatan tersebut memerlukan koordinasi dan informasi dengan bagian atau subbagian yang lain.
2. Sistem anggaran untuk membiayai kegiatan belum sepenuhnya kompatibel dengan kebutuhan riil yang diperlukan, sehingga menyulitkan pembiayaan kegiatan dan berakibat sebagian dana tidak terserap dengan baik.
3. Terlalu seringnya terjadi perubahan *software* dalam sistem penganggaran seringkali menyebabkan kekurangcermatan dalam perencanaan program.

4.5. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Subbidang Program tersebut adalah:

1. Dokumentasi arsip-arsip perencanaan program dan menyusun kalender kegiatan, serta perbaikan koordinasi kegiatan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan perubahan perencanaan yang bersifat segera/mendadak baik dengan Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Keuangan.
2. Peningkatan kemampuan staf baik terkait dengan operasionalisasi *software*, pemahaman dalam pembebanan mata anggaran, dan peraturan-peraturan administratif lainnya, serta selalu melakukan monitoring untuk *updating software* dan informasi lainnya.

V. SINOPSIS

5.1. Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015

Pasar tunggal akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada 2015 diperkirakan mampu menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh data, informasi, dan pengetahuan tentang kesiapan sektor pertanian dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN tahun 2015. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi produk pertanian strategis dan menganalisis kekuatan dan kelemahannya dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN; (b) memahami kondisi daya saing produk pertanian strategis dan infrastruktur pertanian dalam persiapan menghadapi pasar tunggal ASEAN; (c) mengetahui kesiapan negara-negara ASEAN lainnya menyongsong diberlakukannya komunitas ekonomi ASEAN; (d) mengidentifikasi berbagai jenis program dan kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan untuk menyiapkan produk pertanian strategis menghadapi pasar tunggal ASEAN. Lokasi kajian dipilih secara purposif di tingkat provinsi. Provinsi terpilih adalah wilayah yang memiliki potensi produk pertanian strategis yang berpeluang untuk memberikan nilai tambah, memiliki daya saing, dan dapat bersaing di pasar ekspor. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Bali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kurangnya pemahaman tentang dampak MEA 2015 dan pemberlakuan pasar tunggal ASEAN tahun 2015 diduga karena belum tersosialisasikannya MEA 2015 secara merata dan menyeluruh. Demikian juga dengan kalangan pelaku usaha yang masih belum banyak bergerak menyiapkan produk pertanian strategis menghadapi pasar terintegrasi ke depan. Lemahnya sosialisasi, rendahnya upaya meningkatkan daya saing produk, dan kurangnya dukungan teknologi/inovasi, pembiayaan, dan regulasi dipandang sebagai ketertinggalan yang perlu segera dibenahi dan dikembangkan jika Indonesia tidak menjadi sasaran pemasaran produk asing dalam pasar tunggal ASEAN 2015. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT diperoleh informasi bahwa komoditas strategis pertanian Indonesia masih menghadapi ancaman dan kelemahan secara internal untuk dapat menguatkan daya saing secara ekonomi.

Implikasi kebijakan dari kajian ini bahwa sebagian pelaku usaha memiliki peluang dan kekuatan untuk melakukan pengembangan secara agresif melalui kemampuan mempertahankan keunggulan komparatif dan kompetitif, kerja sama dalam pengolahan produk, peningkatan investasi, kapasitas produk, dan peluang pasar. Prioritas pengembangan kerja sama pemasaran antarpelaku usaha domestik dan internasional akan membuka peluang ekonomi yang baik khususnya di Pulau Jawa, sementara wilayah lain di luar Pulau Jawa perlu difokuskan pada kerja sama pemasaran antarpelaku usaha lokal. Strategi “bertahan” dan “menyerang” perlu diterapkan dalam menghadapi MEA 2015. Strategi ini menunjukkan bahwa produk pertanian berdaya saing terpilih mampu menguasai pasar di dalam negeri dan bersaing dengan produk sejenis, bahkan membuka peluang ekspor.

5.2. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman-Ternak

Daya tampung usaha ternak berbasis lahan untuk sumber pakan semakin terbatas. Pada sisi lain lahan tanaman perkebunan dan pangan yang berpotensi sebagai sumber pakan luasnya semakin meningkat. Integrasi usaha tanaman dan ternak merupakan solusi untuk meningkatkan populasi sapi. Masalahnya adalah usaha integrasi tanaman-ternak masih terbatas pada skala kecil dan lambat berkembang. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) menganalisis perkiraan potensi tambahan kapasitas tampung ternak dengan pengembangan integrasi tanaman-ternak, (2) mengidentifikasi potensi wilayah pengembangan baru usaha sapi potong berbasis sumber daya pakan lokal, (3) menganalisis kelayakan usaha pada berbagai pola Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman-Ternak, dan (4) mengidentifikasi kendala pengembangan berbagai pola Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman-Ternak. Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah mewakili usaha sawit-sapi, Provinsi Sumatera Selatan mewakili usaha padi-sapi, dan Provinsi Jawa Timur mewakili tebu-sapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potensi limbah tanaman dan industri pertanian mampu menampung 86,8 satuan ternak ruminansia; (2) berdasarkan potensi pakan, pusat-pusat pertumbuhan produksi sapi potong baru adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat; (3) secara finansial, usaha integrasi sawit-sapi lebih menguntungkan dibandingkan integrasi tebu-sapi dan padi-sapi, terutama yang dilakukan oleh peternak mandiri dan perusahaan swasta; (4) usaha integrasi tanaman-ternak lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas. Implikasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah: (1) meningkatkan pelaku usaha dan skala usaha menggunakan sapi ras lokal dan impor, (2) meningkatkan peran pemerintah dan swasta sebagai pemasok sapi bibit/indukan, (3) mengembangkan industri pakan komplit murah untuk

diperdagangkan antardaerah, (4) meningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi dan mengakses KUPS atau KKPE sebagai sumber modal peternak, dan (5) meningkatkan akses kelompok peternak untuk pengadaan bungkil inti sawit dan molases dari perusahaan swasta dan PTPN.

5.3. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pengembangan wilayah, dan pembangunan dari tahun ke tahun, kebutuhan akan pemenuhan energi listrik dan bahan bakar (BBM) secara nasional semakin besar. Selama ini kebutuhan energi di Indonesia dipenuhi oleh sumber daya tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara. Namun, tidak selamanya energi tersebut bisa mencukupi seluruh kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang panjang mengingat cadangan energi yang semakin lama semakin menipis dan juga proses produksinya yang membutuhkan waktu jutaan tahun.

Saat ini, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengembangkan penggunaan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar konvensional. Beberapa tanaman, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, tanaman jarak pagar, kemiri sunan, dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kebijakan pengembangan yang ada saat ini, memetakan potensi dan permasalahan pengembangan bioenergi, dan berbagai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan bioenergi.

Lokasi penelitian dipilih merupakan wilayah yang terdapat areal pertanaman kemiri sunan dan ubi kayu. Selain itu, untuk lokasi penelitian yang memiliki potensi pengembangan biogas dilakukan di wilayah yang terdapat populasi ternak sapi yang potensial dan terdapatnya program pengembangan biogas dari kotoran ternak sapi. Untuk lokasi penelitian sampel komoditas kemiri sunan adalah di Provinsi Jawa Barat, lokasi komoditas ubi kayu di Provinsi Jawa Tengah dan Lampung, dan lokasi pengembangan biogas di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Untuk mengimplementasikan pengembangan biodiesel, salah satu bahan baku nabati yang saat ini sedang dikembangkan adalah kemiri sunan. Pengembangan kemiri sunan dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam skala yang masih terbatas. Dukungan aspek hulu (budidaya), komitmen, dan koordinasi diperlukan dalam pengembangannya; (2) Pengembangan biogas telah berkembang di setiap wilayah seiring dengan tersebarnya potensi bahan baku dari kotoran ternak (terutama ternak sapi). Pengembangan *digester* dapat bersumber dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Ke depan diperlukan strategi

pengembangan biogas dengan bahan baku dari kotoran ternak sapi yang mencakup dukungan dan komitmen pengembangan, koordinasi lintas instansi/sektor, dukungan ketersediaan infrastruktur pengembangan dengan mudah dan murah, dan sinergi pengembangan biogas dengan kebijakan energi secara makro; (3) Pengembangan bioetanol berbahan baku ubi kayu masih terbatas pada perusahaan swasta. Terdapatnya persaingan bahan baku bioetanol (yaitu ubi kayu) dengan bahan baku pangan akan menyebabkan semakin terbatasnya ketersediaan ubi kayu. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan produksi ubi kayu baik melalui perluasan areal tanam maupun peningkatan produktivitas.

Kebijakan yang diperlukan meliputi: (a) kebijakan pengembangan bahan baku bioenergi kemiri sunan, (b) kebijakan pengembangan biogas berbahan baku kotoran ternak, dan (c) kebijakan pengembangan ubi kayu untuk penyediaan bahan baku bioetanol. Dasar pertimbangan pengembangan bahan baku nabati (kemiri sunan dan ubi kayu) serta biogas, yaitu agar kebijakan pengembangan bioenergi nasional dapat mencapai target nasional, yaitu penggunaan bioenergi sebesar 5 persen dari target penggunaan energi total.

Dalam rangka pengembangan kemiri sunan ke depan sebagai bahan baku bioenergi diperlukan strategi, yaitu: (a) perlunya memperkuat aspek hulu, yang meliputi: penyiapan bibit unggul, pembangunan kebun bibit unggul, penyediaan bibit untuk pengembangan dan penyediaan teknologi budidaya, dan (b) memperkuat komitmen dan koordinasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN), melalui peningkatan penyuluhan pertanian, dan pengembangan jaringan pemanfaatannya.

Dalam upaya mendorong produksi bioenergi dari kemiri sunan, pemerintah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut: (a) mengalokasikan sumber dana yang memadai untuk melakukan riset atau kajian, percobaan, dan penerapan dalam skala nasional; (b) penelitian/ percobaan mulai dari pengadaan bibit yang berkualitas, perbaikan varietas dan plasma nuftah, dan identifikasi potensi produktivitas; (c) mengidentifikasi potensi lahan yang tidak akan terjadi kompetisi penggunaan dengan tanaman pangan; dan (d) menerapkan kebijakan yang sudah ada, di mana pemerintah hendaknya memberikan insentif terhadap pengembangan bioenergi sebagai kompensasi subsidi yang berkurang.

Dalam rangka pengembangan biogas, diperlukan kebijakan antara lain: (a) pengembangan biogas pada skala rumah tangga secara terkoordinasi antarinstansi; (b) pengembangan biogas pada skala kelompok atau massal dengan atau tanpa menggunakan pipa pemasukan kotoran, tetapi dengan pengumpulan kotoran dengan menggunakan tangki dan pompa penyedot, sementara pada masing-masing kandang dibuat bak penampungan kotoran ternak; dan (c) pengembangan biogas skala wilayah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Sementara itu, upaya pengembangan biogas dengan

bahan baku dari kotoran ternak sapi memerlukan: (a) dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan biogas secara luas dengan bahan baku yang potensial mengingat usaha ternak cukup banyak tersebar di perdesaan Indonesia; (b) perencanaan secara baik pengembangan biogas, terutama saat awal pembentukan sentra kawasan ternak sapi nasional; (c) koordinasi secara baik antarinstansi dalam program bantuan *digester* biogas agar lebih terkoordinasi dan merata di berbagai daerah; (d) sinergi program pengembangan biogas dengan program pengembangan ternak (khususnya ternak sapi) nasional; (e) dukungan sarana serta infrastruktur peralatan (*digester* dan peralatan pendukungnya) yang relatif mudah ketersediaannya dan harganya terjangkau masyarakat; dan (f) sinergi antara pengembangan biogas dengan program pengalihan BBM ke LPG di tingkat rumah tangga.

Upaya pengembangan ubi kayu dalam mendukung penyediaan bioetanol dapat ditempuh melalui: (a) peningkatan produktivitas, (b) perluasan areal tanam, (c) pengamanan produksi dari serangan hama penyakit, dan (d) pengembangan kelembagaan dan pembiayaan. Peningkatan produktivitas ubi kayu dapat dilakukan karena masih terdapatnya senjang produktivitas antara potensi dan produktivitas di tingkat petani. Dalam rangka penyediaan ubi kayu segar sebagai bahan baku bioetanol juga dibutuhkan lahan yang cukup besar. Mengingat potensi lahan kering masih cukup luas untuk diusahakan ubi kayu, maka perluasan areal pertanaman dapat diarahkan pada areal baru. Pengembangan lahan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan areal PT Perhutani/Inhutani, lahan tidur/terlantar, dan lahan yang bersumber dari kemitraan dengan swasta/perusahaan. Dengan demikian, hal penting dalam pengembangan bioenergi adalah terdapatnya komitmen pemerintah dan sinergi antarinstansi dalam kebijakan atau program bioenergi. Komitmen pemerintah pusat perlu terus ditingkatkan dalam hal pembenahan subsidi BBM dan pembenahan sektor otomotif. Peningkatan suatu program dalam bingkai kebijakan bioenergi harus sesuai dengan kebijakan energi secara nasional.

5.4. Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian

Organisasi petani merupakan elemen penting dalam pembangunan pertanian, khususnya untuk tercapainya proses yang partisipatif. Dari sisi petani, secara teoritis, organisasi petani sesungguhnya lebih bermakna jika digunakan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan representatif politik. Namun, permasalahannya adalah berbagai organisasi-organisasi petani tersebut tidak berkembang sesuai harapan. Kebijakan tentang petani dan pengorganisasian petani akhir-akhir ini telah banyak berkembang terutama dengan keluarnya berbagai Undang-Undang baru. Kebijakan ini memberi batasan sekaligus peluang untuk pengorganisasian petani ke depan. Tujuan dari penelitian ini adalah

merumuskan strategi dan kebijakan sistem pengorganisasian petani yang efektif, utamanya petani kecil (*small farmer*), menuju kepada kemandirian petani dalam pembangunan pertanian. Tujuan ini diperoleh melalui tiga tujuan antara, yakni: (1) mengidentifikasi kebijakan dan tata kelola pengorganisasian petani (terutama petani kecil) di Indonesia, (2) mengidentifikasi kondisi, permasalahan, dan potensi pengorganisasian petani, dan (3) mengkaji dan menganalisis peran organisasi petani, khususnya petani kecil, sehingga dapat memenuhi fungsi-fungsi komunikasi, administrasi, pendidikan, ekonomi, serta sosial politik dalam pembangunan pertanian.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif di 5 kabupaten yang tersebar di 3 provinsi, yaitu: Kabupaten Majalengka dan Garut (Jawa Barat), Kabupaten Gresik dan Malang (Jawa Timur), dan Kabupaten Agam (Sumatera Barat). Narasumber penelitian adalah para aparat, petugas lapang, tokoh petani, pengurus dan anggota organisasi petani, serta buruh tani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan sistem pengorganisasian petani yang berjalan sampai saat ini masih bergantung sepenuhnya kepada pola dan pendekatan yang dirumuskan pemerintah sejak 5 dekade lalu. Meskipun terdapat peluang membentuk organisasi lain sebagaimana tercantum dalam UU No. 19 tahun 2013, namun Dinas Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan masih membatasi diri hanya pada Kelompok Tani dan Gapoktan. Dari menjalankan seluruh fungsi-fungsi agribisnis, peran organisasi petani sangat terbatas. Petani masih belum mengandalkan pada relasi kolektif, namun pada kemampuan sendiri dan relasi-relasi individual.

Dalam hal fungsi organisasi bagi petani, fungsi yang sudah berjalan baru sebatas untuk administrasi dan komunikasi (yakni KT dan Gapoktan). Untuk fungsi ekonomi masih terbatas, meskipun ada beberapa koperasi yang telah sanggup menjalankannya. Sementara, untuk fungsi partisipasi dan representasi politik organisasi yang mulai diperhitungkan baru sebatas KTNA, dan itupun masih menonjolkan ketokohan dibandingkan organisasinya.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah: (1) Pada kelima lokasi kabupaten, karena hampir seluruh petani tergolong sebagai usaha kecil, yakni di bawah 2 hektar per rumah tangga, bahkan banyak yang di bawah 0,5 hektar per rumah tangga; maka dapat dikatakan pengorganisasian petani yang dilakukan pemerintah sesungguhnya berkenaan dengan petani kecil (*small farmer*). Pengorganisasian petani seperti ini membutuhkan pendekatan yang berbeda, termasuk perlunya menerapkan indikator keberhasilan keorganisasian yang spesifik; (2) Dalam hal peran organisasi petani khususnya petani kecil, meskipun kesempatan telah agak terbuka, namun fungsi-fungsi yang sudah dipenuhi baru mencakup komunikasi, dan administrasi. Dengan kata lain, baru untuk relasi atas-ke bawah, yakni memenuhi kebutuhan pelaksana program. Fungsi ekonomi masih terbatas, kecuali untuk beberapa

koperasi; sedangkan fungsi advokasi politik baru sebatas peran tokoh-tokoh personal KTNA. Untuk penguatan posisi politik petani, terutama di level kabupaten, dibutuhkan organisasi representatif yang lain selain KTNA berupa berbagai asosiasi (misalnya asosiasi Gapoktan, asosiasi penyuluh swadaya, dan asosiasi koperasi wanita, asosiasi petani komoditas, dan lain-lain). Kesadaran bahwa petani boleh memasuki dunia politik, setidaknya secara formal dengan memasuki forum legislatif, telah mulai tumbuh; (3) Secara keseluruhan, pengembangan organisasi petani ke depan menghadapi banyak tantangan-tantangan baru yang selama ini belum dipahami. Dalam konteks ini, maka penyuluh mesti lebih mampu menjalankan fungsi pengembangan komunitas (*community-organizing role*), jangan hanya terperangkap pada urusan komoditas. PPL harus belajar prinsip-prinsip *community-organizing and group management skills* yang berkenaan dengan *conflict resolution, negotiation*, dan teknik-teknik *persuasive communication*. PPL jangan hanya paham masalah komoditas, namun lemah aspek sosial petaninya.

5.5. Kajian Kebijakan dan Implementasi Diseminasi Inovasi Pertanian

Saat ini permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian antara lain berupa kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan pengembangan inovasi yang dilakukan oleh para peneliti, kesenjangan antara inovasi hasil penelitian Litbang dan perguruan tinggi dengan aksesibilitas masyarakat pertanian, dan kesenjangan antara kebijakan pembangunan pertanian dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tantangan dalam penyampaian inovasi pertanian ke depan adalah bagaimana senantiasa mampu mengembangkan inovasi pertanian yang tepat guna, partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi berbagai kebijakan penelitian; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian; dan pelayanan dinas dalam diseminasi inovasi pertanian; (2) mengevaluasi implementasi diseminasi inovasi pertanian; dan (3) menganalisis keterkaitan penelitian; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian dalam implementasi diseminasi inovasi pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani. Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa (DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten) dan luar Jawa (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Analisis data dalam penelitian ini mencakup: (1) analisis deskriptif komparasi dan (2) analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Undang-Undang yang menjadi payung hukum diseminasi inovasi adalah UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kebijakan turunannya berupa Peraturan Bersama Menteri

Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta berbagai Peraturan Menteri Pertanian yang relevan dengan kebijakan dan diseminasi inovasi; (2) Penyampaian suatu inovasi teknologi berbasis *Cyber Extension* melalui *Spektrum Diseminasi Multi Channel* (SDMC) tidak lagi didominasi oleh penyuluh, tetapi juga pejabat, pemuka masyarakat, dan pemuka agama. Proses diseminasi program pemerintah yang berskala nasional dilakukan melalui sosialisasi program, diterbitkannya pedoman di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten; (3) Keterkaitan antara lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penyuluhan, dan Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Pertanian di tingkat pusat masih berorientasi pada program empat sukses yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

Sinergitas dan koordinasi antarlembaga tersebut masih belum terlihat keterpaduannya, masih berjalan masing-masing. Informasi dan teknologi yang dihasilkan lembaga penelitian tidak selalu diacu lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun lembaga penyuluhan. Di tingkat daerah, keterkaitan BPTP dengan Dinas Teknis juga dalam hal pelaksanaan program nasional. Di setiap kabupaten terdapat satu orang dari BPTP yang bertugas sebagai *Liaison Officer* (LO). LO berperan mengkomunikasikan berbagai program dengan Dinas, mendiseminasikan hasil kegiatan/program tersebut, dan mengidentifikasi kebutuhan di tingkat petugas Dinas, Bapeluh, serta ketua kelompok tani. Tata hubungan kerja antarkelembagaan teknis, penelitian dan pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program P2BN yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Pementan/OT.140/8/2011 perlu disertai Pedoman Teknis operasional di lapangan yang dilengkapi dengan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sehingga keterkaitan antarlembaga dapat berjalan baik dan sinergis.

Implikasi kebijakan penelitian ini sebagai berikut: (1) Inovasi pertanian yang dihasilkan lembaga penelitian pemerintah diharapkan sebagian besar dapat diterapkan petani, sehingga mampu mengungkit tingkat kesejahteraan petani; (2) Kondisi saat ini tingkat penerapan inovasi pertanian oleh petani masih relatif rendah, walaupun telah banyak inovasi pertanian yang dihasilkan lembaga penelitian; (3) Inovasi pertanian yang dihasilkan lembaga penelitian seharusnya tidak hanya bertumpu pada pengembangan ilmu pengetahuan saja, namun juga perlu mencermati kebutuhan petani sebagai pengguna akhir melalui kegiatan umpan balik antara peneliti-widyaiswara-penyuluh-petani; (4) Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan umpan balik akan mempercepat proses diseminasi inovasi pertanian, yang tentunya didukung oleh kebijakan pusat maupun daerah yang berpihak pada sektor pertanian; (5) Perlu ada kebijakan ataupun ketentuan yang mengikat dengan prestasi pimpinan daerah, seperti kinerja jabatan pimpinan daerah dapat menjadi media pemberian penghargaan (*reward*) ataupun sanksi (*punishment*), agar para pengelola pembangunan berorientasi dan memiliki

komitmen terhadap proses penguatan implementasi program dan hasil program. Tata hubungan kerja antarkelembagaan teknis, penelitian; dan (6) Pengembangan dan penyuluhan pertanian dalam mendukung program P2BN diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 45/Pementan/ OT.140/8/2011. Peraturan Menteri Pertanian tersebut perlu disertai Pedoman Teknis operasional di lapangan yang dilengkapi dengan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sehingga keterkaitan antarlembaga dapat berjalan baik dan sinergis.

5.6. Analisis Peran Modal Sosial dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Kawasan Perbatasan

Pembangunan di wilayah perbatasan perlu memanfaatkan semua sumber daya yang ada, termasuk modal sosial. Berbagai hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa modal sosial juga memiliki peran besar dalam pembangunan sosial maupun ekonomi. Tujuan umum penelitian adalah untuk menghasilkan rumusan alternatif kebijakan tentang peran modal sosial dalam mendukung pembangunan pertanian di kawasan perbatasan. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kawasan perbatasan, (2) menginventarisasi modal sosial, dan (3) menganalisis peran modal sosial dalam mendukung pembangunan pertanian di kawasan perbatasan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur, menurut rancangan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Minimnya infrastruktur di perbatasan membuat komunitas memiliki jarak yang jauh secara fisik maupun psikologis terhadap pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan (kesehatan, tingkat pendidikan) anggota komunitasnya. Sektor pertanian belum berkembang baik karena sulitnya akses terhadap pasar input dan output; (2) Modal sosial yang menonjol adalah yang bersumber dari tradisi, sifatnya mengikat ke dalam untuk kepentingan anggotanya. Organisasi modern yang diintroduksi dalam komunitas umumnya belum berkembang menjadi modal sosial yang menjembatani komunitas dengan pihak luar komunitas maupun pihak "atas desa". Bentuk-bentuk gotong-royong mulai tergerus pada kedua komunitas akibat pengaruh ekonomi uang. Gotong-royong yang masih bertahan adalah yang terkait adat. Tiga pilar yang menyangga kehidupan komunitas adalah pemerintahan, adat, dan agama/gereja. Pada komunitas di Kalbar hanya dua pilar pertama yang sudah kuat perannya, sedangkan pada komunitas di NTT ketiganya berfungsi dengan baik. Keberadaan pilar-pilar ini sekaligus menjadi jembatan bagi komunitas untuk terhubung dengan pihak luar komunitas; (3) Modal sosial yang berakar pada tradisi, berperan dalam menjaga

keseimbangan hubungan dalam lingkup komunitas karena sifatnya yang mengikat ke dalam. Di dalamnya juga tercakup sosialisasi dan regenerasi di bidang pertanian, walaupun sifatnya masih tradisional. Modal sosial yang tercipta dari hubungan yang lebih luas, memiliki potensi informasi yang luar biasa, yang membuka akses bagi komunitas untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan komunitas.

Implikasi kebijakan penelitian sebagai berikut: (1) Mengingat karakteristik wilayah perbatasan berbeda, seyogyanya pembangunan yang diimplementasikan juga berbeda (spesifik lokasi). Pembangunan pertanian harus tetap jadi prioritas mengingat sektor ini masih menjadi andalan bagi masing-masing komunitas di kawasan perbatasan; (2) Modal sosial yang dimiliki komunitas di perbatasan memiliki mekanisme untuk mendukung aktivitas di sektor pertanian. Oleh karenanya, pembangunan pertanian pada komunitas ini hendaknya bisa memanfaatkan modal sosial yang telah ada; dan (3) Pembangunan wilayah perbatasan akan membawa komunitas memasuki arus pembangunan yang pesat. Perlu ada pemahaman terhadap modal sosial yang mereka miliki, memperkuatnya, mendukung pemeliharannya, dan memanfaatkan agar kemajuan dapat dicapai dan keseimbangan dalam komunitas tetap tercipta.

5.7. Pencapaian Target MDGs dan Implikasinya pada SDGs

Sasaran Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* – MDGs) akan berakhir tahun 2015 dan akan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai kelanjutan MDGs, agenda pokok SDGs adalah merampungkan pencapaian target MDGs yang tersisa, meningkatkan kualitas pencapaian target yang telah ada; dan terkait dengan mandat Rio+20 akan meningkatkan bobot perhatian pada aspek sosial dan lingkungan hidup. Strategi pencapaian SDGs akan berbasis pendekatan partisipatif pada proses perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat *bottom-up*.

Pada dasarnya delapan sasaran Pembangunan Milenium MDGs saling terkait sehingga strategi pencapaiannya membutuhkan pendekatan multidisiplin dan lintas sektor secara sistematis dan konsisten. Semua sektor berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung. Nilai yang dianut sebagian besar masyarakat dalam peradaban modern tampaknya makin diwarnai oleh dominasi dimensi ekonomi. Terkait dengan itu, sasaran nomor 1 MDGs yaitu eradikasi kemiskinan dan kelaparan seringkali dipandang sebagai episentrum sasaran MDGs.

Sektor pertanian adalah penghasil pangan, dan sementara itu aktor utama pertanian adalah petani serta buruh tani yang hampir semuanya tinggal di perdesaan. Jumlahnya sangat besar dan secara umum tingkat kesejahteraannya tertinggal dari kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena

itu, meskipun kontribusi relatif sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) semakin rendah, peran sektor ini tetap sangat strategis, baik dalam pencapaian MDGs maupun SDGs.

Sampai saat ini data dan informasi dari hasil penelitian/kajian empiris yang mencerminkan kinerja/kontribusi sektor pertanian dalam pencapaian target MDGs belum tersedia. Setidaknya jawaban atas sejumlah pertanyaan berikut belum tersedia. *Pertama*, penurunan jumlah petani miskin dan perbandingannya dengan penduduk perdesaan pada umumnya, serta variasinya antaragroekosistem. *Kedua*, hubungan antara pertumbuhan sektor pertanian wilayah dengan penurunan jumlah petani miskin. *Ketiga*, hubungan antara status perkembangan perekonomian desa dengan distribusi pendapatan. *Keempat*, implikasinya terhadap strategi yang harus ditempuh dalam pencapaian SDGs. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan pembangunan ekonomi, proporsi penduduk miskin makin berkurang. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang tersedia, laju penurunan proporsi penduduk miskin di perdesaan lebih lambat daripada di wilayah perkotaan. Sesuai dengan mandatnya, kontribusi utama sektor pertanian dalam pencapaian target MDGs adalah pada pengurangan kemiskinan dan eradikasi kelaparan yang secara umum dipandang sebagai episentrum sasaran MDGs. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran sektor pertanian dalam penyediaan pangan tak mungkin tergantikan sektor lain dan pembangunan sektor pertanian berkontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan petani, namun kontribusinya dalam pengurangan jumlah penduduk miskin relatif kecil. Hal ini terkait dengan penguasaan aset produktif rumah tangga tani yang umumnya sangat rendah, sementara itu penyediaan lapangan kerja nonpertanian di perdesaan sangat terbatas.

Secara umum tingkat kesejahteraan rumah tangga bervariasi antarwilayah maupun tipe agroekosistem. Tingkat kesejahteraan di perdesaan di Pulau Jawa masih lebih baik daripada rumah tangga perdesaan di luar Pulau Jawa. Menurut tipe agroekosistemnya, kondisi kesejahteraan di perdesaan lahan kering berbasis tanaman pangan/sayuran ternyata lebih baik daripada di perdesaan agroekosistem sawah maupun agroekosistem perkebunan.

Upaya percepatan penurunan proporsi penduduk miskin ditempuh melalui beberapa cara berikut secara simultan: (i) perluasan kesempatan kerja di perdesaan, dan (ii) perbaikan harga yang diterima petani, dan (iii) peningkatan akses petani terhadap aset produktif. Untuk jangka menengah - panjang, perluasan lahan pertanian secara besar-besaran yang dibarengi pula dengan dorongan untuk terjadinya rasionalisasi pemilikan/penguasaan lahan usahatani sangat diperlukan.

5.8. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura

Dalam beberapa tahun terakhir impor produk hortikultura cenderung meningkat. Salah satu alasan dari peningkatan impor tersebut adalah untuk menutup kekurangan dari kebutuhan dalam negeri. Peningkatan impor produk hortikultura secara langsung dan tidak langsung memengaruhi agribisnis hortikultura domestik. Masuknya produk hortikultura impor dapat mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari impor produk hortikultura, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Rekomendasi Impor Hortikultura. Untuk memberi masukan dalam penerapan kebijakan pengendalian impor tersebut dilakukan kajian dengan mengambil contoh komoditas bawang merah, cabe, pisang, jeruk, durian, dan apel.

Hasil kajian menunjukkan pascapenerapan kebijakan impor hortikultura terjadi peningkatan ketersediaan komoditas bawang merah, cabe, dan pisang, sedangkan untuk komoditas durian, jeruk, dan apel mengalami penurunan. Kebijakan pengendalian impor telah berhasil menurunkan jumlah impor di hampir semua komoditas sehingga peningkatan atau penurunan ketersediaan komoditas tersebut (kecuali apel) disebabkan oleh peningkatan atau penurunan produksi dalam negeri. Penurunan ketersediaan apel dalam negeri disebabkan adanya penurunan impor yang besar yang tidak mampu diimbangi oleh peningkatan produksi dalam negeri. Namun demikian, dengan penurunan impor diharapkan dapat diikuti oleh peningkatan produksi dalam negeri sehingga kemandirian produksi dalam negeri dalam penyediaan produk menjadi meningkat.

Penerbitan RIPH perlu disesuaikan dengan situasi produksi masing-masing komoditas, dan tidak dilakukan dalam jangka waktu setiap enam bulan sekali. Pada bawang merah dan cabe yang mempunyai siklus produksi musiman maka waktu penerbitan RIPH dan realisasi impor harus tidak lebih dari satu bulan. Pada komoditas buah-buahan, pengendalian impor dilakukan melalui penerbitan RIPH namun dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan. Kebijakan pengendalian impor bawang merah dan cabe melalui harga referensi dinilai masih tepat, dan akan lebih baik apabila diikuti oleh kebijakan penerapan tarif impor terutama untuk bawang merah. Pada buah, penerbitan RIPH dan waktu kedatangan impor dilakukan pada saat prediksi penyediaan mengalami defisit, yaitu untuk jeruk pada bulan Oktober-Desember; pisang pada bulan Juni sampai Agustus; durian pada bulan Mei sampai Juli; dan apel pada bulan April dan Mei. Di samping itu, kebijakan pengendalian impor buah juga dapat dipadukan dengan penerapan tarif, terutama pada jeruk.

Kebijakan pengaturan pintu masuk impor melalui pelabuhan tertentu perlu dievaluasi berkaitan dengan posisi pelabuhan impor tersebut di wilayah sentra produksi. Sebaiknya pintu masuk pelabuhan impor berada di luar

wilayah sentra produksi pertanian (hortikultura). Kebijakan MRA (*Mutual Recognition Agreement*) dengan negara-negara tertentu dengan memberikan hak istimewa untuk akses kepada pelabuhan tertentu (Tanjung Priok) perlu ditinjau ulang karena bersifat diskriminatif dan merugikan petani domestik. Unsur penting yang perlu mendapat perhatian dalam mengatasi impor adalah: (1) peningkatan produksi bermutu dalam negeri, (2) perbaikan sistem tataniaga/distribusi, dan (3) perbaikan sistem logistik. Untuk menghasilkan produksi hortikultura bermutu, maka pengembangan hortikultura perlu dilakukan melalui penerapan Manajemen Rantai Pasokan (*Supply Chain Management-SCM*), yang memungkinkan terkontrolnya kegiatan pada setiap subsistem, mulai dari penyediaan sarana produksi, produksi, penanganan pascapanen, sistem logistik, penyimpanan, dan pengolahan, sampai pemasaran ke konsumen. Dengan pola ini dimungkinkan diterapkannya GAP (*Good Agricultural Practices*), GHP (*Good Handling Practices*), GMP (*Good Manufacture Practices*), dan GTP (*Good Trading Practices*). Produksi komoditas hortikultura umumnya bersifat musiman, di mana pada masa panen hasil produksi melimpah, namun setelah itu tidak ada produksi. Untuk memaksimalkan nilai guna dari produksi yang melimpah, sudah saatnya dibangun sistem logistik berupa sistem pergudangan yang memungkinkan dapat disimpannya hasil produksi pada saat panen raya dan dimanfaatkan secara terus menerus. Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) perlu dikembangkan lebih serius untuk produk hortikultura. Untuk mendukung perumusan kebijakan yang baik, perlu didukung oleh ketersediaan data. Dalam kaitan itu langkah perbaikan penyediaan data yang akurat mutlak diperlukan. Ketersediaan data produksi dan konsumsi secara rinci per bulan dan per daerah akan mempermudah perumusan kebijakan pengendalian impor secara lebih akurat.

5.9 Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data PATANAS

Dalam rangka memantau dan mengevaluasi dinamika sosial ekonomi rumah tangga tani dan perdesaan PSEKP telah melakukan penelitian PATANAS (Panel Petani Nasional). PATANAS merupakan penelitian yang bersifat panel di mana data sosial ekonomi rumah tangga tani dikumpulkan dari rumah tangga contoh dan desa contoh yang sama. Metoda pengumpulan data dan pengukuran variabel sosial ekonomi yang dianalisis dilakukan dengan cara yang sama pula. Pengumpulan data sosial ekonomi rumah tangga tersebut dilakukan pada empat tipe desa yaitu: desa sawah berbasis padi, desa lahan kering berbasis sayuran, desa lahan kering berbasis palawija, dan desa lahan kering berbasis tanaman perkebunan. Secara total terdapat 34 desa contoh PATANAS yang tersebar di 8 provinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sumut, Sulsel, Jambi, dan Kalbar) yang melibatkan 1.238 rumah tangga contoh. Pengumpulan data rumah tangga tersebut dilakukan setiap tahun selama

tahun 2007-2012, sehingga dapat dilakukan analisis perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada tingkat rumah tangga tani dengan tipe desa yang berbeda selama periode tersebut.

Penelitian secara umum bertujuan menganalisis dinamika sosial ekonomi pertanian yang dibedakan atas analisis makro pada lingkup nasional dan analisis mikro pada lingkup rumah tangga tani. Secara rinci tujuan penelitian meliputi: *Pertama*, lingkup makro, yaitu menganalisis dinamika sosial ekonomi sektor pertanian pada lingkup nasional selama sepuluh tahun terakhir yang meliputi: ketersediaan lahan pertanian, produksi dan produktivitas pertanian, PDB pertanian, penyerapan dan produktivitas tenaga kerja pertanian, konsumsi pangan dan kecukupan konsumsi kalori, kemiskinan penduduk, dan nilai tukar komoditas pertanian; *Kedua*, lingkup mikro, yaitu (1) menganalisis dinamika sosial ekonomi rumah tangga tani menurut tipe desa sebagai berikut: (a) menganalisis dinamika struktur dan distribusi penguasaan lahan rumah tangga; (b) menganalisis dinamika adopsi teknologi pertanian, produktivitas dan profitabilitas usahatani; (c) menganalisis dinamika pendapatan, struktur pendapatan, dan distribusi pendapatan rumah tangga; (d) menganalisis dinamika struktur tenaga kerja, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan migrasi tenaga kerja; (e) menganalisis dinamika struktur pengeluaran dan konsumsi rumah tangga, kecukupan kalori, dan pola pangan harapan rumah tangga; (f) menganalisis dinamika insiden kemiskinan; dan (g) menganalisis dinamika nilai tukar petani; dan (2) menganalisis kelembagaan agribisnis menurut tipe desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak 26,13 juta rumah tangga, di mana sekitar 13,43 juta (51%) rumah tangga tersebut terdapat di Pulau Jawa. Dalam dua puluh tahun terakhir antara tahun 1993 dan 2012 luas lahan pertanian cenderung naik sebesar 0,51 persen per tahun. Peningkatan luas lahan pertanian terutama disebabkan oleh meningkatnya luas lahan pertanian bukan sawah atau lahan kering sebesar 0,84 persen per tahun, sedangkan luas lahan sawah cenderung turun 0,24 persen per tahun. Laju penyusutan luas lahan sawah tersebut mengalami peningkatan dari sekitar 89 ribu hektar pada periode 1993-2003 menjadi sekitar 316 ribu hektar periode 2003-2012. Hal ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan nasional semakin dihadapkan pada masalah ketersediaan lahan yang potensial yang semakin terbatas untuk pengembangan tanaman padi dan tanaman pangan lainnya.

Rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga pertanian pada tahun 2013 diperkirakan sekitar 0,858 hektar per rumah tangga, yang terdiri atas lahan sawah seluas 0,199 hektar dan lahan pertanian bukan sawah seluas 0,659 hektar. Rata-rata penguasaan lahan pertanian di Pulau Jawa relatif kecil (0,374 hektar per rumah tangga) akibat tekanan penduduk yang relatif tinggi. Sekitar 51 persen rumah tangga pertanian terdapat di Pulau Jawa, sedangkan luas lahan pertanian yang tersedia hanya sekitar 21 persen.

Sementara, hasil Sensus Pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian penggunaan lahan sekitar 25,75 juta rumah tangga, di mana sekitar 55,3 persen merupakan rumah tangga petani gurem atau luas penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,50 hektar. Proporsi rumah tangga pertanian gurem paling besar di Pulau Jawa (76,4% rumah tangga), di samping Kepulauan Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua, di mana memiliki proporsi rumah tangga pertanian gurem lebih dari 50 persen rumah tangga.

Antara tahun 2003 dan 2013 jumlah rumah tangga usaha pertanian berkurang sekitar 5,01 juta rumah tangga, sedangkan rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga pertanian naik seluas 0,507 hektar (144%). Peningkatan luas penguasaan lahan rumah tangga pertanian disebabkan oleh peningkatan luas penguasaan lahan sawah seluas 0,098 hektar (97%) dan peningkatan luas penguasaan lahan pertanian bukan sawah seluas 0,409 hektar (164%). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hasil analisis perubahan antartahun tersebut belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena dua hal yaitu: (1) konsep rumah tangga pertanian yang digunakan pada Sensus Pertanian tahun 2013 berbeda dengan Sensus Pertanian 2003, dan (2) data jumlah rumah tangga pertanian tahun 2003 yang digunakan pada analisis perubahan antarsensus dalam Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 tidak konsisten dengan data jumlah rumah tangga pertanian tahun 2003 yang diterbitkan dalam Laporan Hasil Sensus Pertanian 2003.

Selama periode 2004-2014 nilai PDB nasional mengalami kenaikan, baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan tahun 2000. Dampak dari krisis perekonomian global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap perekonomian nasional tidak terjadi secara berkepanjangan, dan pada tahun 2010 kondisi perekonomian nasional sudah kembali pulih. Sektor Pertanian dalam arti luas masih memegang peran strategis dalam menciptakan pendapatan bagi perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar 14 persen dari total PDB dan selama periode tahun 2004-2013 PDB mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara itu, sumbangan sektor Pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB mengalami penurunan selama periode yang sama, di mana kondisi ini mengindikasikan bahwa sudah terjadi proses transformasi perekonomian nasional, dari yang didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor pertanian, bergeser ke arah dominasi sektor lainnya.

Secara nasional selama periode 2007-2013 terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rasio Gini. Lima provinsi dengan rasio Gini terendah berturut-turut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, Jambi, dan Sulawesi Barat, sedangkan lima provinsi dengan rasio Gini tertinggi berturut-turut adalah Papua Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Papua.

Kontribusi wilayah Jawa terhadap total PDRB nasional menempati peringkat pertama, disusul berturut-turut oleh wilayah Sumatera dan wilayah Kalimantan. Secara umum, peran sektor pertanian pada pembentukan PDRB semakin berkurang (pangsa sektor pertanian turun), namun di beberapa provinsi ditemukan pangsa sektor pertanian yang ternyata meningkat. Di sebagian provinsi, kontribusi dan sumber pertumbuhan sektor pertanian didominasi oleh subsektor tanaman pangan, tetapi di sebagian yang lain kontribusi dominan sektor pertanian berasal dari subsektor peternakan dan perkebunan.

Selama kurun waktu 1999-2013 terjadi perubahan proporsi jenis pengeluaran dan pola konsumsi pangan. Proporsi pengeluaran pangan dominan yang semula berasal kelompok padi-padian berubah ke arah pengeluaran makanan/minuman jadi. Tingkat konsumsi energi masyarakat masih di bawah dari yang dianjurkan oleh WNPG. Terkait dengan kualitas/diversifikasi pangan, skor PPH cenderung meningkat, namun belum memenuhi target/harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat konsumsi beras cenderung menurun, namun konsumsi ikan dan telur cenderung meningkat. Kondisi pola konsumsi energi di desa PATANAS umumnya masih di bawah tingkat kecukupan, dan gambaran ini merupakan cerminan yang sama dengan kondisi tingkat nasional.

Selama kurun waktu 2007-2011, agregat nasional tenaga kerja pertanian menurun. Penurunan tersebut terjadi di subsektor tanaman pangan, sedangkan jumlah tenaga kerja di subsektor lainnya meningkat. Menurunnya jumlah dan persentase tenaga kerja di subsektor tanaman pangan diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja subsektor tersebut yang lebih besar dibandingkan subsektor lainnya. Berbeda dengan kondisi di tingkat mikro di desa PATANAS di mana umumnya produktivitas tenaga kerja di berbagai subsektor meningkat.

Selama kurun waktu 2003-2013 secara relatif persentase penduduk miskin di Indonesia menurun dengan laju 4,05 persen per tahun. Persentase laju penurunan penduduk miskin di kota lebih besar dibanding di desa. Masih terdapat disparitas jumlah dan persentase penduduk miskin antarprovinsi di Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Analisis kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan menunjukkan penurunan selama periode 2003-2013, rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Di tingkat mikro, data PATANAS menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni semakin membaiknya kondisi masyarakat perdesaan dilihat dari indikator kemiskinan (P_0 , P_1 , dan P_2).

Pada periode 2003-2013 NTP Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,29 persen per tahun. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan petani menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. NTP rata-rata tahun 2010-2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 106,52,

diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat (105,72), subsektor peternakan (102,49), dan NTP terendah pada subsektor tanaman pangan (100,39). Sementara itu, selama kurun waktu 2003-2013, indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani mengalami peningkatan dengan laju sedikit lebih besar pada indeks harga yang diterima petani.

Implikasi kebijakan dari penelitian adalah: (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, utamanya di wilayah perdesaan, perlu adanya reorientasi kebijakan/program pemerintah dengan penekanan pada pembangunan sektor pertanian dan perdesaan agar mampu menghasilkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh petani. Pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga diharapkan mampu mengerem laju urbanisasi dan mengurangi jumlah penduduk miskin, sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemantapan ketahanan pangan nasional; (2) Dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan, perlu adanya upaya khusus untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dan pangan lokal melalui pengembangan industri pengolahan dan promosi pangan lokal yang mempunyai nilai gizi dan nilai guna yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dukungan pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat menghasilkan berbagai produk olahan pangan dengan bahan baku umbi-umbian dan pangan lokal lainnya; (3) Umumnya tingkat konsumsi energi rata-rata rumah tangga di desa PATANAS masih di bawah rata-rata, sehingga perlu untuk memberdayakan masyarakat perdesaan agar meningkatkan konsumsi energi dengan makin banyak mengkonsumsi pangan lokal, seperti umbi-umbian. Selain untuk meningkatkan konsumsi energi, secara sinergi juga untuk memperbaiki kualitas konsumsi pangan; dan (4) Kebijakan pengentasan kemiskinan seyogyanya tidak hanya memperkecil jumlah penduduk miskin, tetapi juga sekaligus harus dapat mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan sebaiknya lebih banyak dalam aspek pemberdayaan rumah tangga dan lebih banyak diarahkan ke wilayah yang kondisi penduduk miskin relatif lebih parah.

5.10. Outlook Pertanian 2015 – 2019

Kajian Outlook Pertanian 2015-2019 perlu dilakukan dalam rangka membantu para pengambil kebijakan merumuskan kebijakan, program, dan target-target pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian ke depan. Kajian secara umum bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan sektor pertanian lima tahun ke depan. Secara khusus, tujuan dari kajian adalah (1) menyusun dan menganalisis Outlook Pertanian 2015-2019, dan (2) merumuskan alternatif strategi kebijakan dan program-program untuk mencapai keberhasilan target-target pembangunan pertanian periode 2015-2019. Kajian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Kajian menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data dan informasi terdiri dari kajian literatur, *internet browsing*, survei, dan wawancara mendalam, serta berinteraksi dengan ahli (*expert acquisition*). Metode kuantitatif yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama penelitian yaitu *Multimarket Model Analysis* dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak *General Algebraic Modelling System* (GAMS), dengan analisis pendukung untuk memperoleh parameter analisis yang terdiri dari perhitungan neraca bahan makanan 2011 hingga 2013, Analisis *Linear Approximation Almost Ideal Demand System* (LA/AIDS), *Supply-Demand Analysis* dengan pendekatan *Multivariate Time Series* dengan model *Structured Vector Auto Regressive* (SVAR) analisis. Analisis pendukung yang juga merupakan pendekatan dengan titik berat pada aspek kualitatif dan menjawab tujuan kedua penelitian adalah analisis kinerja pembangunan pertanian 2004-2014, rancangan strategi kebijakan, dan program pembangunan pertanian ke depan. Komoditas yang menjadi fokus perhatian dalam analisis adalah tujuh komoditas strategis Kementerian Pertanian yang meliputi: padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe, tebu, dan sapi potong.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan internasional dan domestik, serta memperhatikan hasil analisis outlook pertanian 2015-2019 dan kinerja pembangunan pertanian periode 2004-2014, perlu dilakukan perubahan pendekatan pembangunan pertanian pada periode ke depan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan dari sisi perencanaan, implementasi pembangunan, dan pendekatan pembangunan menjadi penyebab kinerja pembangunan pertanian semakin menurun. Belajar dari pengalaman masa lalu di mana pendekatan kawasan pertanian dinilai tepat dan lebih sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas pertanian, merupakan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian, serta peningkatan daya saing pertanian.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan perubahan pendekatan strategi kebijakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 dengan: (1) fokus komoditas dan lokasi, sehingga prioritas diperlukan; (2) peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui penetapan program yang relatif lebih ramping dan sedikit serta pengurangan satuan kerja; (3) meningkatkan daya saing dengan fokus utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aksesibilitas sumber daya serta proteksi terhadap ancaman baik dari dalam dan luar negeri; (4) menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru untuk produksi pertanian dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan perluasan areal; (5) mengubah bentuk pendanaan bantuan sosial kepada pendanaan bagi aspek-aspek yang tidak mampu dilakukan oleh swasta dan masyarakat; dan (6) mengubah pendekatan yang mampu mengatasi berbagai kelemahan sisi perencanaan, implementasi pembangunan dan pendekatan pembangunan.

Implikasi kebijakan dari kajian sebagai berikut: (1) Dalam upaya mengantisipasi kondisi perubahan iklim di mana dunia akan mengalami krisis pangan, sehingga harga pangan dan produk pertanian dunia akan meningkat, maka peningkatan produksi dalam negeri yang dilakukan dengan segenap kemampuan adalah jalan terbaik; (2) Perlu antisipasi terhadap kecenderungan peningkatan investasi negara-negara maju melalui perusahaan-perusahaan multinasional pada negara-negara berkembang yang masih memiliki lahan yang luas, melalui upaya perlindungan terhadap petani kecil dan upaya perluasan areal ke luar Jawa dengan pola peruntukan bagi peningkatan penguasaan lahan dengan segala infrastrukturnya perlu dilakukan; (3) Pengembangan sistem pertanian yang ramah lingkungan, berdimensi kewilayahan, fokus komoditas dan lokasi akibat perubahan iklim global, dilakukan secara bertahap dalam jangka menengah dan panjang karena mengandung unsur antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. Strategi kebijakan dengan pendekatan kawasan penting untuk dilakukan dengan segera sesuai dengan arahan tata ruang wilayah; (4) Pada tahun 2015-2019 Indonesia berada di bawah ancaman implementasi perjanjian perdagangan dan investasi bebas. Implementasi ini tidak hanya menyangkut sistem perdagangan dan investasi yang terbuka, namun juga terkait masalah-masalah lainnya seperti ketenagakerjaan, politik pemerintahan, dan jasa-jasa serta keterbukaan informasi, maka sektor pertanian harus diperlakukan sebagai *as not as usual business*; (5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangunan pertanian ke depan membutuhkan pengurangan jumlah dan jenis program, jumlah satker dan perlu difokuskan pada wilayah-wilayah yang mampu mengungkit pertumbuhan dan mencapai target dan sasaran pertanian; (6) Pendekatan kawasan dinilai menjadi pendekatan yang tepat dan diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan sisi perencanaan, implementasi pembangunan dan pendekatan pembangunan menjadi penyebab kinerja pembangunan pertanian semakin menurun. Pendekatan kawasan pertanian dinilai tepat dan lebih sesuai dengan sifat dan karakteristik komoditas pertanian, merupakan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian, serta peningkatan daya saing pertanian; (7) Berdasarkan pendekatan kawasan, sistem perencanaan pembangunan pertanian perlu dirumuskan dalam jangka panjang dan selanjutnya diterjemahkan dalam jangka menengah dan selanjutnya dioperasionalkan dalam jangka pendek. Di samping itu, sistem perencanaan dan operasional pembangunan pertanian perlu direncanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai keberhasilannya; (8) Organisasi yang bertanggung jawab mulai dari pusat hingga lokasi perlu dibentuk agar arah utama kebijakan pengembangan kawasan dan proses pengembangannya sejalan dengan tujuannya. Organisasi tersebut seyogyanya bersifat permanen, merupakan gerakan massal dan dipimpin langsung oleh Presiden dengan penanggung jawab operasional adalah Menteri Pertanian. Dengan demikian, implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan dapat dilaksanakan secara utuh, sistematis, terintegrasi atau terpadu, terkoordinasi,

dan terkelola dengan baik. Selain mobilisasi sumber daya secara besar-besaran dan fokus, partisipasi aktif para pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga unit terkecil pemerintahan atau desa sangat diperlukan; (9) Berkaitan dengan pembentukan organisasi pelaksana pengembangan kawasan pertanian, masalah paling mendasar adalah sulitnya melakukan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan (*stakeholders*) harus tercakup. Dengan demikian, setiap anggota harus memahami dampaknya dan berusaha sekuat tenaga menghindari kebuntuan koordinasi dan sinergi ini demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan; (10) Pengembangan kawasan menjadi pendekatan yang wajib dilakukan dengan mengacu kepada: (i) UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (ii) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; (iii) UU 18/ 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (iv) UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (v) UU 13/2010 tentang Hortikultura; dan (vi) UU 39/2014 tentang Perkebunan (revisi dari UU 18/2004 tentang Perkebunan). Di dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa pengembangan pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dilakukan dengan pendekatan kawasan. Mengingat belum seluruh undang-undang tersebut memiliki Peraturan Pemerintah untuk operasionalnya, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Pertanian menjadi rujukan utama; dan (11) Tahapan pengembangan kawasan telah dituangkan dalam Permentan No. 50/2012, di mana tahap pengembangan kawasan komoditas unggulan didasarkan atas tingkat perkembangan masing-masing kawasan. Sesuai dengan peraturan tersebut, arah dan kebijakan pengembangan kawasan komoditas unggulan, pengembangan kawasan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: (i) tahap inisiasi pada kawasan yang belum berkembang; (ii) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (iii) tahap pemantapan kawasan; (iv) tahap perluasan kawasan; dan (v) tahap replikasi dan integrasi antarkawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antarsentra pertanian, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir, dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.

VI. PENDAYAGUNAAN HASIL DAN KERJA SAMA PENELITIAN

6.1. Publikasi Hasil – Hasil Penelitian

6.1.1. Jenis – Jenis Publikasi

Sebagai lembaga penelitian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian, PSEKP berkewajiban untuk mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan analisisnya kepada publik atau pengguna. Publikasi merupakan salah satu media yang dinilai sangat efektif dalam penyebarluasan hasil penelitian karena dapat mencapai sasaran secara luas dan memungkinkan untuk dibaca dan ditelaah secara berulang-ulang. Kegiatan publikasi hasil penelitian dan analisis sosial ekonomi pertanian merupakan aktivitas rutin setiap tahun. Pada tahun anggaran 2014 PSEKP telah menerbitkan 6 jenis publikasi dari target 7 jenis publikasi, yaitu kecuali makalah tematik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jurnal Agro Ekonomi

Jurnal Agro Ekonomi (JAE) terbit dua kali setahun dan dicetak masing-masing 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. JAE merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian primer sosial ekonomi pertanian. Penerbitan JAE dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional para ahli sosial ekonomi pertanian dan sarana untuk memperoleh informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku, dan pemerhati pembangunan pertanian dan perdesaan. Tabel 13 menyajikan judul-judul dan penulis naskah JAE Volume 31, Nomor 1, Mei 2013; Volume 31, Nomor 2, Oktober 2013; Volume 32, Nomor 1, Mei 2014; dan Volume 32, Nomor 2, Oktober 2014.

2. Forum Penelitian Agro Ekonomi

Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE) terbit dua kali setahun dan dicetak sebanyak 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. FAE merupakan publikasi ilmiah yang memuat *critical review* hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dan juga menampung naskah-naskah yang berupa gagasan-gagasan ataupun konsepsi-konsepsi orisinil dalam bidang sosial dan ekonomi pertanian. Tabel 14 menyajikan judul-judul dan penulis naskah FAE Volume 32, Nomor 1, Juli 2014 dan FAE Volume 32, Nomor 2, Desember 2014.

3. Analisis Kebijakan Pertanian

Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) terbit dua kali dalam setahun dan dicetak masing-masing 500 eksemplar untuk setiap nomor terbitan. AKP adalah media ilmiah yang memuat isu-isu aktual kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog, dan polemik. Tabel 15 menyajikan judul-judul dan penulis naskah AKP Volume 11, Nomor 1, Juni 2013 dan Volume 11 Nomor 2, Desember 2013.

Tabel 13. Judul dan Penulis Naskah JAE Tahun 2013 dan 2014

No.	Judul	Penulis
JAE Volume 31, Nomor 1, Mei 2013		
1.	Hubungan Kompetensi Penyuluh dengan Karakteristik Pribadi, Persepsi Penyuluh terhadap Dukungan Kelembagaan dan Persepsi Penyuluh Terhadap Sifat Inovasi Cyber Extension	Zahron Helmy, Sumardjo, Ninuk Purnaningsih, dan Prabowo Tjitropranoto
2.	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia	Irfan Syaqui Beik dan Winda Nur Aprianti
3.	Strategi Penguatan Kapasitas Pengolah Sagu Tradisional untuk Peningkatan Produktivitas Usaha di Maluku	Inta P.N. Damanik, Siti Amanah, Siti Madanijah, dan Prabowo Tjitropranoto
4.	Economies of Scale of Sugarcane Cooperatives in East Java Province and Their Influencing Factors	Ening Ariningsih
5.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Usahatani Petani sebagai Representasi Strategi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan di Lahan Marjinal	Kurnia Suci Indraningsih
JAE Volume 31, Nomor 2, Oktober 2013		
1.	Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian terhadap Kinerja Pertanian Daerah	Sumedi, Pantjar Simatupang, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus
2.	Estimasi Kapasitas Adaptasi Petani Padi terhadap Cekaman Lingkungan Usahatani Akibat Perubahan Iklim	Sumaryanto
3.	Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho, Tabanan, Bali	Herlina Tarigan, Arya H. Dharmawan, SMP Tjondronegoro, dan Kedi Suradisastra
4.	Nilai Tukar Petani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia	Tjetjep Nurasa dan Muchjidin Rachmat
5.	Peran Penyuluh dalam Peningkatan Diversifikasi Pangan Rumah Tangga	Rafnel Azhari, Pudji Muljono, dan Prabowo Tjitropranoto

JAE Volume 32, Nomor 1, Mei 2014		
1.	Analisis Efisiensi Teknis, Efisiensi Alokatif, dan Efisiensi Ekonomi Usahatani Jagung Berdasarkan Varietas di Provinsi Gorontalo	Andi Yulyani Fadwiwati, Sri Hartoyo, Sri Utami Kuncoro, dan I Wayan Rusastra
2.	Dampak Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Belanja Sektor Riil terhadap Penurunan Kemiskinan Pertanian di Indonesia	Vera Lisna, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, dan Slamet Utomo
3.	Efektivitas Proses Pembelajaran Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah oleh Komunitas Petani di Lampung	Slameto, F. Trisakti Haryadi, dan Subejo
4.	Peranan Teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada Produksi Sapi Potong di Indonesia	Kusriatmi, Rina Oktaviani, Yusman Syaukat, dan Ali Said
5.	Aksesibilitas dan Partisipasi Pengrajin Industri Tempe terhadap Sumber Pembiayaan Formal di Kabupaten Bogor Jawa Barat	Zednita Azriani, Nunung Kusnadi, Bonar M. Sinaga, dan Nunung Nuryantoro
JAE Volume 32, Nomor 2, Oktober 2014		
1.	Analisis Efisiensi Teknis Produksi Nanas: Studi Kasus di Kabupaten Subang, Jawa Barat	Riatania R.B. Lubis, Arief Daryanto, Mangara Tambunan, dan Handewi P.S. Rachman
2.	Dampak Pengembangan Produk Turunan Minyak Sawit terhadap Peningkatan Ekspor Minyak Sawit dan Produk Turunannya ke Pasar Amerika Serikat	Nila Rifai, Yusman Syaukat, Hermanto Siregar, dan E. Gumbira-Sa'id
3.	Model Ekonomi dan Dampak Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN – Cina bagi Perdagangan Gula Indonesia	Rena Yunita Rahman, Bonar M. Sinaga, Sri Hery Susilowati
4.	<i>Impacts of Cooperative Membership on Sugarcane Farmers' Income in East Java</i>	Ening Ariningsih
5.	Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Broiler Indonesia: Pendekatan Model Ekonometrika Simultan	Anna Fitriani, Heny K. Daryanto, Rita Nurmalina, dan Sri Hery Susilowati

Tabel 14. Judul dan Penulis Naskah FAE Tahun 2014

No.	Judul	Penulis
FAE Volume 32, Nomor 1, Juli 2014		
1.	Pendekatan Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya	Tri Bastuti Purwantini
2.	Politik Pangan Berbasis Industri Tepung Komposit	Tajuddin Bantacut dan Saptana
3.	Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia	Syahyuti
4.	Perdagangan Ternak dan Daging Sapi: Rekonsiliasi Kebijakan Impor dan Revitalisasi Pemasaran Domestik	I Wayan Rusastra

No.	Judul	Penulis
5.	Peran Cadangan Beras Darurat di Kawasan Asia Tenggara	Hermanto
FAE Volume 32, Nomor 2, Desember 2014		
1.	Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Ciliwung dengan Pendekatan Kelembagaan dalam Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usahatani	Tri Ratna Saridewi, Setia Hadi, Akhmad Fauzi, dan I Wayan Rusastra
2.	Pengembangan Padi Hibrida: Pengalaman dari Asia dan Prospek bagi Indonesia	Ashari dan I Wayan Rusastra
3.	Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya	Achmad Suryana
4.	Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional	Ening Ariningsih
5.	Sistem Pertanian Terintegrasi-Simantri: Konsep, Pelaksanaan, dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Bali	Iwan Setiajie Anugrah, Sarwititi Sarwoprasodjo, Kedi Suradisastra dan Ninuk Purnaningsih

Tabel 15. Judul dan Penulis Naskah AKP Tahun 2013

No.	Judul	Penulis
AKP Volume 11, Nomor 1, Juni 2013		
1.	Economic and Social Aspects of Palm Oil Industry: Indonesia's Palm Oil Trade in the Context of Economic Liberalization	Erna Maria Lokollo
2.	Ketahanan Pangan Indonesia dalam Ancaman: Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan	Achmad M. Fagi
3.	Kebijakan Antisipatif Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Handaka dan Abi Prabowo
4.	Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya	Valeriana Darwis dan Supriyati
5.	Analisis Keunggulan Komparatif Beras Indonesia	Delima H. Azahari dan Kusno Hadiutomo
AKP Volume 11, Nomor 2, Desember 2013		
1.	Strategi Penggalangan Petani untuk Mendukung Program Peningkatan Produksi Padi Berkelanjutan	Amar K. Zakaria dan Tjetjep Nurasa
2.	Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan, dan Bahaya Pengangguran dalam Pembangunan	Tri Pranadji, Sumaryanto, dan Endro Gunawan
3.	Evaluasi Kebijakan Tujuh Gema Revitalisasi dalam Pembangunan Pertanian	Saptana, Muhammad Iqbal, dan Ahmad Makky Ar-Rozi
4.	Kinerja Progam SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan ke Depan	I Wayan Rusastra, Herman Supriadi, dan Ashari
5.	Pemberdayaan Petani di Kawasan Subak Guama dan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali	Ngadi

4. Naskah Tematik

Naskah Tematik adalah media cetak yang memuat tulisan ilmiah peneliti PSEKP mengenai topik yang sesuai dengan kepakaran dan spesialisasi peneliti atau terkait dengan topik yang sedang menjadi isu menarik. Pada tahun 2014 naskah tematik tidak terbit karena tidak ada bahan yang masuk.

5. Prosiding

Prosiding merupakan publikasi yang diterbitkan secara tidak berkala. Prosiding berisi karya tulis yang pernah diseminarkan pada seminar nasional dan seminar khusus yang dilaksanakan oleh PSEKP. Tahun 2014 PSEKP menerbitkan satu prosiding. Judul-judul makalah dalam Prosiding disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Judul dan Penulis Naskah Seminar Prosiding Nasional Hari Pangan Sedunia Ke-33 “Optimasi Sumber Daya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” Tahun 2013

No.	Judul	Penulis
Makalah Utama		
1.	Peran Inovasi Teknologi Pertanian Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Haryono
2.	Mewujudkan Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Hariato
3.	Gerakan “One Day No Rice” (ODNR) dan Optimalisasi Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal	Nur Mahmudi Isma’il
4.	Optimalisasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Menyongsong MEA 2015	Agus Heri Purnomo dan Muhamad Darmawan
5.	Peran Sektor Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Menyongsong Pemberlakuan MEA 2015 (Optimalisasi Sagu sebagai Sumber Pangan Nasional)	Haryadi Himawan
6.	Agenda Riset Nasional untuk Mendukung Kemandirian Pangan Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015	Iding Chaidir
7.	Analisis Kebijakan Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Pendekatan <i>Systems Modelling</i>	Agung Hendriadi
8.	Kesiapan, Peluang, dan Tantangan Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community/AEC) 2015	Gardjita Budi
9.	Potensi Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015 terhadap Sektor Pertanian Indonesia	Yonariza dan Mahdi
10.	Prospek Pemberlakuan MEA 2015 bagi Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Suharyo Husen

No.	Judul	Penulis
11.	Kebijakan Perdagangan Mendukung Upaya Peningkatan Daya Saing Komoditas Pangan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015	Erwidodo
Makalah Penunjang		
A. Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
1.	Analisis Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EI) Koridor Sulawesi dalam Mendorong Pertumbuhan Produksi Pertanian Pangan Nasional	Adang Agustian dan Supena Friyatno
2.	Kiat-Kiat Strategis Menyikapi Problema Sumberdaya Lahan dalam Mendukung Kemandirian Pangan Dalam Konteks Green Economy	Irsal Las, M. Sarwani, dan A. Mulyani
3.	Potensi dan Prospek Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pertani	Reni Oelviani, A. Hermawan, A. Choliq, dan Komalawati
4.	Pergeseran Peran Pangan Berbahan Baku Lokal pada Pola Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia	Tri Bastuti Purwantini dan Sri Hery Susilowati
5.	Potensi Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Bahan Pangan Lokal di Provinsi Bengkulu	Umi Puji Astuti dan Bunaiyah Honorita
6.	Pengaruh Sistem Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi Sawah Varietas IR-66 di Sumatera Barat	Atman dan Misran
7.	Potensi Varietas Padi Sawah Lokal terhadap Teknologi Pertanian Organik di Nagari Sariak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat	Irmansyah Rusli dan Buharman Burhanuddin
8.	Keragaan Pertumbuhan dan Hasil VUB Inpari 12 dan Inpari 21 Batipuh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman	Syahrial Abdullah
9.	Uji Adaptasi Beberapa Genotipe Gandum (<i>Triticum aestivum L.</i>) Introduksi di Sukarami Kabupaten Solok	Doni Hariandi, A. Nurdin, dan A. Syarif
10.	Prospek Budidaya Kedelai pada Lahan Sawah Tadah Hujan dan Sawah Irigasi Sederhana untuk Peningkatan Produksi	Winardi
11.	Pengaruh Pemberian Berbagai Konsentrasi NAA (<i>Naphtaleneacetic acid</i>) pada Tahap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Gandum (<i>Triticum aestivum L</i>) di Sukarami Solok	Vivi Dharma, Irfan Suliansyah, dan Warnita
12.	Inventarisasi Tanaman Sumber Pangan Lokal di Lahan Pekarangan Kalimantan Tengah	Susilawati, S. Agustini, Rukayah, dan S. Mokhtar
13.	Adaptasi Varietas Jagung Hibrida Hasil Badan Litbang Pertanian Lahan Dangkal AIA Tajun Lubuk Alung Padang Pariaman	Syahrial Abdullah
14.	Potensi Pengembangan Kedelai di Lahan Gawangan Kelapa Sawit dengan Biaya Produksi Rendah di Sumatera Barat	Via Yulianti dan Jefri M. Muis
B. Sistem Pemasaran, Perdagangan, dan Peningkatan Daya Saing Pertanian		
1.	Analisis Ekonomi Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Pertanian Indonesia	Hermanto, Reni Kustiari, dan Erwidodo

No.	Judul	Penulis
2.	Posisi Perdagangan dan Daya Saing Gula Indonesia di Pasar ASEAN	Sri Hery Susilowati dan Rena Yunita Rachman
3.	Analisis Manajemen Rantai Pasok Ayam Kampung Pedaging: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur	Wahyuning K. Sejati dan Saptana
4.	Prospek Perbenihan Kentang di Sembalun Kabupaten Lombok Timur, NTB	Fitrahtunnisa, Eka Widiastuti, dan Ratna Wulandari
5.	Konsumsi, Produksi dan Strategi Pengembangan Buah-Buahan Lokal Indonesia	Ening Ariningsih
6.	Analisis Dinamika Permintaan/Konsumsi dan Kebijakan Pengembangan Produksi Jagung Nasional	Adang Agustian dan Supena Friyatno
C. Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan Pertanian		
1.	Perspektif Kelembagaan Lumbung Pangan Non Beras dalam Mendukung Kedaulatan Pangan Lokal	Kurnia Suci Indraningsih
2.	Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Pekarangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga	Sunarsih, Saptana, dan Supena Friyatno
3.	Peran UPBS dalam Penyediaan Benih bagi Penangkar Mendukung Penyebaran VUB Padi di NTB	Nani Herawati, Sabar Untung, Eka Widiastuti, dan Heru Rahmoyo Erlangga
4.	Peran Kelembagaan Agribisnis Penunjang dalam Usaha Tani Padi	Tri Bastuti Purwantini dan Wahyuning K. Sejati
5.	Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Mendukung Kemandirian Pangan di Sumatera Barat	Nasrul Hosen
D. Kebijakan dan Regulasi Pertanian		
1.	Eksistensi dan Esensi Peran Pertanian Skala Kecil dalam Pemenuhan Pangan Nasional: Studi Kasus Negara-Negara ASEAN	Syahyuti
2.	Pertarungan Akses Sumberdaya Air Keterancaman Subak pada Lahan Persawahan di Kabupaten Tabanan, Bali	Herlina Tarigan, Arya H. Dharmawan, SMP Tjondronegoro, dan Kedi Suradisastra
3.	Implementasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Banten	Ahmad Makky Arrozi dan Saptana
E. Sistem Produksi, Pengolahan, dan Pemanfaatan Pangan		
1.	Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Padi/Beras di Provinsi Jawa Barat dalam Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional	Supena Friyatno dan Adang Agustian
2.	Kebijakan Swasembada Daging: Melalui Pengembangan Wanaternak Berkelanjutan	Subarudi

No.	Judul	Penulis
3.	Aktivitas Dehidrogenase Tanah Tanaman Kedelai dengan Perlakuan Pupuk Kimia dan Pupuk Hayati	Sarmah, Jati Purwani, dan Subowo G.
4.	Pengujian Efektivitas Pupuk Hayati PH-E terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai	Endang Windiyati dan Ea Kosman Anwar
5.	Kajian Teknis-Ekonomis Thresher Lipat Bermotor pada Beberapa Varietas Padi di Kabupaten Solok	Tarmisi, Nusyirwan Hasan, dan Harnel
6.	Dukungan MKRPL terhadap Ekonomi Keluarga di Desa Lolu Kabupaten Sigi	Sumarni, Caya Khairani, dan Basrum
7.	Potensi dan Status Pengembangan Sorgum di Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Gerakan Diversifikasi Pangan Nasional	Prima Luna dan Sri Widowati
8.	Keragaan Teknologi Pengolahan Ubi Kayu Sebagai Alternatif Makanan Pokok di Sulawesi Tengah	Caya Khairani dan Andi Dalapati
9.	Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Genotipe Gandum (<i>Triticum Aestivum L.</i>) pada Lima Provinsi di Indonesia	Irfan Suliansyah, Irawati Chaniago, Nurwanita Ekasari Putri, Damanhuri, Muhammad Azrai, Trikoesoemaningtyas, dan Catur Herison
10.	Pertumbuhan dan Produktivitas Tujuh Varietas Unggul Kentang di Batagak, Kabupaten Agam	Yulimasni dan Hayani
11.	Sistem Produksi, Pengolahan dan Pemanfaatan Hutan Sagu untuk Penyediaan Pangan Karbohidrat di Papua Barat	Bambang Hariyanto, Priyo Atmadji, Agus Tri Putranto dan Indah Kurniasari
12.	Gerakan Padi Tanam Sabatang (PTS) di Sumatera Barat: Konsep dan Implementasinya di Lapangan	Zul Irfan
13.	Teknologi Pengolahan Ubi Jalar sebagai Alternatif Substitusi Bahan Baku Olahan dalam Mensukseskan Program Diversifikasi Pangan di Nusa Tenggara Barat	Fitrahtunnisa, Widya Siska, dan Ria Rustiana
14.	Potensi Pengembangan Bawang Merah di Sumatera Barat	Irmansyah Rusli dan Buharman Burhanuddin
15.	Varietas Lokal Padi Sawah Asal Sumatera Barat Berdaya Hasil Tinggi	Abd. Aziz Syarif
16.	Penyaringan Ketahanan Lima Kultivar Padi Beras Merah Lokal (<i>Oryza sativa L</i>) Asal Sumatera Barat terhadap Wereng Hijau (<i>Nephotettix virescens</i>)	Wilda Kurnia, Etti Swasti, dan Yaherwandi
17.	Evaluasi Kandungan Besi (Fe) dan Zink (Zn) pada Beberapa Kultivar Padi Beras Merah Asal Sumatera Barat	Muharama Yora, Sri Wahyuni, dan Annisa Afifatul Akhiar
18.	Keragaman Karakter Varietas Lokal Padi Sawah Sumatera Barat dan Potensinya dalam Pemuliaan untuk Daya Hasil Tinggi	Abd. Aziz Syarif dan Syahrul Zen
19.	Keragaan Plasma Nutfah Padi Lokal di Kalimantan Barat	Agus Subekti, Dadan Permana, Pratiwi, Trisna Yasi A.W., dan M. Arifin Muflih

No.	Judul	Penulis
20.	Adaptasi Varietas Unggul Baru Inpara pada Lahan Rawa Lebak di Kabupaten Mukomuko	Jhon Firison, Siti Rosmanah, dan Wahyu Wibawa
21.	Introduksi dan Analisa Usaha Tani Varietas Unggul Baru (VUB) Padi Inpari 12 di Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo Jambi	Bustami, Adri, dan Eva Salvia
22.	Inovasi Teknologi Salibu Meningkatkan Produktivitas Lahan, Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	Erdiman, Nieldalina, dan Misran
23.	Variabilitas Kandungan Antosianin pada Beberapa Kultivar Lokal Padi Merah Asal Sumatera Barat	Etti Swasti dan Morry Reza
24.	Uji Daya Hasil dan Mutu Beras Beberapa Galur Mutan Harapan dari Perbaikan Genetik Padi Lokal Sumatera Barat melalui Pemuliaan Mutasi	Hendra Alfi, Benny Warman, Irfan Suliansyah, Etti Swasti, dan Sobrizal
25.	Pengkayaan Tepung Kasava Termodifikasi Menggunakan Tepung Kecambah Kedelai untuk Memenuhi Angka Kecukupan Gizi Anak-Anak Usia 7-12 Tahun Hingga 30 Persen	Srimaryati dan Kasma Iswari
26.	Peningkatan Kandungan Asam Folat pada Tepung Kecambah Kedelai melalui Elisitasi dengan Xanthan Gum	Kasma Iswari dan Srimaryati
27.	Aplikasi Metode Modifikasi Panas Lembab untuk Sintesis Tepung Ubi Jalar dengan Karakteristik Antioksidan Sebagai Bahan Baku Pangan Non Terigu Non Beras	Widya Dwi Rukmi Putri, Dian Widya Ningtyas, Intan Liza, dan Ruly Agustin
28.	Kajian Sifat Organoleptik pada Beras Analog dengan Fortifikasi Tepung Ikan Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis L.</i>)	Indah Rodianawati, Hamidin Rasulu, Erna R.M Saleh, M. Assagaf, dan Marliani
29.	Pengkajian Teknologi <i>Surge Feeding</i> pada Induk Sapi Berbasis Pakan Lokal Mendukung Pengembangan Sapi Potong di Sumatera Barat	Ratna A.D., R. Wahyuni, dan Jefrey M.Muis
30.	Evaluasi Hasil Beberapa Aksesori Salak Hibrida dan Salak Lokal	Sri Hadiati dan Tri Budiyanti
31.	Peranan ZPT pada Pertumbuhan Stek Tanaman Buah Naga	Sunyoto dan Liza Octriana
32.	Uji Teknis Mesin Pelumat Kulit Kayu Manis (<i>Cinnamomum sp.</i>) untuk Menghasilkan Cairan dan Bubuk Kulit Kayu Manis	Tarmisi, Nusyirwan Hasan, dan Harnel
33.	Pemanfaatan Jagung untuk Jus dalam Meningkatkan Nilai Tambah	Ahyati Fadilah, Joko Purwanto, Ambar Dwi Kusumasmarawati, dan Lully Natharina Prasetyani
34.	Diversifikasi Pati Sagu (<i>Metroxylon sp.</i>) Sebagai Bahan Baku Mie dan Makaroni Sagu	Dian Anggraeni, Ade Saepudin, Budiyanto, dan Lully N. Prasetyani

No.	Judul	Penulis
35.	Inovasi Proses Tepung Talas Termodifikasi dalam Meningkatkan Nilai Produk	Yusman Taufik, Hasnelly, dan Rukmana
36.	Potensi dan Peluang Pengembangan Teknologi Pengolahan Melinjo dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi	Linda Yanti
37.	Kajian Pengaruh Suhu Simpan dan Metode Pematahan Dormansi terhadap Viabilitas Benih Pepaya Merah Delima	Sunyoto dan Liza Octriana
38.	Pengaruh Inokulasi Pupuk Hayati Cair terhadap Pertumbuhan dan Hasil Caisim (<i>Brassica rappa</i>) pada Tanah Ultisol	Sarmah dan Subowo G.
39.	Analisa Usaha Penggemukan Sapi Simental dengan Pemberian Kulit Kakao dan Jerami Fermentasi di Daerah Sentra Kakao Sumatera Barat	Jefrey M. Muis, R. Wahyuni, dan A. Bamualim

6. *Agro-Socioeconomic Newsletter*

Newsletter ini merupakan media berbahasa Inggris yang diterbitkan pertama kali tahun 2007. Frekuensi terbitannya sebanyak 4 kali setiap tahun, masing-masing 500 eksemplar setiap terbit. Jumlah halaman tiap terbit adalah 8 halaman berwarna penuh (*full colour*), namun karena berbagai hal pada tahun 2014 hanya terbit sebanyak 2 kali.

Media ini diterbitkan dalam upaya memperluas jangkauan pembaca, baik untuk berbagai mitra dan lembaga riset serta lembaga pemerintahan di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu, untuk setiap terbitan, media ini disebarakan ke berbagai lembaga pemerintah, kalangan perguruan tinggi, lembaga riset lain, swasta, dan lain-lain. Untuk kalangan dari luar negeri, media ini disampaikan secara langsung kepada beberapa lembaga riset dan donor yang berkantor di Indonesia, serta melalui website (www.pse.litbang.pertanian.go.id).

Sebagai newsletter, informasi yang disajikan merupakan informasi yang bersifat paling baru dan sedang hangat dibicarakan. Harapannya adalah agar pembaca dapat mengetahui informasi paling baru serta memperoleh respon dari kalangan pembaca secara cepat pula.

Topik-topik utama yang selalu hadir dalam setiap terbitan yaitu: temuan-temuan penelitian yang menarik (*research findings*), tinjauan terhadap kebijakan pemerintah yang terbaru tentang pembangunan pertanian (*recent policy development*), kegiatan penelitian di PSEKP (*research activities*), serta berita seputar lembaga PSEKP (*ICASEPS news*). Tabel 17 menyajikan daftar isi terbitan Newsletter PSEKP selama tahun 2014.

Tabel 17. Daftar Isi Terbitan Newsletter PSEKP Tahun 2014

Newsletter Volume 7, Nomor 1, Maret 2013
1. Competitiveness of Horticultural Products to Improve Indonesia's Export Market
2. Agricultural Extension Revitalization to Improve Agro-Industry Competitiveness
3. Genetically Modified Organism (GMO) Variety Release
4. Research Activities
5. Publications
6. Seminar
7. Welcome
Newsletter Volume 7, Nomor 2, Juni 2013
1. Economic Incentives and Institutional Aspect Supporting the Implementation of the Law on Agricultural Land Protection for Food Sustainability
2. Assessment of Alternative Models of Seed and Fertilizer Subsidies to Increase Food Productions
3. Agriculture Minister Regulation (PERMENTAN) No. 15/2013: Community Diversification and Food Security Enhancement Program
4. Poultry Production Cluster (PPC) in Subang, West Java, Indonesia.
5. Publications
6. The Rules of WTO, BUMN (State-Owned Enterprises), and Food Prices Stabilization Programs
7. Food Security and SSM Analysis of Main Commodities in Implementing WTO Agreements
8. Farmers Self-Organizing and Food Commodity Development in the Framework of Free Trade
9. The 69 th Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

7. Leaflet

Leaflet adalah media cetak ilmiah peneliti PSEKP yang memberikan informasi detail yang mana tidak dapat diberikan secara lisan, mudah dibuat, diperbanyak, dan diperbaiki serta disesuaikan dengan kelompok sasaran, dan topik yang sedang menjadi isu menarik atau untuk kegiatan seminar yang bersifat nasional. Frekuensi terbitannya sebanyak 5 kali setiap tahun, masing-masing 500 eksemplar setiap terbitnya.

Tabel 18. Daftar Judul Leaflet Tahun 2014

No	Judul
1.	Peran Strategis Penyuluh Swadaya untuk Masa Depan Penyuluhan Pertanian Indonesia.
2.	Dampak Makro Perubahan Iklim pada Subsektor Pangan Indonesia.
3.	Pengembangan Asuransi Usahatani Padi Untuk Menanggulangi Resiko Kerugian Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit.
4.	Seminar Nasional HPS XXXIV: Sistem Pertanian-Energi Terpadu untuk Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Petani.
5.	Akselerasi Sistem Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil dan Alsintan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan.

6.1.2. Pendistribusian Hasil Publikasi

Berbagai jenis publikasi yang telah dihasilkan PSEKP disebarluaskan ke berbagai instansi terkait seperti Staf Ahli Menteri, Sekjen, Ditjen dan Badan Lingkup Deptan, Puslitbang, BPTP, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Asosiasi Swasta, dan lain-lain. Pendistribusian dilakukan melalui paket pos, diantar langsung untuk wilayah Jabodetabek, atau melalui tamu-tamu yang datang ke PSEKP dan memerlukan hasil publikasi tersebut.

Tabel 19. Distribusi Publikasi Ilmiah Tahun 2014

Jenis Publikasi	Penerima Publikasi	Jumlah (Eks/Terbitan)
JAE	Perpustakaan PSEKP, Penulis, Peneliti PSEKP, Instansi lingkup Kementan, Instansi Asing, Perpustakaan Universitas seluruh Indonesia serta Instansi di luar Kementan	475
FAE	Perpustakaan PSEKP, Penulis, Peneliti PSEKP, Instansi lingkup Kementan, Instansi Asing, Perpustakaan Universitas seluruh Indonesia serta Instansi di luar Kementan	475
AKP	Perpustakaan PSEKP, Penulis, Peneliti PSEKP, Instansi lingkup Kementan, Instansi Asing, Perpustakaan Universitas seluruh Indonesia serta Instansi di luar Kementan	475
Prosiding	Perpustakaan PSEKP, Penulis, Peneliti PSEKP, Instansi lingkup Kementan, Instansi Asing, Perpustakaan Universitas seluruh Indonesia serta Instansi di luar Kementan	325
Newsletter	Perpustakaan PSEKP, Penulis, Peneliti PSEKP, Instansi lingkup Kementan, Instansi Asing, Perpustakaan Universitas seluruh Indonesia serta Instansi di luar Kementan	475

6.1.3. Dewan Redaksi

Publikasi ilmiah PSEKP dapat dihasilkan melalui kerja sama antara penulis naskah dan Dewan Redaksi. Seleksi tulisan dilakukan oleh Dewan Redaksi

untuk terbitan JAE, FAE, dan AKP yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian (Tabel 20).

Tabel 20. Susunan Dewan Redaksi JAE, FAE, AKP Tahun 2014

No.	Keputusan Kepala Badan Nomor	Terbitan	Nama Dewan Redaksi
1.	143.2/Kpts/OT.160/I/5/2014	JAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian 2. Prof. Dr. Dewa K.S. Swastika 3. Dr. Sumaryanto 4. Dr. Syahyuti 5. Dr. Saktyanu Kristyantoadi D. 6. Dr. Adang Agustian 7. Cut Rabiatul Adawiyah, S.P. 8. Drs. Tita Dvijati Permata, M.Si. 9. Ir. Wartiningsih 10. Eti Suhaeti 11. Ibnu Salman
2.	143.1/Kpts/OT.160/I/5/2014	FAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian 2. Dr. Muchjidin Rachmat 3. Dr. Sri Hery Susilowati 4. Dr. Saptana 5. Dr. Gatoet Sroe Hardono 6. Dr. I Ketut Kariyasa 7. Dr. Syahyuti 8. N. Sri Sunari, S.E. 9. Eddy Supriadi Yusuf, S.E. 10. Kardjono 11. Ibnu Salman
3.	143.3/Kpts/OT.160/I/5/2014	AKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian 2. Dr. Bambang Sayaka 3. Dr. Hermanto 4. Dr. Nyak Ilham 5. Ir. Mewa Ariani, M.S. 6. Dr. Henny Mayrowani 7. Dr. Syahyuti 8. Ir. Wartiningsih 9. Cut Rabiatul Adawiyah, S.P. 10. N. Sri Sunari, S.E. 11. Ibnu Salman
4.	334/KP. 340/I.7/3/2014	Newsletter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Sahat M Pasaribu 2. Dr. Bambang Sayaka 3. Dr. Ening Ariningsih 4. Ir. M. Iqbal, M.Sc. 5. Ir. Wartiningsih 6. Rina Cantayani, S.H. 7. Ibnu Salman

6.2. Komunikasi dan Dokumentasi Hasil Penelitian

Hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian (termasuk PSEKP) baru akan memiliki makna dan manfaat setelah sampai kepada para *stakeholder* atau pengguna. Oleh karena itu, kegiatan komunikasi (mulai dari pengolahan sampai penyebarluasan hasil penelitian) memegang peranan sangat penting. Dalam penyelenggaraan komunikasi, perlu juga didukung dengan dokumentasi yang baik. Kegiatan dokumentasi dapat berupa pengabdian suatu peristiwa/momen kegiatan komunikasi atau manajemen kearsipan bahan-bahan komunikasi.

Pada tahun Anggaran 2014 kegiatan komunikasi dan dokumentasi penelitian yang dilaksanakan PSEKP, meliputi: (1) Seminar Rutin, Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian 2014, (2) Seminar Nasional 2014, (3) Rapat Dewan Redaksi; (4) Pembuatan website; (5) Dokumentasi; dan (6) Penyebaran publikasi.

6.2.1. Seminar

Selama tahun 2014 PSEKP telah menyelenggarakan berbagai seminar, yang diantaranya adalah: Seminar Rutin, Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Seminar Nasional. Kegiatan seminar tersebut bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan untuk mendapatkan umpan balik atau masukan dari para *stakeholder*. Khusus Seminar Rutin, selain bertujuan untuk mencari masukan dari *stakeholder*, juga dijadikan sebagai ajang/media menumbuhkan “budaya ilmiah” di PSEKP sebagai salah satu lembaga penelitian. Tabel 21 menyajikan judul-judul makalah seminar rutin dan pembicaranya.

Tabel 21. Judul Makalah dan Pembicara pada Seminar Rutin Tahun 2014

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
1.	15-1-2014	<i>Productivity and Technical Inefficiency of Integrated Pest Management Compliant and Noncompliant Farmers: The case of shallot growers in Java</i>	Wahida, S.P., M.Si.
2.	25-1-2014	<i>Study on Transitory Food Security in Indonesia: Modelling Demand to Evaluate the Impacts of Selected Risk Scenarios</i>	- Mr. Jesus Anton, Ph.D. - Singo Komura, Ph.D. - Hiroaki Ogawa, Ph.D. (OECD + Osaka University)
3.	4-3-2014	- <i>How We Can Realize Win-Win Situation between Large Scale Oil Palm Companies and Smallholders</i> - Kemitraan antara Perusahaan Kelapa Sawit dan Petani di Indonesia: Hambatan dan Arah ke Depan	- Dr. Tomohide Sugino (JIRCAS) - Dr. Bambang Drajat (RPN Bogor)

No.	Tanggal	Judul Makalah	Pembicara
4.	2-4-2014	Implikasi Urbanisasi terhadap Masa Depan Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Dr. Sumaryanto
5.	30-4-2014	Membangun Jaringan Kerja Sama Penelitian Pertanian dalam Rangka Pemberdayaan Petani	Dr. Edi Basuno
6.	2-7-2014	Harga dan Kualitas Beras, dan Sensus Penggilingan Padi BPS 2012	Prof. Dr. Husein Sawit
7.	18-8-2014	<i>International Year of Family Farming</i> : Mewujudkan Keluarga Petani Indonesia yang Bermartabat	Dr. Syahyuti
8.	25-9-2014	<i>Competitiveness of Selected Food Crops of Indonesia: a Policy Analysis Matrix Approach</i>	Drs. Sjaiful Bachri, M. Com.

Beberapa seminar tertentu melibatkan tim pembahas yang berasal dari luar PSEKP, baik kalangan birokrat maupun akademisi. Tujuan seminar tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dari pembahas dan peserta, sekaligus sebagai media untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada *stakeholder*.

Tabel 22. Judul Makalah dan Penulis pada Seminar Hari Pangan Sedunia Ke-34 "Pertanian-Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial" Tahun 2014

No.	Judul Makalah	Penulis
Makalah Utama		
1.	Ketersediaan Teknologi Siap Guna dalam Pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri Berbasis Pangan Lokal Potensial	Handewi P. Saliem
2.	Pertanian-Bioindustri Berbasis Pangan Sagu di Kabupaten Sorong Selatan	Otto Ihalauw
3.	Desain dan Pola Pengelolaan Sistem Pertanian Biosiklus dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Energi	Cahyono Agus D.K.
4.	Peran Pertanian dalam Membantu Mewujudkan Kemandirian Energi	Erliza Hambali
5.	Penerapan Sistem Pertanian-Biorefinery Terpadu Berbasis Tanaman Nanas PT Great Giant Pineapple	Ruslan Krisno
6.	Pemanfaatan dan Optimalisasi Sorgum sebagai Sumber Bahan Energi Alternatif (Bioetanol)	Nurkholis
7.	Peranan Program Biogas Rumah (Biru) dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Pangan	Yudha Hartanto
8.	Pemanfaatan Limbah Bawang Merah sebagai Sumber Bionergi Pertanian	Ramin Saaman

No.	Judul Makalah	Penulis
Makalah Penunjang		
1.	Pengembangan Terintegrasi Tanaman Pangan dan Ternak pada Kawasan Hutan Tanaman Rakyat: Suatu Opsi untuk Peningkatan Produksi Pangan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan	Zainal Abidin
2.	Hambatan Implementasi Program Integrasi Sawit-Sapi dan Energi (ISSE) dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Energi (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara)	Bagus Giri Yudanto, Edy Sigit Sutarta, dan Vita Dhian Lelyana
3.	Analisis Efektivitas dan Kelayakan Pupuk Hayati Unggulan Nasional Baru terhadap Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat	Ikin Sadikin, Iskandar Ishaq, dan Nandang Sunandar
4.	Persepsi Petani dalam Pengembangan Jeruk di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu	Umi Pudji Astuti, Andi Ishak, dan Hasnah Jadawi
5.	Kajian Teknologi Pemupukan terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Pisang di Kalimantan Timur	Muhammad Rizal
6.	Efektivitas Kebijakan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Perkotaan di Jawa Barat	Nurnayetti, N. Sunandar dan I. Sadikin
7.	Adaptasi Beberapa Varietas Unggul Baru Kedelai Melalui Pendekatan PTT Mendukung SL-PTT Kedelai di Sulawesi Tengah	Ruslan Boy, Yakob Bunga, dan Saidah
8.	Implementasi Sistem Integrasi Pertanian-Energi Berbasis Limbah Perkebunan dengan Sumber Daya Hayati di Sulawesi Tenggara	Rusdi
9.	Integrasi Pengembangan Tanaman Jagung dengan Ternak Ruminansia	Syafruddin
10.	Pemanfaatan Limbah Usahaternak Sapi Perah untuk Biogas Mendukung Kemandirian Energi di Perdesaan	Tri Bastuti Purwantini
11.	Penerapan Teknologi Integrasi Tanaman Ternak pada Lahan Kering Iklim Kering di NTT	Yohannes L.
12.	Identifikasi dan Uji In Vitro Efektivitas Cendawan Dekomposer terhadap Limbah Tanaman Jagung	Nurasiah Djaenuddin, Faesal, dan Soenartiningih
13.	Penanganan Pascapanen Sorgum untuk Mempertahankan Mutu Benih	Fauziah Koes dan Ramlah Arief
14.	Peningkatan Kualitas Semen Sapi Bali dengan Jamu Tradisional	Matheus, Sariubang, dan Repelita Kallo
15.	Identifikasi Patogen Penyebab Penyakit pada Tanaman Gandum di Sulsel	Amran Muis
16.	Desain dan Pengujian Alat Tanam Benih Langsung (ATABELA) Jajar Legowo Hemat Energi pada Padi Sawah	Jonni Firdaus
17.	Tanaman Sorgum Mendukung Ketahanan Pangan dan Bahan Baku Industri	Faesal dan Syuryawati

No.	Judul Makalah	Penulis
18.	Peningkatan Nilai Tambah Limbah Sekam Padi sebagai Sumber Energi dan Pupuk Organik Perdesaan	Sunanto
19.	Pengaruh Penundaan Pengeringan terhadap Mutu Benih Sorgum (<i>Sorghum bicolor</i> L. Moench)	Oom Komalasari dan Ramlah Arief
20.	Ketersediaan Teknologi Pengembangan Sorgum Manis sebagai Sumber Energi Alternatif	Muhammad Aqil dan Taufik Ratule
21.	Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas Padi Sawah pada Sistem Jajar Legowo	Ruslan Boy
22.	Produksi Bahan Kering dan Nitrogen Beberapa Varietas Rumpuk Hijauan Makanan Ternak untuk Mendukung Ketahanan Pakan	Andi Ella
23.	Hasil Kajian Beberapa VUB Padi (Inpari) melalui Demplot SL-PTT Musim Hujan di Lahan Sawah Alastiang Banyuanyar Probolinggo	Sugiono, Kasmiyati, dan Miskat Ramdhani
24.	Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas Unggul Baru (VUB) Padi Sawah Irigasi di Kabupaten Gowa	Arini Putri Haniva, Maintang, dan Sahardi
25.	Peningkatan Performans Sapi Potong dengan Pemberian Pakan Berbasis Limbah Jagung di Kabupaten Bantaeng Sulsel	A. Nurhayu, Andi Baso, dan Andi Ella
26.	Potensi dan Kendala Pengembangan Bioenergi (Bioethanol) Berbahan Baku Ketela Pohon di Provinsi Lampung	Adang Agustian dan Supena Friyatno
27.	Prospek Pengembangan Biogas dari Kotoran Ternak Mendukung Sistem Pertanian Bioindustri di Provinsi Jabar	Adang Agustian dan Supena Friyatno
28.	Prospek dan Strategi Pengembangan Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan Berbasis Padi-Sapi di Maluku Utara	Yopi Saleh, Cris Sugihono, dan Hermawati Cahyaningrum
29.	Prospek Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman-Ternak di Sulsel	Eka Triana dan M. Basir
30.	<i>Local Market Potential and Marketing Systems of Vegetables from Upland Areas of Indonesia Supporting the Agriculture Based Bio-Industry</i>	Idha Widhi Arsanti
31.	Potensi Pengembangan Sorgum sebagai Bahan Diversifikasi Pangan dan Bio-Industry	Suarni
32.	Peluang Pengembangan Hutan Tanaman Pangan	Triyono Puspitojati dan Rachman Effendi
33.	Peluang Pemanfaatan Limbah Pertanian Jagung sebagai Bahan Baku Industri Bioethanol	Suwarti
34.	Prospek Pengembangan Agribisnis dan Penguatan Sistem Benih Sumber Serealia (Studi Kasus: Provinsi Sulsel)	Margaretha S.L., M. Aqil, dan Subagio

No.	Judul Makalah	Penulis
35.	Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Energi Arus Laut dalam Mendukung Ketahanan Pangan pada Masyarakat Pesisir	Rizky Muhartono
36.	Analisis Masalah dan Peluang Pengembangan Kakao Rakyat: Kasus Nagari Supayang Kabupaten Solok	Buharman B. dan Ishak Manti
37.	Menuju Industri Tebu Bebas Limbah	Ening Aringsih
38.	Produksi dan Pemasaran Benih Jagung di Nusa Tenggara Barat Menunjang Kemandirian Pangan	Syuryawati, Arsyad Biba, dan Herman Subagio
39.	Analisis Keunggulan Kompetitif Usahatani Lahan Pasar Pantai di Kab. Bantul DI Yogyakarta	Subagiyo, Kurnianita, Triwidyastuti, dan Susanti Dwi
40.	Peran Penyuluhan dalam Mendukung Pertanian Terpadu untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Energi	Kurnia Suci Indraningsih
41.	Rekomendasi Teknologi Peningkatan Produksi Padi dengan Pendekatan Sistem Dinamik dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Provinsi Bengkulu	Dedi Sugandi, Yong Farmanta, Umi Pudji Astuti, dan Wahyu Wibawa
42.	Tanggapan Petani terhadap Sistem Pertanian Nir Limbah Berbasis Komoditas Jagung di Sulsel	Sunanto, Fadry Djufry, dan Jermia Limbongan
43.	Potensi Peternakan Sapi Potong di NTB dalam Pemenuhan Kebutuhan Daging Sapi dan Penyerapan Tenaga Kerja	Sasongko W. Rusdianto, Dwi Prptomomo, dan Farida Sukmawati
44.	Industrialisasi Perikanan Mendukung Ketahanan Pangan di Perdesaan Perairan Umum Daratan	Zahri N.
45.	Teknologi Produksi Ubi Kayu melalui Sistem Integrasi Tanaman-Ternak sebagai Sumber Bahan Baku Bioetanol	Idaryani
46.	Introduksi Melalui Klinik Teknologi Pertanian Mendukung Program SLPTT Provinsi Aceh	Abdul Azis dan Basri A. Bakar

6.2.2. Pengelolaan Website

Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik, PSEKP telah membangun situs atau Website sendiri dengan alamat: <http://www.pse.litbang.pertanian.go.id>. Website ini telah *on line* dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* yang membutuhkan data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP selama 24 jam. Situs atau Website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan jumlah pengakses website PSEKP selama tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 23. Data jumlah pengakses website menurut materi yang diakses dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 23. Jumlah Pengakses Website PSEKP pada Tahun 2014 (per Desember Tahun 2014)

Bulan	Jumlah Pengunjung	Jumlah Kunjungan	Jumlah Halaman yang Dikunjungi	Jumlah Link yang Diklik
Januari	5.673	8.752	22.802	39.252
Februari	4.531	7.056	17.090	36.829
Maret	6.711	10.390	98.981	126.590
April	8.148	14.079	950.091	967.786
Mei	9.652	16.947	1.055.015	1.071.896
Juni	12.078	20.629	1.526.194	1.545.101
Juli	8.418	14.493	1.117.210	1.133.188
Agustus	10.432	17.244	1.394.781	1.417.403
September	15.280	28.469	1.751.781	1.782.862
Oktober	17.013	32.255	2.379.607	2.418.133
November	13.735	27.273	1.504.419	1.531.669
Desember	22.347	44.006	2.171.589	2.205.156
Total	34.018	241.593	13.989.560	14.275.865

Tabel 24. Frase/Kata yang Digunakan dalam Pencarian (per 5 Desember 2014)

No.	Kata	Jumlah	Frase	Jumlah
1.	Pertanian	4.893	Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia	82
2.	Ekonomi	3.018	Kemandirian Pangan	79
3.	Jurnal	2.984	Kebijakan Investasi	67
4.	Kebijakan	2.925	Ketahanan Pangan	62
5.	Pangan	2.792	Kebijakan Produksi	50
6.	Indonesia	2.615	Alih Fungsi Lahan	44
7.	Analisis	2.014	Jurnal Ekonomi Pertanian Topik Penyebab Petani Merangkap Pekerjaan Lain	41
8.	Petani	1.633	Peningkatan Kualitas Beras	40
9.	Pembangunan	1.455	Kesejahteraan Petani	38
10.	Pengaruh	1.365	RPJPN	38
11.	Faktor	1.279	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran	35
12.	Harga	1.235	Masuk Pasar Australia	35
13.	Produksi	1.136	www.desertasi dengan Alat Analisa Pls	33
14.	Dampak	1.039	Jurnal Pertumbuhan Ekonomi	31
15.	Sosial	988	Peningkatan Kualitas Padi	30
16.	Sapi	981	Pelatihan Dengan Kompetensi Petani	30
17.	Pertumbuhan	980	Faktor yang Mempengaruhi Produksi	29
18.	Lahan	916	Kebijakan Pertanian	29
19.	Padi	897	Diversifikasi Pangan	28
20.	Mempengaruhi	893	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	28

Tabel 25. Materi Website PSEKP yang Diakses Tahun 2014

No.	Materi	Jumlah
1.	AKP Vol. 4 No. 2 Analisis Sosial Ekonomi dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging 2010 (Nyak Ilham)	92.410
2.	Prosiding Seminar Nasional “Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan” 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti)	5.746
3.	AKP Vol. 3 No. 3 Kebijakan Ekonomi Industri Agribisnis Sapi Perah di Indonesia (Yusmichad Yusdja)	2.513
4.	Monograph No. 27 Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan (Mewa Ariani)	2.305
5.	Prosiding Seminar Nasional “Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani” Makalah Penunjang Strategi Peningkatan Daya Saing Agribisnis Kopi Robusta dengan Model Daya Saing Tree Five (Soetriono)	1.477
6.	JAE Vol. 23 No. 2 Faktor Penentu Tingkat Efisiensi Teknik Usahatani Cabai Merah di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong (Ketut Sukiyono)	1.427
7.	FAE Vol. 23 No. 1 Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan (Bambang Irawan)	1.345
8.	JAE Vol. 22 No. 2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras serta Inflasi Bahan Makanan (A. Husni Malian, Sudi Mardianto, dan Mewa Ariani)	955
9.	Anjak Tahun 2011 Kajian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	932
10.	AKP Vol. 7 No. 1 Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten (Benny Rachman)	909
11.	Makalah Seminar Nasional “Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga di Wilayah Historis Pangan Beras dan Nonberas di Indonesia (A. Ayiek Sih Sayekti)	800

No.	Materi	Jumlah
12.	JAE Vol. 29 No. 1 Analisis Efisiensi Usahatani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia (Nunung Kusnadi, Netti Tinaprilla, Sri H. Susilowati, dan Adreng Purwoto)	760
13.	FAE Vol. 30 No. 2 Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia (Henny Mayrowani)	738
14.	JAE Vol. 23 No. 1 Daya Saing Ekspor Teh Indonesia di Pasar Teh Dunia (Rohayati Suprihatini)	729
15.	FAE Vol. 25 No. 1 Analisis Kritis terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional (Pantjar Simatupang)	688
16.	Laporan Hasil Penelitian DIPA TA 2012 Kajian Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan	683
17.	JAE Vol. 22 No. 2 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pasar Jagung di Indonesia (Ketut Kariyasa dan Bonar M. Sinaga)	680
18.	AKP Vol. 6 No. 4 Strategi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Papua Barat (Herman Supriadi)	560
19.	AKP Vol. 3 No. 1 Strategi Percepatan Adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Prima Tani (Akhmad Musyafak dan Tatang M. Ibrahim)	537
20.	Anjak Tahun 2011 Outlook Pertanian 2010 – 2025	526

6.3. Perpustakaan

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang besar terhadap perkembangan perpustakaan, sehingga perpustakaan harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penyedia koleksi dan informasi yang semakin baik. Koleksi dan informasi yang disediakan tersebut disesuaikan dengan lembaga induknya.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, selain menyediakan koleksi bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik, perpustakaan perlu didukung oleh tenaga pengelola dan fasilitas yang memadai. Untuk evaluasi hal tersebut perlu dibuatkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang dan rencana satu tahun ke depan.

6.3.1. Pengadaan Bahan Pustaka

Dengan anggaran sebesar Rp31,5 juta pada tahun 2014, Perpustakaan telah mengadakan bahan pustaka sebanyak 60 judul dengan jumlah eksemplar sebanyak 152 eksemplar. Pengadaan bahan pustaka tahun 2014 menyerap dana sebanyak Rp30,1 juta atau sebesar 95,67 persen dari total anggaran DIPA yang diajukan. Selain dengan cara pembelian, pengadaan bahan pustaka dilakukan juga dengan jalan tukar menukar atau hadiah dengan Instansi lingkup Kementerian Pertanian atau instansi terkait. Tabel 26 menyajikan tentang Pengadaan Bahan Pustaka TA 2014.

Tabel 26. Pengadaan Bahan Pustaka TA 2014

No.	Uraian	Banyak-nya	Harga Satuan (Rp/satuan)	Jumlah (Rp)
1.	Indonesian Quarterly	4 eks	75.000	300.000
2.	Analisis CSIS	4 eks	75.000	300.000
3.	Buletin of Indonesian Ecomic Studies	4 eks	62.500	250.000
4.	Trubus Vol. 45 bulan Januari s/d Juni 2013	6 eks	50.000	300.000
5.	SEKI bulan September - Desember 2013	4 eks	75.000	300.000
6.	Neraca Bahan Makanan 2011-2012	1 eks	100.000	100.000
7.	Statistik Peternakan 2013	1 eks	125.000	125.000
8.	Statistik Pertanian 2013	1 eks	125.000	125.000
9.	Statistik Perkebunan Karet 2012-2014	1 eks	120.000	120.000
10.	Statistik Perkebunan Kelapa 2012-2014	1 eks	115.000	115.000
11.	Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2012-2014	1 eks	115.000	115.000
12.	Statistik Perkebunan Kakao 2012-2014	1 eks	120.000	120.000
13.	Statistik Perkebunan Cengkeh 2012-2014	1 eks	115.000	115.000
14.	Statistik Perkebunan Kapas 2012-2014	1 eks	90.000	90.000
15.	Statistik Perkebunan Teh 2012-2014	1 eks	115.000	115.000
16.	Statistik Perkebunan Lada 2012-2014	1 eks	100.000	100.000
17.	Statistik Perkebunan Jambu Mete 2012-2014	1 eks	90.000	90.000
18.	Statistik Perkebunan Kopi 2012-2014	1 eks	120.000	120.000
19.	Statistik Perkebunan Tebu 2012-2014	1 eks	90.000	90.000
20.	Statistik Perkebunan Tembakau 2012-2014	1 eks	115.000	115.000
21.	Indikator Ekonomi BPS Juli-Desember 2013	6 eks	90.000	540.000
22.	Impor Bulanan BPS Januari-Nopember 2013	11 eks	90.000	990.000
23.	Ekspor Bulanan BPS Juli-Desember 2013	6 eks	100.000	600.000
24.	Laporan Perekonomian Indonesia 2013	1 eks	137.500	137.500
25.	Implementasi Hukum Tindak Pidana Korupsi	2 eks	350.000	700.000
26.	American Journal of Agricultural Economics Vol. 96 (No. 1, No. 2, No. 3, No. 4) 2014	4 eks	937.500	3.750.000
27.	Applied Economic Perspectives, Vol. 36 No. 1, No. 2, 2013	2 eks	625.000	1.250.000
28.	Trubus 2014, bulan Juli, Agustus, September 2014	3 eks	50.000	150.000

No.	Uraian	Banyak-nya	Harga Satuan (Rp/satuan)	Jumlah (Rp)
29.	SEKI Bulan Januari, Februari, Maret, April 2014	4 eks	75.000	300.000
30.	Statistik Indonesia 2014	2 eks	550.000	1.100.000
31.	Statistik Harga Produsen Pertanian 2013	1 eks	150.000	150.000
32.	Economic Development and Cultural Change No. 1, 2 dan No. 3, 2014	3 eks	625.000	1.875.000
33.	Buletin Export Bulanan Januari-April 2014	4 eks	100.000	400.000
34.	Indikator Ekonomi Januari-April, Juni 2014	5 eks	90.000	450.000
35.	Statistik Harga Konsumen Perdesaan: Kelompok Non Makanan 2013	1 eks	230.000	230.000
36.	Statistik Harga Konsumen Perdesaan: Kelompok Makanan 2013	1 eks	230.000	230.000
37.	Universal Decimal Classification Vol. 1, Vol. 2 Tahun 2012	2 eks	312.500	625.000
38.	Seki bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2014	4 eks	75.000	300.000
39.	Trubus Oktober, Nopember 2014	2 eks	50.000	100.000
40.	American Journal of Agricultural Economics Vol. 96 No. 5 Tahun 2014	1 eks	937.500	937.500
41.	Applied Economic Perspective Vol. 36 No. 3, 2014	1 eks	625.000	625.000
42.	Economic Development & Culture Change Vol. 62 No.2, 2014	1 eks	625.000	625.000
43.	Menuju Indonesia Berdaulat Pangan	1 eks	95.000	95.000
44.	Sosiologi Suatu Pengantar	1 eks	125.000	125.000
45.	Reposisi Politik Pertanian	1 eks	112.500	112.500
46.	Luas Lahan Menurut Penggunaannya Tahun 2012	1 eks	75.000	75.000
47.	Indeks Harga Perdagangan Besar Tahun 2013	1 eks	117.500	117.500
48.	TRUBUS Vol.220 bulan Desember 2014	1 eks	50.000	50.000
49.	Statistik Ekspor Vol. 1 dan Vol. 2, 2013	2 eks	535.000	1.070.000
50.	Indikator Ekonomi bulan Mei 2014	1 eks	90.000	90.000
51.	Green Economy: Ekonomi Hijau	1 eks	68.750	68.750
52.	Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi	2 eks	112.500	225.000
53.	Ekonomi Pembangunan Pertanian	1 eks	81.250	81.250
54.	Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan	1 eks	87.500	87.500
55.	Dasar-Dasar Ekonometri Edisi 5, Buku I	1 eks	257.500	257.500
56.	Ekonomi Politik dan Pembangunan	1 eks	68.750	68.750
57.	Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan	2 eks	171.250	342.500
58.	Mikroekonomi Edisi 8	1 eks	400.000	400.000
59.	Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 4	1 eks	468.750	468.750
60.	Reposisi Politik Pertanian	1 eks	112.500	112.500
61.	Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis	1 eks	131.250	131.250
62.	Mau Ini Apa Itu? "Komparasi Konsep, Teori"	1 eks	125.000	125.000
63.	Pembangunan Perdesaan, Kemiskinan dan Ruralisasi	1 eks	62.500	62.500

No.	Uraian	Banyak-nya	Harga Satuan (Rp/satuan)	Jumlah (Rp)	
64.	SEKI Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2014	4 eks	75.000	300.000	
65.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Jilid 1 2013	1 eks	125.000	125.000	
66.	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia Jilid 2 2013	1 eks	156.250	156.250	
67.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Jilid 3, 2013	1 eks	250.000	250.000	
68.	Statistik Impor Vol. 1 dan Vol. 2, 2013	2 eks	535.000	1.070.000	
69.	Buletin Ekspor Bulan Mei 2014	1 eks	100.000	100.000	
70.	The American Economic Review, Vol. 103, No.3, 4, 5, 6, dan 7, 2013	5 eks	500.000	2.500.000	
71.	The American Economic Review, Vol .104, No. 2,,3, dan 4, 2014	3 eks	500.000	1.500.000	
72.	Pemrograman Visual Basic .Net oleh R.H. Sianipar 2014	1 eks	100.000	100.000	
73.	Kamus Indonesia-Inggris Edisi Ketiga yang Diperbaharui 2014	1 eks	170.000	170.000	
74.	Kamus Inggris-Indonesia Edisi Ketiga yang Diperbaharui 2014	1 eks	170.000	170.000	
75.	Aplikasi ISO Sebagai Standar Mutu 2014	1 eks	45.000	45.000	
76.	Luas Lahan Menurut Penggunaannya 2013	1 eks	157.500	157.500	
77.	Produksi Tanaman Pangan 2013	1 eks	157.500	157.500	
		Jumlah	152 eks	30.137.500	
				Anggaran DIPA	31.500.000
				Sisa Anggaran Pengadaan	1.362.500

6.3.2. Pengolahan Bahan Pustaka

Kegiatan pengolahan bahan pustaka meliputi: katalogisasi, klasifikasi, pembuatan nomor panggil buku (*call number*), kantong buku, kartu buku, komputerisasi, *filig*, dan *upload database* ke server PUSTAKA. Bahan pustaka yang telah diolah dan di-*entry* ke dalam program WINISIS pada tahun 2014 sebanyak 154 judul buku dan laporan, IPTAN 39 judul, 30 artikel majalah, dan 30 artikel seminar.

Tabel 27. Koleksi *Database* Bahan Pustaka di Perpustakaan PSEKP (per 31 Desember 2014)

No.	<i>Database</i>	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Buku	9.408	9.562
2.	IPTAN	7.938	7.977
3.	Majalah	718	721
4.	Seminar	1.080	1.110

6.3.3. Pelayanan Perpustakaan

Pengunjung atau Pemustaka pada perpustakaan PSEKP pada tahun 2014 sebanyak 364 orang, yang terdiri dari 10 orang dosen, 123 orang mahasiswa, 19 orang pegawai swasta, 59 orang umum, 153 orang peneliti. Jumlah buku yang dipinjam sebanyak sebanyak 251 judul/buku. Perpustakaan juga telah memberikan pelayanan kepada pemustaka melalui *on-line* jaringan dan literature yang diperlukan dikirim berupa bahan cetakan (*foto copy*). Perpustakaan telah memberikan pelayanan kepada pemustaka melalui *on-line* jaringan dan literature yang diperlukan dikirim berupa bahan cetakan, untuk tahun 2014 pemustaka yang menggunakan jaringan *on-line* berjumlah 91 orang.

Tabel 28. Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan PSEKP Januari s/d Desember 2014

No.	Pengunjung	Jumlah
1.	Dosen	10
2.	Mahasiswa	123
3.	Swasta	19
4.	Umum	59
5.	Peneliti Instansi Lain	18
6.	Peneliti PSEKP	135
Total Pengunjung Perpustakaan		364

6.3.4. Stock Opname Bahan Pustaka

Kegiatan *stock opname* merupakan pekerjaan yang rutin dilakukan setahun sekali dan kontinyu dilakukan di perpustakaan dan bertujuan menginventarisasi bahan pustaka yang menjadi koleksi perpustakaan. Pada tahun 2014 *stock opname* dilakukan secara rutin pemeriksaan koleksi pada buku Orasi dari peneliti PSEKP dan dari Badan Litbang, buku mengenai Sosiologi yang berada di perpustakaan. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui apakah buku itu ada di lokasi/rak buku, dipinjam atau hilang serta dilihat apakah ada buku yang rusak serta ada penambahan buku atau tidak.

6.3.5. Perpustakaan Digital

Sampai tahun 2014 perpustakaan PSEKP telah meng-*update* data di *server* PUSTAKA Bogor sesuai dengan *database* yang telah ditentukan yaitu *database* Buku, IPTAN, Majalah, dan Seminar. Kegiatan yang dilaksanakan dengan adanya digitalisasi, perpustakaan PSEKP terus berusaha melengkapi *database* repository lingkup Badan Litbang Pertanian dan menerima data dalam bentuk

soft file antara lain dari PUSTAKA, PUSDATIN, Badan Litbang Pertanian, Badan Pusat Statistik Indonesia dan terbitan luar negeri. Digitalisasi perpustakaan PSEKP sudah dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://digilib.litbang.deptan.go.id/~psekp/>. Alamat tersebut diintegrasikan di server PUSTAKA Bogor. Namun dengan adanya perubahan, alamat untuk web Badan Litbang Pertanian *catalog on-line* dapat diakses melalui alamat: <http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~psekp/>

6.3.6. Kegiatan Administrasi

- a. Selama tahun 2014 terdapat 68 buah surat masuk dan 22 buah surat keluar/intern;
- b. Membimbing siswa/siswi SMU/SMK yang melakukan praktek kerja lapang;
- c. Pelaksanaan fumigasi (pemeliharaan) bahan pustaka;
- d. Menginventarisasi buku yang dipinjam;

Tabel 29. Kegiatan untuk Peningkatan Profesi Kepustakawan

No.	Uraian Tugas Kegiatan	Tanggal	Penyelenggara	Peserta
1.	Sosialisasi Aplikasi Perpustakaan Digital	29 April 2014	PUSTAKA	Edi A. Saubari
2.	Peningkatan Kinerja Pengelolaan dan layanan Perpustakaan Melalui Aplikasi Perpustakaan Digital	5-10 Mei 2014	PUSTAKA	Edi A. Saubari
3.	Temu Teknis Jabatan Fungsional NonPeneliti	15-16 Sept 2014	Badan Litbang	Sofiah Syarief, Imas Nur'Aini, Tita D.P. dan Fitna D.W.
4.	Seminar Penulisan Populer	30 Sept 2014	PUSTAKA	Fitna D.W.
5.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dan Literasi Informasi	14-16 Okt- 14	PUSTAKA	Fitna Dwi Wulandari
6.	Hari Kunjung Perpustakaan	30 Sept- 3 Okt 2014	PUSTAKA	Sofiah Syarief, Imas Nur'Aini, Tita D.P., Fitna D.W., dan Edi A. Saubari
7.	Digital Library Management	8-21 Okt 2014	AIT kerja sama dgn Badan Litbang Pertanian	Imas Nur'Aini

6.4. Kerja Sama Penelitian

Beberapa kegiatan kerja sama penelitian dengan instansi/lembaga luar negeri yang dilaksanakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah bersifat *multiyears*, sehingga kerja sama penelitian tersebut berlanjut pada tahun berikutnya. Kegiatan dengan Badan Litbang Pertanian dapat selesai dalam satu tahun anggaran. Sementara prospektif kegiatan kerja sama dan kemitraan yang masih dilaksanakan PSEKP pada tahun 2014 dengan instansi/lembaga luar negeri International Development Research Center (IDRC) terdiri atas satu kegiatan.

Secara lengkap status kegiatan kerja sama penelitian PSEKP luar negeri yang sedang dilaksanakan pada tahun 2011 dan berlanjut hingga tahun 2014, serta kerja sama dalam negeri seperti disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Status Kegiatan Kerja Sama Penelitian PSEKP (Dalam dan Luar Negeri) (per 31 Desember 2014)

No.	Judul Penelitian	Nilai Hibah/ Penerimaan	Realisasi	Persentase (%)
A. Kerja Sama Luar Negeri				
1.	<i>Eco – Health Assessment on Poultry Production Clusters (PPCs) for the Livelihood Improvement of Small Producers</i> (Kontrak tgl. 19 Juli 2011)	2.612.096.896 748.973.129	628.223.313	83,88
B. Kerja Sama Dalam Negeri				
1.	Pengembangan Organisasi dan Jaringan Kerja pada Program Nano Teknologi Litbang Pertanian	244.750.000	244.717.375	99,99
2.	Kajian Reformasi Kebijakan 2014-2019 Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian Jangka Panjang	305.000.000	304.902.500	99,97

VII. EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Kegiatan Subbidang Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Subbidang Evaluasi dan Pelaporan PSEKP berada dalam lingkup Bidang Program dan Evaluasi. Secara umum cakupan tugas Subbidang Evaluasi dan Pelaporan antara lain: (1) mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen/pelayanan dukungan penelitian dan administrasi institusi, (3) melaksanakan kegiatan seminar proposal dan hasil penelitian, (4) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan (5) menyusun berbagai laporan institusi yang bersifat reguler maupun nonreguler, baik untuk keperluan Badan Litbang Pertanian, Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian. Tugas pelaporan dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Koordinasi kegiatan monev dilaksanakan mulai dari pelaksanaan seminar proposal, penyusunan dan perbaikan proposal operasional, penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) penelitian, penyusunan *outline* penelitian, penyusunan kuesioner, penyusunan review terkait penelitian yang akan dilaksanakan, penyusunan laporan kemajuan, seminar hasil penelitian, pengecekan kelengkapan laporan akhir hasil penelitian hingga penyusunan bahan diseminasi hasil penelitian. Secara umum pelaksanaan kegiatan monev pada tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan kegiatan pelaporan, Subbidang Evaluasi dan Pelaporan bertugas menyusun berbagai macam laporan dari hasil penelitian untuk kepentingan institusi yang ditujukan kepada *stakeholders* atau pengguna lainnya. Penyusunan laporan yang sifatnya rutin mingguan adalah laporan penyerapan anggaran setiap hari Jumat sore melalui *e-monev* Badan Litbang Pertanian, sedangkan yang sifatnya bulanan adalah bahan untuk Rapat Pimpinan tingkat Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian, *e-monev* BAPPENAS, dan PMK 249 Kemenkeu, sementara itu yang sifatnya rutin triwulanan adalah pelaporan SIMONEV, SPI, dan Renaksi AKIP. Penyusunan laporan yang sifatnya insidental, antara lain bahan laporan untuk dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Laporan Kegiatan Kabadan, Tindak Lanjut Rapim Badan Litbang Pertanian, dan lainnya.

Kegiatan lain yang cukup penting dan sudah terlaksana dengan baik adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang bersifat rutin tahunan. LAKIP merupakan laporan yang berisi kinerja institusi pada tahun yang bersangkutan. LAKIP PSEKP dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan penyempurnaan, khususnya menyangkut format laporan. Pembuatan LAKIP PSEKP sampai saat ini tidak mengalami

hambatan yang berarti, kecuali cukup sulit dalam melakukan pengukuran manfaat dan dampak hasil penelitian mengingat output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangibile*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian/pengkajian PSEKP baru terlihat setelah rekomendasi kebijakan menjadi kebijakan pemerintah.

Pelaporan rutin tahunan lainnya yang juga telah dilakukan dengan baik adalah Laporan Tahunan PSEKP tahun 2013 yang menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Program dan Evaluasi, serta Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil. Materi pokok yang disajikan dalam laporan tahunan tersebut meliputi organisasi PSEKP, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penelitian, program, pendayagunaan hasil analisis dengan publikasi, dan kerja sama penelitian, serta monitoring dan evaluasi. Khusus untuk kegiatan penelitian, disajikan pula sinopsis hasil-hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan PSEKP selama tahun 2014.

7.2. Ruang Lingkup

Kegiatan penelitian dan pengembangan adalah kegiatan penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang bersifat netral. Selain kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti, diperlukan dukungan pelayanan institusi secara keseluruhan. Keduanya diperlukan dalam satu kesatuan yang saling terkait secara fungsional sehingga bisa memperoleh keluaran (*output*) penelitian sesuai kebutuhan pengguna (*stakeholders*). Kegiatan monitoring dan evaluasi (*monev*) sangat membantu dalam memberikan umpan balik (*feed back*) untuk menyempurnakan sistem yang ada menjadi lebih baik.

Kegiatan *monev* PSEKP selama tahun 2014 mencakup *monev* kegiatan penelitian dan *monev* pelayanan penelitian. *Monev* dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari: (1) Tahap persiapan dengan materi meliputi: proposal operasional, juklak penelitian, rencana laporan (*outline*), serta kuesioner (*outline* kuesioner data primer dan sekunder); (2) Tahap pelaksanaan penelitian dengan materi meliputi: kuesioner, laporan perjalanan, *entry/input* data (baik data primer maupun sekunder), dan Laporan Tengah Tahun; (3) Tahap pengolahan data dan penulisan dengan materi meliputi pengolahan data, tabulasi dan tabel analisa data primer dan sekunder, serta draft laporan; (4) Seminar, laporan akhir dan laporan final. Sementara, *monev* pelayanan penelitian dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan sebagai pendukung penelitian, yang meliputi pelayanan keproyekan, pengolahan data atau komputersisasi,

perpustakaan, publikasi, kendaraan, dan sarana penelitian. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar hasil-hasil penelitian bisa berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna.

7.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi TA 2014

Pelaksanaan kegiatan monev penelitian lingkup PSEKP TA 2014 dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Nomor 211/KP.340/I.7/02/2014 tanggal 18 Pebruari 2014, dengan susunan Tim Pelaksana Monev sebagai berikut:

- Pengarah : Dr. Handewi P. Saliem
(Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)
- Penanggung Jawab : Ir. Supena Friyatno, M.Si.
(Kepala Bidang Program dan Evaluasi merangkap anggota)
- Ketua : Dr. Nyak Ilham
(merangkap anggota)
- Wakil Ketua : Dr. Sahat M. Pasaribu
(merangkap anggota)
- Sekretaris : Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si.
(Plh. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan)
- Anggota : 1. Dr. Sri Hery Susilowati
2. Ir. Supriyati, M.S.
3. Dr. Reni Kustiari
4. Dr. Kurnia Suci Indraningsih
5. Dr. Bambang Sayaka
6. Dr. Adang Agustian
7. Dr. Ening Ariningsih
8. Yana Supriyatna, S.E.
9. Ahmad Makky Arrozi, S.Sos.
10. Eni Darwati

Dengan adanya pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Badan Litbang Pertanian pada 6 Agustus 2014, untuk lingkup PSEKP telah dilantik 2 Pejabat Eselon III dan 2 Pejabat Eselon IV. Untuk Eselon III, Dr.Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. dilantik menjadi Kepala Bidang Program dan Evaluasi menggantikan Ir. Supena Friyatno, M.Si. karena kembali ke jabatan fungsional dan Drs. Slamet Widodo, M.M. dilantik menjadi Kepala Bagian Umum menggantikan Ir. Hasyim Asari, M.M. karena mutasi ke Badan Ketahanan Pangan. Untuk Eselon

IV, Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si. dilantik menjadi Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan menggantikan Nur Khoiriyah Agustin, S.T.P., M.P. karena meninggal dunia dan Dr. Ening Ariningsih dilantik menjadi Kepala Subbidang Publikasi Hasil menggantikan Ashari, S.P., M.P. karena tugas belajar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dilakukan revisi untuk Tim Pelaksana Monev PSEKP TA 2014 melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 984/KP.340/I.7/09/2014 tanggal 1 September 2014, dengan susunan Tim Pelaksana Monev sebagai berikut:

- Pengarah : Dr. Handewi P. Saliem
(Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian)
- Penanggung Jawab : Dr. Ketut Kariyasa, M.Si.
(Kepala Bidang Program dan Evaluasi merangkap anggota)
- Ketua : Dr. Nyak Ilham
(merangkap anggota)
- Wakil Ketua : Dr. Sahat M. Pasaribu
(merangkap anggota)
- Sekretaris : Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si.
(Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan)
- Anggota : 1. Dr. Sri Hery Susilowati
2. Ir. Supena Friyatno, M.Si.
3. Ir. Supriyati, M.S.
4. Dr. Reni Kustiari
5. Dr. Kurnia Suci Indraningsih
6. Dr. Bambang Sayaka
7. Dr. Adang Agustian
8. Dr. Ening Ariningsih
9. Yana Supriyatna, S.E.
10. Ahmad Makky Arrozi, S.Sos.
11. Rizma Aldillah, SP., M.Si.

Berdasarkan Surat Penugasan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 211/KP.340/I.7/02/ 2014 tanggal 18 Februari 2014 dan Revisi Surat Penugasan Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor 984/KP.340/I.7/09/2014 tanggal 1 September 2014, tugas Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti, mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari proposal

operasional yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika penyimpangan benar-benar terjadi; (2) memberikan penilaian dan saran perbaikan yang diperlukan terhadap hasil penelitian menurut tahap-tahap kegiatan penelitian dengan mengacu pada proposal operasional; dan (3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja pelayanan pendukung penelitian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi terfokus pada kegiatan penelitian mulai dari penyusunan proposal operasional hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Sementara, tahapan peninjauan judul penelitian hingga tersusunnya proposal merupakan bagian tugas Tim Teknis, dan Tim Editor bertugas menangani output penelitian menjadi berbagai produk publikasi ilmiah yang ditujukan baik untuk *stakeholders* maupun pengguna lainnya. Keterkaitan ketiga tim tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.

Secara garis besar Subbid Evaluasi dan Pelaporan telah melakukan kegiatan seperti membantu mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dukungan penelitian dan administrasi institusi, melaksanakan kegiatan seminar proposal dan laporan hasil penelitian, mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan (pengetikan) laporan hasil penelitian, pembuatan laporan institusi, baik untuk keperluan Badan Litbang Pertanian, Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian, dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

7.3.1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian

Agar tercipta kesesuaian antara perencanaan (input), pelaksanaan penelitian dan pengolahan data/informasi (proses), serta pelaporan (output), maka perlu dirancang metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang baik agar tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat tercapai. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian PSEKP telah dituangkan dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2014. Kegiatan monev pada tahun 2014 ini ditujukan terhadap 10 judul penelitian yang sumber dananya dari APBN (DIPA) TA 2014.

Monitoring dan Evaluasi Tahap I

Perencanaan merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti dan seluruh bidang pelayanan di lingkup PSEKP. Perencanaan yang dilakukan menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) jenis dan lokasi kegiatan yang akan dilakukan, (b) susunan tim dan jadwal kegiatan, dan (c) rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap tim

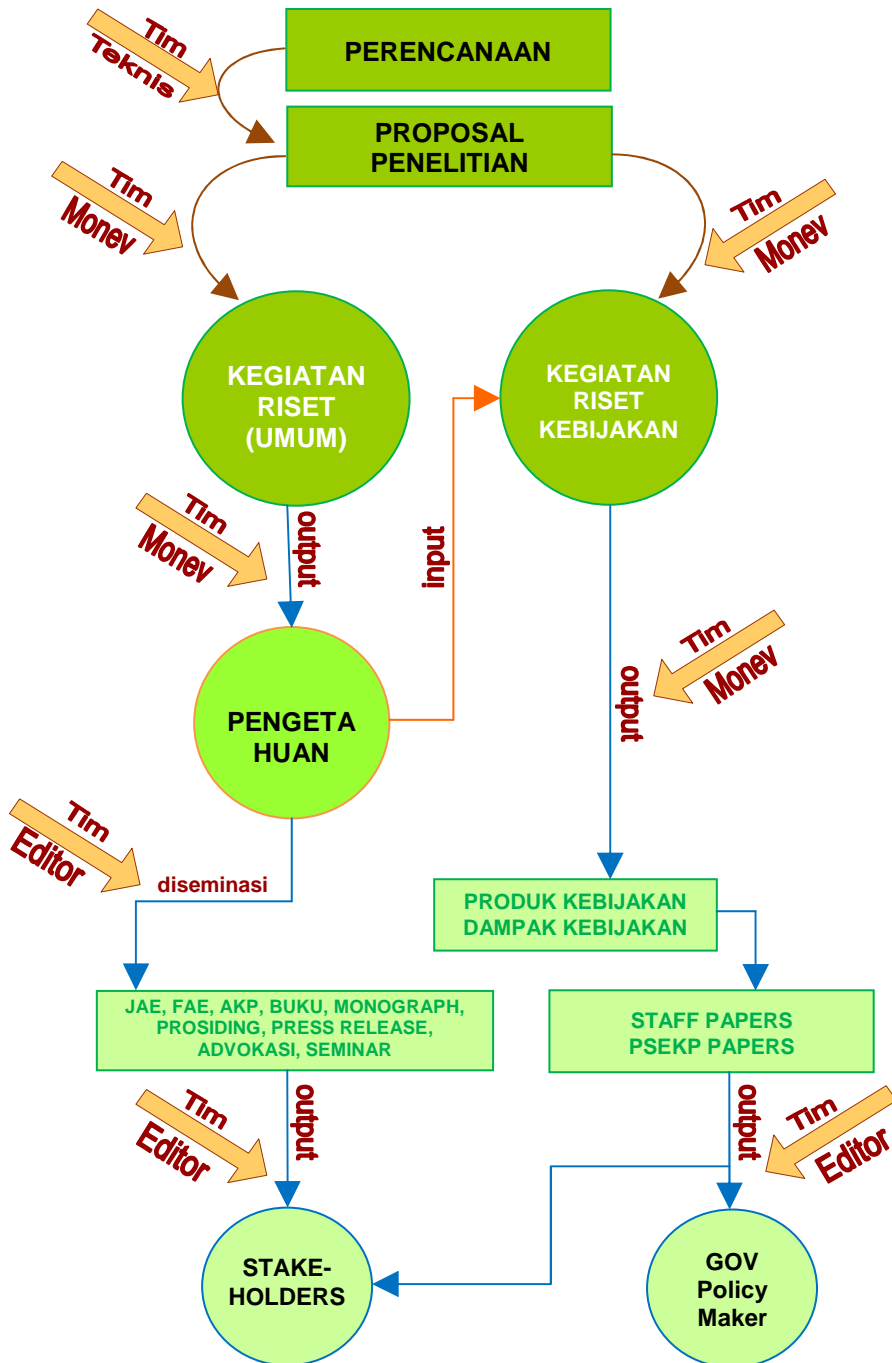
peneliti dan bidang pelayanan hendaknya menyusun perencanaan yang menyangkut ketiga aspek tersebut. Tujuannya adalah agar dapat dirancang sinkronisasi antara kegiatan penelitian dan kegiatan pelayanan dalam rangka meningkatkan kinerja institusi.

Pada tahap awal, pelaksanaan penelitian di lingkup PSEKP secara substantif meliputi dua kegiatan, yaitu: (a) menyusun proposal operasional yang merupakan acuan bagi seluruh rangkaian kegiatan penelitian, dan (b) mempersiapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang telah dirancang dalam proposal operasional, seperti petunjuk pelaksanaan (juklak), kuesioner, rencana kerangka laporan penelitian (*outline*), dan penulisan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan.

Kegiatan tersebut memiliki peranan penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proposal yang disusun dengan baik menurut kaidah-kaidah ilmiah diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas. Oleh karena itu, proposal harus didukung dengan bahan dan perlengkapan yang memadai, seperti petunjuk pelaksanaan dan kuesioner sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder di lapangan. Kegiatan monitoring evaluasi pada tahap awal bertujuan untuk menyempurnakan bahan kelengkapan survei.

Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi tahap awal pada tahun 2014 diawali dengan kegiatan seminar proposal operasional untuk mengevaluasi relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan masalah pembangunan pertanian di tingkat nasional. Proposal operasional penelitian PSEKP TA 2014 yang telah diseminarkan pada tanggal 28 Februari 2014. Jumlah proposal yang diseminarkan pada tahun 2014 sebanyak 10 judul penelitian, yang sumber dananya berasal dari DIPA PSEKP. Kegiatan seminar proposal operasional tersebut dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, instansi di luar Kementerian Pertanian antara lain Perguruan Tinggi, BAPPENAS, LIPI, dan seluruh staf peneliti PSEKP.

Dalam upaya mempertajam dan menyempurnakan arah, tujuan, serta sasaran kegiatan hasil penelitian, telah diundang pembahas dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Efisiensi Pembangunan Pertanian, Staf Ahli Mentan Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian, Direktur Pemasaran Internasional-Ditjen PPHP, Direktorat Pakan Ditjenakeswan, BAPPENAS, dan Peneliti Senior PSEKP. Langkah ini ditempuh agar rencana penelitian yang disusun dalam proposal operasional dapat dievaluasi secara obyektif oleh pihak lain, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah ilmiah dalam pelaksanaan penelitian, serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Hasil seminar proposal ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka penajaman proposal operasional.



Gambar 7. Bagan Keterkaitan Tim Teknis, Tim Monev, dan Tim Editor pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Berdasarkan hasil seminar proposal tersebut, selanjutnya Tim Peneliti melakukan penyempurnaan proposal operasional. Selanjutnya, dilakukan diskusi internal atau rapat pleno oleh Tim Monev untuk mengevaluasi perbaikan proposal operasional sesuai dengan masukan seminar proposal yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi perbaikan proposal operasional tersebut selain mengacu hasil koreksi Tim Evaluator Proposal juga mengacu pada notulen seminar proposal. Langkah ini merupakan cara yang ditempuh dalam memantau dan mengevaluasi kesiapan tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan proposal operasional. Tujuan diskusi tersebut adalah: (a) untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan, (b) evaluasi materi penelitian dan penyempurnaan bahan pengumpulan data lapangan, baik data primer maupun data sekunder, dan (c) menciptakan sinkronisasi kegiatan yang akan dilakukan oleh tim penelitian dengan bidang pelayanan terkait.

Dalam monitoring dan evaluasi internal tersebut dilihat pula aspek yang berkaitan dengan kelengkapan pelaksanaan penelitian, yaitu: kesesuaian proposal operasional, petunjuk pelaksanaan penelitian (Juklak), rencana kerangka laporan penelitian dan kuesioner. Hasil penilaian kegiatan monitoring dan evaluasi melalui Rapat Pleno Tim Monev untuk masing-masing tim penelitian selanjutnya dimasukkan dalam tiga kategori penilaian, yaitu: (1) Kategori I: tidak bermasalah, artinya jika ada perbaikan dapat dilakukan tanpa menghentikan kegiatan penelitian; (2) Kategori II, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi Tim Monev, artinya Tim Penelitian harus melakukan perbaikan sebelum turun ke lapang; dan (3) Kategori III, perlu perbaikan bahan kelengkapan survei sesuai rekomendasi Tim Monev, setelah perbaikan tersebut disetujui oleh Tim Monev dan Kepala PSEKP maka Tim Peneliti baru dapat melakukan kegiatan lapang. Hasil penilaian ini dikeluarkan oleh Tim Monev dalam bentuk Surat Keterangan Hasil Monitoring (SKHM) yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim Monev dan pihak manajemen. Selanjutnya SKHM tersebut diserahkan kepada setiap Tim Peneliti dan Tim Peneliti diberi hak jawab paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima SKHM tersebut.

Monitoring dan Evaluasi Tahap II

Dalam proses pelaksanaan penelitian, terdapat tiga macam objek monitoring dan evaluasi, yaitu: (1) Laporan Perjalanan, (2) Laporan Pengolahan Data, dan (3) Laporan Kemajuan. Pada monev tahap II, evaluasi difokuskan pada sepuluh judul penelitian yang sumber dananya dari DIPA PSEKP. Berikut diuraikan pelaksanaan monev terhadap ketiga objek monev tahap II tersebut.

Laporan Perjalanan

Pembuatan laporan perjalanan oleh tim peneliti bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapang

agar dapat diantisipasi pemecahan masalahnya, (2) mendapatkan bahan perumusan kebijakan dari temuan dan isu-isu aktual hasil temuan di lapang, (3) tertib administrasi, dan (4) penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Rincian objek monitoring dan evaluasi untuk laporan perjalanan mencakup:

1. Perkembangan pengumpulan data (primer dan sekunder) sesuai dengan rencana yang dirumuskan dalam proposal.
2. Temuan dan isu aktual yang perlu ditindaklanjuti. Salah satu tujuan monitoring dan evaluasi tahap ini adalah untuk memperoleh bahan *policy brief*.
3. Jadwal kegiatan. Pengecekan jadwal kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan dan penyempurnaan rencana kegiatan selanjutnya.
4. Penyelesaian administrasi. Secara administratif, serapan dana harus seimbang dengan volume kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penyelesaian administrasi yang terkait dengan perjalanan kegiatan penelitian merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Temuan masalah dalam pelaksanaan penelitian. Dalam proses pengumpulan data di lapang kemungkinan akan ditemui berbagai masalah dan hambatan, oleh karena itu dengan kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini berbagai kendala dalam pelaksanaan penelitian dan dapat diupayakan solusi pemecahannya.

Laporan perjalanan dibuat sesuai dengan frekuensi perjalanan Tim Penelitian ke lapangan. Secara umum, seluruh Tim Peneliti pada tahun anggaran 2014 telah menyusun laporan perjalanan dengan baik dan tepat waktu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah birokrasi yang berbelit-belit sehingga menyebabkan kesulitan perizinan penelitian di beberapa daerah, dan kurang terbukanya beberapa instansi serta responden tertentu, seperti pedagang besar, eksportir, dan industri pengolahan hasil pertanian sehingga kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping itu, seiring dengan era otonomi daerah dan pemekaran wilayah, validitas, dan kelengkapan data dan informasi di daerah menjadi kurang baik. Padahal, penelitian sosial ekonomi umumnya mengandalkan validitas dan kelengkapan data sekunder.

Pengolahan Data

Monitoring dan evaluasi terhadap pengolahan data dilakukan untuk mengantisipasi masalah dalam pengolahan data serta meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian pengolahan dan analisis data. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ini adalah target atau rencana penyelesaian

dibanding tingkat pencapaian pada masing-masing tahap kegiatan. Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengolahan data dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing penelitian. Untuk menertibkan pelaksanaan pengolahan data, telah dibuat peraturan bahwa setiap tim peneliti yang akan berangkat ke lapangan (dimulai pada tahap II) harus sudah menyerahkan isian kuesioner dari survei tahap sebelumnya. Isian data dalam kuesioner harus sudah teredit dengan baik oleh Tim Peneliti.

Data yang diolah dalam kegiatan pengolahan data ini meliputi data primer dan sekunder yang mendukung kegiatan penelitian. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara di lapang, baik di tingkat petani, kelompok tani atau lembaga perdesaan lainnya, penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, pedagang, eksportir, dan lain-lain, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran data-data yang dipublikasikan oleh instansi terkait maupun melalui internet. Data primer yang diolah dari kuesioner jumlah dan ketebalannya bervariasi antar-Tim Peneliti. Jumlah kuesioner yang besar dari masing-masing Tim Peneliti membutuhkan pengaturan dalam pengerjaannya, terutama pada tahap *entry* data dan proses validasi data. Proses input data dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (*First in First out*), artinya tim peneliti yang menyerahkan kuesioner lebih dulu akan di-*entry* dan diolah lebih dulu, demikian seterusnya sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian ini. Di samping itu, dari pihak peneliti sendiri diharapkan kesadarannya untuk secepatnya menyerahkan kuesioner, data-data maupun informasi yang diperoleh dari lapang agar tidak terjadi penumpukan di bagian *entry* data dan pengolahan data, terutama pada tengah dan akhir tahun.

Evaluasi Laporan Kemajuan

Tujuan utama kegiatan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan adalah untuk: (1) meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil penelitian, (2) meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan (3) memonitor hasil monev sebelumnya secara berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan kegiatan penelitian dapat selesai tepat waktu dan diperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan pengalaman, kontrol yang cukup ketat terhadap pembuatan laporan tengah tahun sangat membantu ketepatan tim peneliti dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Format dan isi laporan kemajuan sudah diatur dalam Pedum Monev. Berdasarkan format laporan kemajuan, maka Tim Peneliti sebenarnya telah mempersiapkan sebagian draft laporan hasil penelitian.

Secara umum seluruh Tim Peneliti telah menyusun laporan kemajuan dengan baik sesuai format yang ditentukan. Selain itu, Tim Peneliti umumnya juga telah menyerahkan Laporan Kemajuan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi Tahap III

Pada tahap III, monitoring dan evaluasi difokuskan pada penyusunan draft laporan akhir penelitian. Monev tahap III dilakukan setelah kegiatan seminar hasil penelitian. Berdasarkan seminar hasil penelitian tersebut, Tim Peneliti diharapkan memperoleh banyak masukan dari pembahas dan peserta seminar guna penyempurnaan laporan akhir.

Seminar Hasil Penelitian

Kegiatan seminar hasil penelitian di PSEKP merupakan mata rantai penting untuk penyempurnaan hasil penelitian. Kegiatan seminar hasil penelitian yang didanai oleh DIPA TA 2014. Seminar hasil penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014. Kegiatan seminar hasil penelitian DIPA TA 2014 dilakukan dengan mengundang berbagai *stakeholders* terkait, yaitu yaitu Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, pihak Perguruan Tinggi, BAPPENAS, LIPI, Dinas Pertanian Kota/Kabupaten, dan seluruh staf peneliti PSEKP. Dalam upaya mempertajam dan menyempurnakan hasil penelitian, telah diundang pembahas dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Direktur Pemasaran Internasional-Ditjen PPHP, Direktorat Pakan-Ditjenakeswan, BAPPENAS, dan Peneliti Senior PSEKP, sementara pimpinan sidang oleh peneliti senior PSEKP. Dalam kegiatan seminar hasil difokuskan kepada konsistensi antara judul, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan implikasi kebijakan. Umpan balik yang diperoleh dalam seminar hasil tersebut digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan akhir penelitian.

Draft Laporan Akhir Penelitian

Penulisan draft laporan akhir penelitian merupakan salah satu tahap atau mata rantai penting dalam proses pelaksanaan kegiatan penelitian. Pada tahapan ini, jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana penelitian dengan pelaksanaan atau hasil yang diperoleh tim peneliti dapat segera dilakukan koreksi atau penyesuaian. Indikator evaluasi terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) konsistensi proposal dengan laporan hasil penelitian, (2) koherensi pelaporan terkait kedalaman dan ketajaman hasil pembahasan, perumusan kesimpulan dan implikasi kebijakan, (3) aspek editorial yang menyangkut redaksional, penyajian tabel, kelengkapan pustaka, dan (4) ketepatan waktu penyelesaian laporan dan konsistensi format serta isi laporan sesuai dengan Pedum Monev.

Pada tahap penyusunan draft laporan akhir penelitian, ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu: (1) konsistensi antara proposal dan laporan hasil penelitian, (2) perlunya perbaikan dari segi koherensinya, dan (3) perlunya penyempurnaan dari sisi redaksional. Dari sisi substansi, hasil

monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum Tim Peneliti telah menyusun draft laporan hasil penelitian sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, konsistensi antara judul, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan serta implikasi kebijakan secara umum telah tersusun dengan baik. Terkait ketepatan waktu dalam penyelesaian draft laporan akhir, secara umum sudah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Draft laporan hasil penelitian yang dievaluasi Tim Monev diharapkan sudah mengakomodir seluruh masukan dari seminar.

Monitoring dan Evaluasi Tahap IV

Pada setiap akhir tahun anggaran, Tim Peneliti selain menyelesaikan laporan akhir penelitian, juga harus menyusun Bahan Rapim dan *Policy Brief* (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Evaluasi laporan akhir perlu mendapatkan penekanan khusus karena merupakan produk akhir yang akan menjadi bahan referensi untuk kegiatan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang relevan. Dalam rangka diseminasi hasil penelitian terdapat sejumlah output yang perlu dikomunikasikan kepada *stakeholders* utama dan masyarakat pengguna Iptek sosial ekonomi dalam arti luas. Bahan diseminasi tersebut meliputi bahan rapat pimpinan di tingkat Badan Litbang Pertanian dan Kementerian Pertanian, materi untuk forum diskusi *ad-hoc* di PSEKP, Badan Litbang Pertanian, forum tingkat nasional, bahan publikasi/penerbitan ilmiah (baik terbitan PSEKP maupun di luar PSEKP) dan bahan laporan tahunan PSEKP TA 2014. Tim Peneliti wajib menyiapkan bahan diseminasi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga penelitian, PSEKP diharapkan mampu memberikan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Pengguna hasil-hasil penelitian PSEKP secara umum adalah *stakeholders* pembangunan pertanian di tingkat pusat, daerah dan akademisi. Mengingat hasil penelitian PSEKP sangat bermanfaat bagi *stakeholders*, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian mendatang seyogyanya mengakomodasikan aspirasi para pengguna hasil penelitian PSEKP, terutama para *stakeholders* di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian masukan dan saran-saran dari *stakeholders* tersebut akan lebih menyempurnakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

Pembuatan bahan rapat pimpinan dan forum diskusi *ad-hoc*, otoritas penilaiannya berada di tangan struktural dengan finalisasi koreksi dan saran perbaikan dari Kepala PSEKP. Di sisi lain, otoritas penilaian bahan publikasi PSEKP dilakukan sepenuhnya oleh Dewan Redaksi yang ditentukan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian. Dengan mengacu pada prosedur tersebut, maka evaluasi terhadap bahan diseminasi dalam konteks pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dibatasi sampai pada penentuan

status materi tersebut. Hal tersebut merupakan kewajiban dengan target waktu yang telah ditetapkan, maka statusnya adalah apakah peneliti telah memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan materi diseminasi tersebut. Kalau persyaratan kelengkapan pengajuan ini belum dipenuhi, perlu dikemukakan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya.

Keluaran atau *output* penelitian (data dan laporan) lingkup PSEKP telah didokumentasikan secara baik. Dokumentasi data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Dokumentasi yang terkait data primer meliputi: (1) kuesioner dan buku kode variabel, dan (2) file data hasil *entry*. dokumentasi yang terkait data sekunder meliputi: (1) dokumen asli (buku, cd), (2) dokumen olahan dan (3) file data hasil pengolahan data. Secara umum hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian PSEKP dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

Pertama, sintesis, pertimbangan, dan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan opsi rumusan kebijakan (sintesis), pemikiran akademis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan pertanian (pertimbangan) dan memperjuangkan suatu kebijakan yang dianggap layak dan patut atau menolak kebijakan yang dianggap tidak layak dan tidak patut (advokasi). Sintesis kebijakan disampaikan langsung kepada pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, PSEKP juga memiliki media reguler Analisis Kebijakan Pertanian sebagai sarana penyuluhan, diseminasi, dan diskusi kebijakan.

Kedua, rekayasa model inovatif kelembagaan pembangunan pertanian. Kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antarmanusia untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Keberlanjutan sistem produksi dimungkinkan apabila inovasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Mengingat pentingnya faktor kelembagaan dalam pembangunan pertanian, maka PSEKP memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aspek kelembagaan ini.

Ketiga, analisis deskriptif mengenai kinerja dan dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian yang meliputi: (1) ekonomi makro dan mikro serta perdagangan internasional, (2) pengelolaan sumber daya dan agribisnis berkelanjutan, (3) sistem inovasi teknologi pertanian, (4) ketahanan pangan dan kemiskinan, dan (5) dinamika sosial ekonomi perdesaan. Hasil penelitian ini, berupa parameter mengenai perilaku ekonomi makro dan mikro untuk menunjang analisis maupun perumusan model kebijakan pembangunan pertanian. Parameter-parameter tersebut merupakan landasan untuk penyusunan model simulasi maupun analisis perumusan kebijakan. Hasil analisis deskripsi digunakan untuk menyusun *highlight* situasi terkini kinerja pembangunan pertanian dan lingkungan strategisnya. Laporan singkat ini dibuat dan disampaikan secara reguler kepada pimpinan Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan *well informed policy making*.

7.3.2. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi penelitiannya, PSEKP didukung oleh beberapa bidang manajemen penelitian, yaitu aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Kelima bidang manajemen penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka mendukung kegiatan penelitian di PSEKP. Dengan demikian diharapkan keluaran yang dihasilkan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja manajemen penelitian.

Pelayanan Keuangan

Untuk kelancaran administrasi keuangan, kegiatan penelitian perlu didukung pelayanan keuangan, Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah untuk meningkatkan ketepatan perencanaan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan keuangan adalah DIPA yang dirinci berdasarkan jenis pengeluaran, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial. Sebelum pelaksanaan penelitian ke lapang, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melibatkan pihak peneliti dengan pelaksana keuangan untuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur keuangan di lapang yang harus dilakukan oleh peneliti.

Indikator yang digunakan pada kegiatan ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan solusi pemecahan masalah. Dalam pelaksanaan kinerja keuangan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian terlihat adanya kemudahan dalam pencairan dana. Hal ini tampak dalam pencairan dana relatif berjalan lancar. Di samping kegiatan ke lapang, pencairan dana untuk perjalanan pendek ke wilayah Jabotabek untuk pengumpulan data sekunder dan informasi lainnya juga mengalami kemudahan.

Pelayanan Pengolahan Data

PSEKP dalam melaksanakan kegiatan penelitian didukung oleh pelayanan pengolahan data yang bertugas untuk memasukkan/*entry* data (primer dan sekunder) serta informasi yang diperoleh dari lapang serta mengolah data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti. Indikator yang digunakan pada kegiatan monev layanan pengolahan data adalah: (1) sumber daya manusia (SDM), dan (2) *hardware*. indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya manusia adalah: (1) jumlah orang, (2) pembagian kerja, dan (3) kompetensi. indikator yang digunakan untuk mengevaluasi *hardware* adalah: (1) jumlah komputer tersedia, (2) kapasitas, dan (3) manajemen pemanfaatan

hardware, sedangkan indikator yang digunakan dalam jadwal kerja pengolahan data untuk setiap judul penelitian adalah: (1) perencanaan dan (2) pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan data, bila dilihat dari sisi pengadaan sarana prasarana telah tersedia dengan baik, seperti: jumlah tenaga input data, validasi data dan pengolahan data, perangkat komputer, printer, dan sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana pengolahan data sudah cukup memadai. Unit pengolahan data, selain melakukan kegiatan pengolahan data penelitian, juga melakukan kegiatan *database* PSEKP, seperti *entry* data, *updating* data, dan melayani permintaan data sekunder untuk para peneliti. Mengingat banyaknya kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan waktu sedemikian rupa sehingga seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Agar pekerjaan terdistribusi merata, maka setiap judul penelitian mempunyai penanggung jawab untuk *entry* data dan pengolahan data.

Kegiatan pengolahan data biasanya mengikuti irama kegiatan peneliti. Pada saat peneliti melakukan prasurvei, unit pengolahan data biasanya mulai membuat *screen form* untuk persiapan *entry* data. Pada saat tengah dan akhir tahun biasanya kegiatan pengolahan data cukup padat. Input data dan pengolahan data yang dilakukan oleh tim penelitian biasanya dilakukan secara bersamaan, akibatnya proses input dan pengolahan data tersebut menumpuk di tengah dan akhir tahun. Semua Tim Peneliti mempunyai kepentingan dan jadwal yang sama untuk menyelesaikan laporan penelitian, sehingga pengolahan data harus dapat melayani semua Tim Peneliti dengan baik dan merata. Namun demikian, permasalahan pengolahan data pada bulan-bulan sibuk selama ini dapat diatasi dengan cara menambah jam kerja (kerja lembur) dan sistem FIFO (*First in First out*).

Database

Seiring dengan perkembangan teknologi, data dan informasi untuk bahan penelitian sebagian diperoleh dari *database* yang dimiliki PSEKP. Data dan informasi selain dimanfaatkan untuk analisis/kajian perumusan kebijakan, juga diperlukan dalam menunjang implementasi kebijakan, monitoring, maupun evaluasi. Suatu rekomendasi kebijakan yang baik harus memenuhi syarat: tepat dalam memahami permasalahan, tepat dalam perumusan tujuan, konsisten dengan Haluan Negara, antisipatif terhadap dinamika empiris, dan realistis (dalam arti dapat diimplementasikan), berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak tanpa mengorbankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pembangunan. Syarat-syarat seperti itu dapat dipenuhi hanya jika rekomendasi kebijakan dihasilkan dari suatu kajian, analisis, ataupun studi yang relevan dan berlandaskan prinsip-prinsip penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ilmiah, peranan data sangat strategis. Bahkan pada hakekatnya nilai hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh data dan

informasi yang menjadi bahan analisisnya. Guna memenuhi kebutuhan terhadap data yang berkualitas dan dengan cepat dapat diperoleh, maka manajemen data merupakan salah satu aktivitas pokok dari suatu lembaga/instansi; terlebih pada suatu lembaga penelitian. Manajemen data yang baik bukan hanya membantu terciptanya pelaksanaan penelitian yang baik tetapi juga mempermudah sistem verifikasi data dan informasi antarlembaga terkait.

Output yang dihasilkan oleh suatu lembaga penelitian adalah data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta rekomendasi kebijaksanaan. Oleh karena sifatnya untuk mendukung pemecahan masalah, maka hampir semua penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan output tersebut adalah penelitian terapan. Sebagai pengguna utama, maka *stakeholder* terpenting adalah pemerintah. Meskipun demikian, *user* lain juga sangat banyak, misalnya para peneliti, mahasiswa, petani, peternak, wartawan, dan lain sebagainya. Sejak beberapa tahun yang lalu, PSEKP telah melakukan aktivitas manajemen data. Dalam kegiatan ini, tercakup tiga aspek: (a) pengembangan sistem *database*, (b) pengembangan kapabilitas programmer dan analis, (c) pengembangan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu mutlak dibutuhkan dalam mewujudkan sistem data yang berdaya guna.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan *database* tahun 2014 hasilnya cukup banyak dan bervariasi, yaitu dari *updating* (pemutakhiran) data, *entry* data baru sampai pada pengadaan data yang sudah dikelola oleh lembaga lain, seperti BPS, Bank Indonesia, Deperindag, WTO, dan FAO. Pemutakhiran data bervariasi antarjenis data, tergantung pada ketersediaan data dari instansi yang menerbitkan. Ketersediaan *database* yang di miliki oleh PSEKP terbagi dalam beberapa subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. subsektor tanaman pangan terbagi dalam tiga indikator, yaitu: luas panen, produksi dan produktivitas dengan komoditas terdiri atas: padi, padi ladang, padi sawah, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau. demikian pula untuk subsektor hortikultura juga terbagi dalam tiga indikator, yaitu: luas panen, produksi dan produktivitas dengan komoditas terdiri atas: (1) sayuran: kentang, cabe besar, bawang merah, bawang daun, kol, jahe dan tomat. (2) buah-buahan: durian, jeruk, mangga, pepaya, nenas, manggis dan pisang serta (3) tanaman hias: anggrek, mawar dan melati. untuk subsektor peternakan, terbagi dalam empat indikator, yaitu: populasi ternak, jumlah ternak potong, ekspor-impor dan konsumsi (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, ayam, dan itik). sedangkan untuk subsektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kako, cengkeh, teh, tebu/gula, kopi, kelapa, lada, kapas, jambu mete, dan tembakau) terbagi dalam beberapa indikator, yaitu: luas areal, luas panen, produksi, produktivitas, ekspor-impor, produksi perkebunan besar, produksi perkebunan rakyat dan stok perkebunan besar. Selain *database* subsektor di atas, ketersediaan *database* yang dimiliki oleh PSEKP dilengkapi dengan *database* indikator makro (PDB, tingkat suku bunga, inflasi, indeks harga

konsumen, *exchange rate*, harga konsumen, harga produsen, jumlah penduduk, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan lain-lain) dan *database* Indikator Pertanian (NTP; HET pupuk; harga; jumlah pestisida yang beredar; upah nominal dan upah riil buruh tani; luas lahan pertanian berdasarkan jenis pengairan dan penggunaan, struktur ongkos berdasarkan komoditas tanaman pangan, daerah irigasi, luas lahan terkena bencana banjir, kekeringan dan serangan OPT, serta alat dan mesin pertanian (alsintan); *database* Ekspor-Impor komoditas pertanian serta *database* konsumsi yang terdiri atas: rata-rata konsumsi (protein dan kalori), konsumsi dan pengeluaran per kapita menurut jenis makanan, pengeluaran pangan dan nonpangan (tingkat nasional dan provinsi). Selain cakupan data sekunder, mulai tahun 2012 kegiatan *database* PSEKP mulai dilakukan inisiasi untuk menyusun data primer yang dapat berasal dari hasil survei lapang kegiatan penelitian di lingkup PSEKP, terutama kegiatan penelitian Panel Petani Nasional (Patanas). Kegiatan penyusunan data primer ini dilanjutkan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu validasi data Patanas periode 2007-2012, serta juga penyusunan *database* tahun-tahun selanjutnya.

7.3.3. Pelayanan Perpustakaan

Sebagai salah satu unit pelaksanaan penelitian, khususnya dalam bidang sosial ekonomi pertanian, keberadaan unit perpustakaan sangat penting dan vital dalam menunjang kegiatan penelitian. Evaluasi pelayanan perpustakaan penting dilakukan dan indikator yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi, yaitu: (1) stok buku/bahan pengetahuan, (2) penyajian dan pelayanan, (3) tingkat pemanfaatan menurut pengguna, (4) tingkat pemanfaatan menurut bahan, dan (5) masalah yang dihadapi.

PSEKP memiliki satu unit perpustakaan dengan koleksi buku dan majalah ilmiah yang cukup lengkap, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Koleksi buku di unit perpustakaan mencapai 9.562 buku; 7.977 buku yang berisi tentang Informasi Teknologi Pertanian; 721 Majalah yang berhubungan dengan pertanian dan 1.110 adalah Laporan Hasil Penelitian. Selain itu, perpustakaan PSEKP juga mempunyai sejumlah koleksi prosiding, laporan-laporan statistik dan laporan hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penelitian sosial ekonomi pertanian. Untuk melengkapi kebutuhan informasi terkini yang dibutuhkan oleh para peneliti, maka perpustakaan ini juga berlangganan koran Kompas, Republika, Bisnis Indonesia, Sinar Tani serta majalah Trubus. Unit perpustakaan ini dikelola oleh lima orang pustakawan. Jumlah koleksi buku dan majalah akan terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian.

Pengguna layanan unit Perpustakaan diperuntukkan bagi semua kalangan, sedangkan untuk layanan peminjaman buku hanya dikhususkan untuk pegawai Lingkup PSEKP saja. Pelayanan kepada pengguna

perpustakaan tersebut diberikan dengan dua cara, yaitu *open access* untuk peneliti PSEKP dan *closed access* untuk pengguna di luar PSEKP. Pada tahun 2014, jumlah pinjaman pustaka mencapai 364 peminjam dengan 251 judul buku yang dipinjam. Judul buku/pustaka yang dipinjam sedikit mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pelayanan secara *on-line* terhadap para peneliti PSEKP. Untuk membantu mempermudah pengguna dalam menelusuri pustaka yang dimiliki, perpustakaan PSEKP telah dilengkapi dengan empat buah unit komputer yang digunakan untuk melayani konsumen dalam mendukung kecepatan pencarian pustaka. Selain itu komputer tersebut juga digunakan untuk menyimpan dan mem-*file* data-data pustaka yang tersedia. Kenyamanan pengunjung perpustakaan semakin bertambah dengan dilengkapinya ruangan baca dengan sistem pendingin udara.

7.3.4. Evaluasi Pelayanan Publikasi

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publikasi, indikator yang digunakan dalam evaluasi ini adalah: (1) Perencanaan, yang terdiri dari rencana penerbitan, rencana distribusi, dan jadwal, (2) Distribusi, yang terdiri dari lingkup PSEKP, Badan Litbang Pertanian, Perguruan Tinggi, dan lainnya. Indikator perencanaan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam konteks ini ditekankan pada penerbitan dan distribusi dari masing-masing penerbitan yang dilakukan PSEKP.

Salah satu tugas PSEKP adalah mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian yang dalam pelaksanaannya dapat berupa publikasi. Beberapa publikasi yang diterbitkan oleh PSEKP pada tahun 2014 adalah: (1) Jurnal Agro Ekonomi (JAE), (2) Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), (3) Analisis kebijakan Pertanian (AKP), (4) Prosiding hasil seminar, (5) Monograph, (6) Laporan Tahunan, (7) Working Paper, dan (8) Laporan Hasil Penelitian.

Berbagai macam media publikasi tersebut disediakan oleh PSEKP dan digunakan sebagai wadah untuk menampung kebutuhan peneliti dalam mempublikasikan tulisan atau makalahnya. JAE merupakan media ilmiah penyebaran hasil-hasil penelitian sosial ekonomi Pertanian untuk menunjang pengembangan dan penelitian di Indonesia. JAE memuat hasil-hasil penelitian sosial ekonomi pertanian dengan misi meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme para ahli sosial ekonomi pertanian dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pertanian, pangan, sumber daya, dan pembangunan ekonomi. Dalam JAE, kekuatan metodologi penelitian sangat diperhatikan. JAE tersebut diterbitkan dua kali setahun. FAE adalah media ilmiah komunikasi hasil penelitian yang berisi *review* hasil penelitian sosial ekonomi pertanian di Indonesia. FAE memuat "*critical review*" hasil-hasil penelitian para peneliti PSEKP dan lembaga lainnya. FAE juga

menampung naskah-naskah yang berupa gagasan atau konsepsi orisinal dalam bidang sosial ekonomi pertanian. FAE juga diterbitkan dua kali setahun. Publikasi Analisis Kebijakan Pertanian adalah media ilmiah yang membahas isu aktual kebijakan pertanian yang memuat artikel analisis kebijakan pertanian dalam bentuk gagasan, dialog, dan polemik. Media Analisis Kebijakan Pertanian ini diterbitkan dua kali dalam setahun. Working Paper merupakan publikasi yang memuat tulisan ilmiah peneliti PSEKP mengenai hasil penelitian, gagasan ilmiah, opini, pengembangan metodologi, pengembangan alat analisis, argumentasi kebijakan, pandangan ilmiah, dan review hasil penelitian

Adanya berbagai media penerbitan ilmiah di PSEKP, maka peneliti PSEKP dapat menyalurkan ide, pemikiran dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan sosial ekonomi pertanian dengan baik. Bagi peneliti yang kreatif akan semakin mudah dalam meningkatkan jenjang fungsional penelitiannya. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa ketersediaan media yang cukup banyak tersebut sangat membantu peneliti dalam meningkatkan dan memelihara jabatan fungsional penelitiannya. Salah satu yang mungkin perlu mendapat perhatian manajemen adalah ketepatan waktu penerbitan yang masih belum seluruhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Website dan Internet

Sebagai unit kerja yang khusus menangani kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian di Kementerian Pertanian, PSEKP telah lama membina hubungan kerja sama dengan lembaga penelitian baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seringkali institusi dalam dan luar negeri membutuhkan data dan informasi hasil penelitian PSEKP. Sebagai institusi publik, maka sudah selayaknya jika PSEKP memiliki sarana untuk dapat menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Untuk lebih memberikan pelayanan yang optimal dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan melalui diskusi dengan publik, pelayanan publikasi PSEKP juga telah membangun situs atau Website sendiri dengan alamat: <http://www.pse.litbang.deptan.go.id>. Website ini telah *on line* dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat maupun *stakeholders* yang membutuhkan data dan informasi mengenai kegiatan PSEKP selama 24 jam penuh. Situs atau Website tersebut juga menjadi sarana komunikasi hubungan kerja antara PSEKP dengan institusi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk lebih memberikan kenyamanan dan kecepatan pengguna dalam mengakses situs PSEKP tersebut, saat ini sedang dibuat tampilan baru. Selain itu, juga sedang disusun program informasi opini yang dirancang untuk memberikan pandangan atau tanggapan terhadap masalah pembangunan pertanian terkini.

Selain Website, PSEKP juga telah membangun jaringan internet di setiap ruangan peneliti dan pejabat struktural. Layanan informasi tersebut dilakukan dengan pemasangan instalasi *Local Area Network* (LAN). Instalasi ini memiliki 2 unit *switch* yang masing-masing memiliki 24 *port* sehingga maksimal CPU yang dapat dijadikan jaringan adalah 48 unit terminal yang tersebar di seluruh gedung, mulai dari Gedung A di depan dan Gedung B di belakang. Pembangunan jaringan internet ini dimaksudkan agar para peneliti dan pejabat struktural dapat mengakses perkembangan informasi secara cepat dan murah. Selain itu, adanya jaringan internet ini akan mempermudah peneliti dalam mengakses data dari berbagai institusi di seluruh dunia. Dengan demikian diharapkan kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

7.3.5. Sarana Penelitian

Indikator yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelayanan sarana penelitian adalah: (1) rencana pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis dan jumlah dan (2) realisasi pengadaan, yang terdiri dari jadwal, jenis dan jumlah. Kedua indikator tersebut juga akan dilihat jika terdapat permasalahan yang dijumpai oleh pelayanan penelitian dan cara pemecahan masalah.

Sarana penelitian yang dimaksud dalam konteks ini adalah sarana alat tulis kantor (ATK) terdiri dari toner, tinta printer, kertas, flash disk, dan lainnya. Setiap tim dapat mengajukan kebutuhan ATK-nya sesuai kebutuhan untuk penelitian baik menjelang survei maupun saat kegiatan di kantor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penelitian, peneliti telah dilengkapi fasilitas komputer dan jaringan internet yang tersedia di setiap ruangan peneliti. Untuk kelancaran komunikasi internal kantor disediakan pula telepon penghubung antarruangan sehingga memudahkan komunikasi antarpegawai, baik di dalam kantor maupun menerima telpon dari luar kantor. Bahkan untuk kenyamanan kerja, maka di hampir setiap ruangan peneliti telah dilengkapi dengan fasilitas *air conditioner* (AC).

Salah satu aspek pengelolaan sarana penelitian adalah pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pengelolaan aset PSEKP pada TA 2014 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Aset tetap yang dimiliki oleh PSEKP berupa tanah senilai Rp8,12 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp9,61 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp6,98 miliar, dan aset tetap lainnya senilai Rp140,21 juta, serta konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp9,20 miliar. Sementara akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp8,13 miliar. Dengan demikian, total aset yang dimiliki oleh PSEKP sekitar Rp25,93 miliar.